



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SOLOK SELATAN 2016 - 2021



**KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2016**



SAMBUTAN BUPATI SOLOK SELATAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya dan kekuatan lahir batin sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuannya sehingga penyusunan RPJM Daerah ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

RPJMD ini merupakan rencana yang menguraikan gambaran umum, analisis isu strategis, desain strategi, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama Tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RPJM Daerah ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran demi penyempurnaan RPJM Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.

Semoga RPJMD ini dapat bermanfaat bagi para perencana, pelaksana, pengendali dan pengambil keputusan untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan di masa datang. Mari kita rapatkan barisan dengan semangat satu Solok Selatan, satu perencanaan, satu manajemen yang terintegrasi, kita wujudkan masyarakat Solok Selatan yang lebih sejahtera dan religius.

Wassalam.

Solok Selatan, 20 Oktober 2016
BUPATI SOLOK SELATAN

H. MUZNI ZAKARIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1. Latar Belakang	I.1
	2. Dasar Hukum Penyusunan	I.2
	3. Maksud dan Tujuan	I.4
	4. Hubungan Antar Dokumen	I.5
	5. Sistematika Penulisan	I.20
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
	1 Aspek Geografi dan Demografi	II.1
	2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.11
	3 Aspek Pelayanan Umum	II.27
	4 Aspek Daya Saing Daerah	II.66
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III.1
	1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III.1
	2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III.7
	3 Kerangka Pendanaan	III.14
BAB IV	PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS	IV.1
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
	1 Visi	V.1
	2 Misi	V.2
	3 Tujuan dan Sasaran	V.3
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI.1

BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII. 1
1.	Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	VII.1
2.	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021	VII.4
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII.1
1	Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021	VIII.1
2	Kebutuhan Pendanaan	VIII.4
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX.1
1	Penentuan Indikator Kinerja	IX.1
2	Indikator dan Target Kinerja	IX.3
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X.1
1	Pedoman Transisi	X.1
2	Kaidah Pelaksanaan	X.2
3	Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	X.3

Daftar Tabel

Tabel	2.1.	Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan	II.1
Tabel	2.2	Peruntukkan Kawasan di Kabupaten Solok Selatan	II.5
Tabel	2.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten Solok Selatan	II.10
Tabel	2.4	Jumlah, Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2015	II.10
Tabel	2.5	PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Tahun 2010-2015	II.13
Tabel	2.6	Kontribusi Per Sektor PDRB Perluasan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2010-2015	II.14
Tabel	2.7	Kontribusi Per Sektor PDRB Perluasan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2010-2015	II.15
Tabel	2.8	Laju Pertumbuhan Tiap Sektor PDRB Atas Harga Konstan dan Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2010-2015	II.16
Tabel	2.9	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.19
Tabel	2.10	Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang terselesaikan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.20
Tabel	2.11	Perkembangan APK Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.22
Tabel	2.12	Perkembangan APM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.22
Tabel	2.13	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.23
Tabel	2.14	Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015	II.26
Tabel	2.15	Perkembangan Prasarana Olah Raga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.26
Tabel	2.16	Perkembangan Kondisi Jalan Lokal Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.35
Tabel	2.17	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Tahun 2010-2015	II.36
Tabel	2.18	Perkembangan Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak dan Akses Rumah Berlistrik di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.38
Tabel	2.19	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.39
Tabel	2.20	Perkembangan Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.40
Tabel	2.21	Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.40
Tabel	2.22	Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Solok Selatan	II.41

		Tahun 2015	
Tabel	2.23	Perkembangan Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.44
Tabel	2.24	Jumlah Tanah Bersertifikat yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.45
Tabel	2.25	Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 – 2015	II.48
Tabel	2.26	Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum, Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal Bis di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.50
Tabel	2.27	Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.50
Tabel	2.28	Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 - 2015	II.51
Tabel	2.29	Perkembangan Kinerja Koperasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015	II.52
Tabel	2.30	Perkembangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015	II.53
Tabel	2.31	Perkembangan Investasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2014	II.53
Tabel	2.32	Investasi Berdasarkan Pelaku Ekonomi Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014	II.54
Tabel	2.33	Distribusi Investasi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku	II.55
Tabel	2.34	Perkembangan Kinerja Aspek Manajemen Pelayanan Publik di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.56
Tabel	2.35	Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.56
Tabel	2.36	Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 – 2015	II.58
Tabel	2.37	Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.58
Tabel	2.38	Perkembangan Kinerja Urusan Kearsiapan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 - 2015	II.59
Tabel	2.39	Perkembangan Kinerja Fokus Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.60
Tabel	2.40	Perkembangan Kinerja Fokus Layanan Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.61
Tabel	2.41	Perkembangan Kinerja Fokus Layanan Urusan Pertanian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.62
Tabel	2.42	Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.62
Tabel	2.43	Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok	II.63

		Selatan Tahun 2010-2015	
Tabel	2.44	Perkembangan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.63
Tabel	2.45	Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.64
Tabel	2.46	Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.65
Tabel	2.47	Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.65
Tabel	2.48	Perkembangan Kinerja Urusan Ketransmigrasian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.66
Tabel	2.49	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Solok Selatan Periode 2010-2015	II.67
Tabel	2.50	Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.68
Tabel	2.51	Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.69
Tabel	2.52	Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.69
Tabel	2.53	Perkembangan Indikator Urusan Penataan Ruang untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.70
Tabel	2.54	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.71
Tabel	2.55	Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015	II.71
Tabel	2.56	Perkembangan Indikator Urusan Ketenagakerjaan untuk Fokus Sumberdaya Manusia di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.72
Tabel	3.1	Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2011 - 2015	III.2
Tabel	3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 – 2015	III.4
Tabel	3.3	Neraca Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 - 2015	III.6
Tabel	3.4	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 - 2015	III.6
Tabel	3.5	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 – 2015	III.8
Tabel	3.6	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2011-2015	III.10
Tabel	3.7	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011- 2015	III.11

Tabel	3.8	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015	III.12
Tabel	3.9	Analisis Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015	III.13
Tabel	3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2011-2015	III.13
Tabel	3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2011-2015	III.14
Tabel	3.12	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2011-2015	III.15
Tabel	3.13	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2021	III.18
Tabel	3.14	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2016 – 2021	III.20
Tabel	3.15	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2016 – 2021	III.21
Tabel	3.16	Komposisi Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah per Prioritas Daerah Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2016 – 2021	III.22
Tabel	4.1	Permasalahan dan Isu Strategis Menurut Urusan Pemerintahan (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	IV.3
Tabel	4.2	Sandingan Isu Strategis RPJMN 2014-2019, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2016-2021	IV.18
Tabel	5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021	V.3
Tabel	7.1	Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015	VII.2
Tabel	9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021	IX.4

Daftar Gambar

Gambar	1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.6
Gambar	1.2	Strategi Pembangunan Nasional	I.9
Gambar	2.1	Peta Batas-Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan	II.2
Gambar	2.2	Perbandingan IPM Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	II.12
Gambar	2.3	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	II.17
Gambar	2.4	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Solok Selatan	II.18
Gambar	2.5	Perkembangan RLS dan HLS Penduduk Kabupaten Solok Selatan	II.21

Gambar	2.6	Perkembangan AKB dan AKI Kabupaten Solok Selatan 2010-2015	II.23
Gambar	2.7	Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.25
Gambar	2.8	Jumlah Guru Kab Solok Selatan yang Berijazah di Bawah S 1 Tahun 2010 - 2015	II.29
Gambar	2.9	Jumlah Guru Kabupaten Solok Selatan yang Berijazah S1 Keatas Tahun 2011 - 2015	II.30
Gambar	2.10	Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 s/d 2015	II.33
Gambar	2.11	Persentase Keluhan Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015	II.34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, prakarsa, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan aspek hubungan keuangan, hubungan antar susunan pemerintahan, keserasian hubungan antar daerah dan atau dengan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sehingga mampu mencegah ketimpangan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah ini, Pemerintah telah menetapkan seperangkat peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi RPJP Daerah untuk jangka waktu dua puluh tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun.

Ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan RPJM Daerah tersebut Kepala Daerah menyusun RKPD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setelah RPJM Daerah ditetapkan, satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bersifat indikatif, baik yang akan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. RPJM Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dasar pertimbangan penetapan periode tahun RPJM Daerah yaitu tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Periode RPJMD Kabupaten Solok Selatan sebelumnya adalah Tahun 2005-2010.
- 2) RKPD Tahun 2016 telah ditetapkan menjadi RKPD transisi sebagai acuan pelaksanaan pembangunan tahun 2016.
- 3) Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan terpilih dilantik tanggal 22 Maret 2016 sehingga secara efektif akan melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan visi dan misi baru mulai tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 216);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode lima tahunan yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman untuk

penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan setelah melalui forum OPD dari rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah secara berjenjang.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, adalah:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016-2021;
- 3) Menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program tahun 2010-2015 dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan tersusunnya RPJM Daerah, akan memberikan gambaran mengenai kemana Kabupaten Solok Selatan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

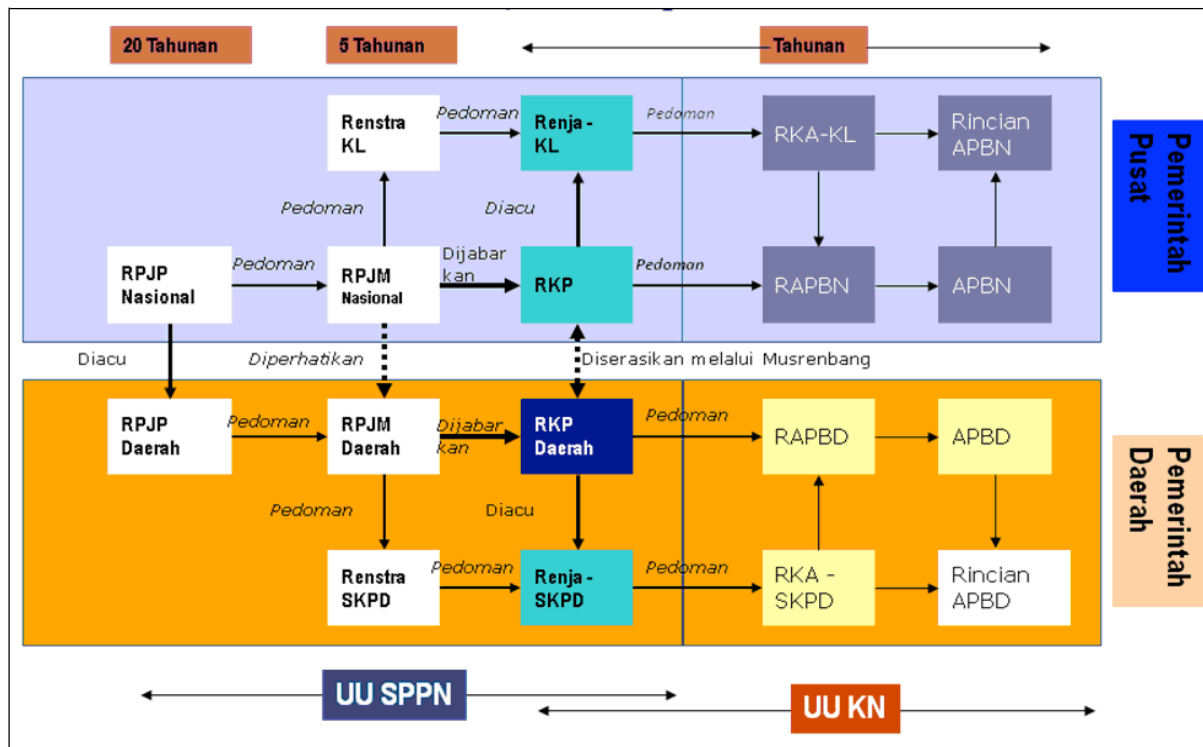
RPJM Daerah merupakan bagian dari atau satu sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional serta berpedoman pada RPJP Daerah, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, RPJP Nasional, RTRW Daerah, RTRW Provinsi Sumatera Barat, dan RTRW Nasional. Selanjutnya RPJM Daerah, menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan dan Renstra OPD.

Secara teknis hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dari PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, Penyusunan RPJM Daerah harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RPJM Daerah juga harus memperhatikan RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan RTRW Kabupaten Solok

Selatan Tahun 2012–2032, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016–2021 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang. Hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya secara teknis menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dapat disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Visi RPJP Nasional adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Visi tersebut dijabarkan dalam delapan (8) misi yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi.
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, dan

- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia.

Delapan (8) misi pembangunan jangka panjang nasional tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pokok serta ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan untuk masing-masing tahapan pembangunan. RPJM Daerah menjadi bagian dari tahapan ketiga RPJP Nasional. Hasil penelaahan terhadap RPJP Nasional merupakan bahan masukan RPJM Daerah pada bagian perumusan penjelasan visi dan misi serta perumusan tujuan dan sasaran yang dipadukan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Visi RPJM Nasional adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka dirumuskan sembilan (9) agenda utama pembangunan nasional 2015-2019 yang selanjutnya disebut Nawacita, sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agenda I | : | Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara. |
| Agenda II | : | Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. |
| Agenda III | : | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. |

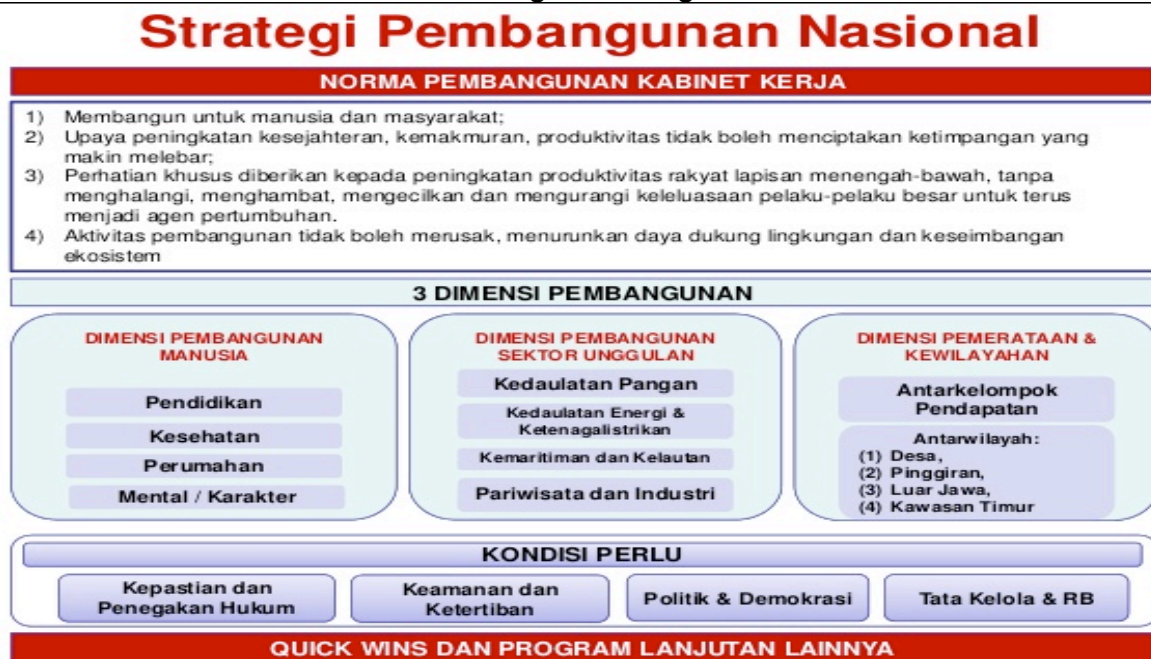
- | | | |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agenda IV | : | Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. |
| Agenda V | : | Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. |
| Agenda VI | : | Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. |
| Agenda VII | : | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. |
| Agenda VIII | : | Melakukan revolusi karakter bangsa. |
| Agenda IX | : | Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. |

Sembilan (9) agenda utama dijabarkan menjadi tiga (3) strategi pembangunan nasional yang selanjutnya menjadi pedoman bagi RPJMD Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun prioritas pembangunan Kabupaten Solok Selatan selama periode 2016-2021. Tiga (3) strategi tersebut (lihat Gambar 1.2.) adalah:

- 1) Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- 2) Tiga Dimensi Pembangunan adalah:
 - a) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat;
 - b) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
 - c) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
- 3) Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi tersebut antara lain:
 - a) Kepastian dan penegakan hukum;
 - b) Keamanan dan ketertiban;

- c) Politik dan demokrasi; dan
 - d) Tetakelola dan reformasi birokrasi.
- 4) *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Gambar 1.2 Strategi Pembangunan Nasional



Sumber: RPJMN 2014-2019

Hasil penelaahan terhadap RPJM Nasional merupakan bahan masukan RPJM Daerah pada bagian analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028

Kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional Tahun 2008-2028 merupakan arahan yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat untuk diemban oleh masing-masing daerah termasuk Kabupaten Solok Selatan dalam mencapai tujuan penataan ruang. Dalam konteks Sistem RTRW Nasional, Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kategori Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pada tataran lokal. Selanjutnya pada rencana tata ruang tersebut, sebagai PKL Kabupaten Solok Selatan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung perkembangan sektor pertanian, pertambangan dan

perkebunan. Selanjutnya, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terletak di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam pengembangan kawasan strategis nasional.

Kebijakan penataan ruang wilayah nasional secara umum terbagi menjadi tiga jenis kebijakan meliputi; kebijakan pengembangan struktur ruang, kebijakan pengembangan pola ruang dan kebijakan pengembangan kawasan strategis. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi:

- 1) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki.
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang yang terbagi dalam pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya, meliputi:

- 1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya.
- 4) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hasil penelaahan terhadap RTRW Nasional merupakan bahan masukan RPJM Daerah pada bagian analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Solok Selatan yang dipadukan dengan hasil evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2006-2011.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat adalah Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

- 1) Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*".
- 2) Mewujudkan sistim hukum dan tata pemerintahan yang baik.
- 3) Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi.
- 4) Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global.
- 5) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Lima (5) misi pembangunan jangka panjang daerah tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pokok serta ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan untuk masing-masing tahapan pembangunan. RPJM Daerah menjadi bagian dari tahapan ketiga RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Hasil penelaahan terhadap RPJPD Provinsi Sumatera Barat merupakan bahan masukan RPJM Daerah pada bagian perumusan penjelasan visi dan misi serta perumusan tujuan dan sasaran yang dipadukan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032

Isi pokok RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, menjabarkan rencana struktur, pola, dan penetapan kawasan strategis ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. RTRW provinsi Sumatera Barat telah menetapkan kawasan Abai dan Sangir (Taluak Aie Putih) di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi sebagai pengembangan kawasan strategis provinsi.

Rencana struktur ruang meliputi: sistem perdesaan, perkotaan, perwilayahan, dan jaringan prasarana wilayah. Rencana pola ruang menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan Kabupaten Solok Selatan bersama dengan Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Dharmasraya, dan lainnya ditetapkan sebagai rencana pengembangan kawasan perkebunan dan pengembangan kawasan peternakan yang terintegrasi: sapi dengan sawit dan kambing dengan coklat.

Dalam konteks rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Solok Selatan, RTRW Provinsi Sumatera Barat merencanakan struktur ruang wilayah meliputi:

1) Sistem perkotaan

Dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kategori PKL (Padang Aro) untuk memberikan pelayanan pada *hinterlandnya*. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan pusat kegiatan lokal sebagai simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.

2) Sistem jaringan transportasi

Sistem jaringan transportasi, Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam pengembangan jaringan jalan kolektor primer dari Padang Aro menuju Dharmasraya, yang menghubungkan antar kota dalam provinsi. Untuk mendukung jaringan transportasi ini, Provinsi Sumatera Barat juga merencanakan pengembangan terminal regional tipe B. Selain itu, mengacu pada arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, Kabupaten Solok Selatan diarahkan untuk mengembangkan sistem prasarana transportasi udara yang mengacu pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang provinsi dan kawasan

strategis. Untuk mewujudkan rencana ini, pembiayaannya dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antar Pemerintah Pusat dan Provinsi, antar Pemerintah Pusat dan Kabupaten, maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah, yang memiliki jangka waktu pembangunan 20 tahun.

3) Sistem jaringan sumberdaya air

Kabupaten Solok Selatan ditetapkan sebagai kawasan resapan air, dengan beberapa wilayah lainnya seperti Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan lainnya. Hal ini berkaitan dengan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi; sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, dan sistem pengendalian banjir. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air ini direncanakan melalui pendekatan daerah aliran sungai (DAS) dan cekungan air tanah (CAT).

4) Sistem prasarana lingkungan.

Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah dalam rencana pengembangan kawasan lindung (kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya) yang terletak di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Selain itu, Kabupaten Solok Selatan juga termasuk kawasan rawan bencana banjir dan rawan bencana alam geologi yaitu rawan pergerakan tanah. Hal ini disebabkan Kabupaten Solok Selatan berada pada zona patahan aktif Semangko. Untuk *sustainable development* khususnya di bidang lingkungan, RTRW Provinsi Sumatera Barat merencanakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di setiap kabupaten.

5) Pengembangan pariwisata

Untuk pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Solok termasuk dalam kategori Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) IV dengan jenis wisata rekreasi danau dan sungai, pegunungan, hutan, agro, taman nasional, budaya dan kesenian.

Hasil penelaahan terhadap RTRW Provinsi Sumatera Barat merupakan bahan masukan RPJM Daerah pada bagian analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Solok Selatan yang dipadukan dengan hasil evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2005-2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*".

- 2) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, berdayasaing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah.
- 5) Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Hasil penelaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan bahan masukan RPJM Daerah pada bagian analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025

Visi RPJP Daerah adalah Solok Selatan adalah Terwujudnya Kabupaten Bermartabat yang AMANAH: Aman, Makmur-Sejahtera, Agamis, Nalar dan Harmonis. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

1. Meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha bagi rakyat dan pemerintah di Kabupaten Solok Selatan.
2. Mempercepat upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesadaran beragama dalam masyarakat yang tercermin dalam praktek ibadah dan perilaku sosial.
4. Mendorong terciptanya iklim intelektual dan akal sehat yang lebih mengedepankan fikiran-fikiran rasional dan inovatif dalam memecahkan masalah bersama.

Empat (4) misi pembangunan jangka panjang daerah tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pokok serta ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan untuk masing-masing tahapan pembangunan. Sasaran pokok tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha bagi rakyat dan pemerintah di kabupaten Solok Selatan. Dalam 20 tahun ke depan kabupaten ini secara bertahap senantiasa mengupayakan agar daerah ini makin aman, nyaman, tertib dan teratur, yang didukung oleh upaya penegakan hukum yang konsekwen dan tanpa pandang bulu. Singkatnya kabupaten yang aman untuk bekerja dan berusaha.
- 2) Mempercepat upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkelanjutan. Untuk itu diupayakan pula agar sumber daya alam dan manusianya mampu menjamin terjadinya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara bertahap. Ini dapat dicapai dengan mengurangi persentase pengangguran, peningkatan pendapatan daerah dan rakyat; peningkatan persentase mutu dan kesempatan pendidikan; menaikkan tingkat kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan ibu dan anak.

- 3) Mewujudkan kesadaran beragama dalam masyarakat yang tercermin dalam praktek ibadah dan perilaku sosial. Misi ini sekaligus dirumuskan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong mengamalkan ajaran filosofi dan/atau doktrin sosial adat Alam Minangkabau yang berbunyi *Adat basandi syara'; Syara' (agama) basandi Kitabullah* (ABS- SBK) – *Syara' mangato, adat mamakai*.
- 4) Mendorong terciptanya iklim intelektual dan akal sehat yang lebih mengedepankan fikiran-fikiran rasional dan inovatif dalam memecahkan masalah bersama. Bernalar saja tidak cukup, perlu ditambahkan etos kerja keras. Nalar dan etos kerja keras mendorong tumbuhnya rasa percaya diri yang merupakan mesin perubahan untuk maju menuju sejahtera.

RPJM Daerah Tahun 2016-2021 menjadi bagian dari tahapan ketiga RPJP Daerah. Hasil penelaahan terhadap RPJP Daerah merupakan bahan masukan RPJM Daerah Tahun 2016-2021 pada bagian perumusan penjelasan visi dan misi serta perumusan tujuan dan sasaran yang dipadukan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032.

Isi pokok RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012, menjabarkan konsepsi tujuan, rencana struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah terwujudnya Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah yang mampu mengembangkan pusat-pusat pelayanan di segala bidang di Provinsi Sumatera Barat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan secara merata.

Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang adalah:

- 1) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarkhi;
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Kebijakan pengembangan pola ruang terdiri dari kebijakan pengembangan kawasan lindung, kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi;

- 1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup pada masing-masing kawasan dengan fungsi lindung di Kabupaten Solok Selatan;
- 2) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup pada masing-masing kawasan lindung di Kabupaten Solok Selatan.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya, meliputi;

- 1) Perwujudan dan peningkatan peran sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor basis pengembangan wilayah dengan memadukan dan memperluas keterkaitan ke depan dan ke belakang antar kegiatan budidaya produktif dengan sektor basis;
- 2) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya pada masing-masing kawasan dengan peruntukan budidaya di Kabupaten Solok Selatan agar tetap di bawah ambang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sedangkan Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis meliputi;

- 1) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang mandiri, produktif, efisien dan berdaya saing;
- 2) Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
- 3) Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;

Hasil penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Solok Selatan merupakan bahan masukan RPJM Daerah pada bagian analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Solok Selatan yang dipadukan dengan hasil evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2010.

Di samping dokumen-dokumen tersebut yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, terdapat dokumen-dokumen perencanaan lain yang harus diperhatikan khususnya untuk menjaga konsistensi pembangunan masing-masing urusan/sektor. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah Tataran Transportasi Lokal (Tatralok), Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), *Millenium Development Goals (MDG's)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta Target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hasil penelaahan dokumen-dokumen tersebut merupakan bahan masukan RPJM Daerah pada bagian arah kebijakan dan kebijakan umum.

RPJMD Daerah Tetangga

Pembangunan sejatinya memperhatikan keselarasan dan keharmonisan dengan pembangunan daerah tetangga. Dengan adanya sinkronisasi rencana pembangunan antar wilayah tetangga, pembangunan akan terlaksana secara *holistic* dan berkelanjutan masing-masing daerah. Secara kewilayahan Kabupaten Solok Selatan berbatasan dengan enam daerah yaitu; Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, kemudian dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi. Untuk tercapainya pembangunan yang selaras dan berkualitas antar tetangga, maka perlu memperhatikan visi dan misi ke enam kabupaten

tetangga tersebut:

1. RPJMD Kabupaten Solok

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, dengan Visi **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**, dengan Misi 1) Mensukseskan Wajib Belajar 12 Tahun, 2) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat, 3) Meningkatkan Peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, 4) Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi: *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, didukung oleh pemerintah nagari (nagari adat) yang kuat dengan meningkatkan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, 5) Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*).

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJMD Kabupaten Solok Selatan adalah dengan ditetapkannya jalan provinsi dari Lubuk Selasih sampai dengan perbatasan Provinsi Jambi di Kerinci menjadi jalan nasional pada tahun 2015. Sesuai dengan program prioritas pembangunan Solok Selatan salah satunya fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pembangunan ruas jalan nasional menjadi salah satu isu yang sangat prioritas untuk ditingkatkan pembangunannya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan pembangunan jalan nasional dimaksud. Disamping itu, juga terbuka peluang untuk pembangunan tempat pengolahan akhir sampah regional untuk kedua daerah dan kerjasama dalam pengembangan sektor pariwisata.

2. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, dengan Visi **Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera**, dengan Misi 1) Mengupayakan reformasi secara sungguh-sungguh untuk aparatur yang bersih dan responsif, guna

mewujudkan pelayanan prima dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti; kependudukan (akta kelahiran, KTP dan KK), kesehatan dan pendidikan, 2) Akan menjalankan amanah masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan (*transparansi*) dalam berbagai bidang, termasuk mengenai besaran anggaran yang ada dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan, anggaran masuk dan keluar, serta pemasukan-pemasukan bagi keuangan daerah dari luar APBD, yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat, 3) Memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada sektor penyumbang PDRB terbesar, yaitu pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa industri pengolahan, 4) Mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, toleran dan penuh kesejukan serta memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal, 5) Pembangunan pertanian/perkebunan dan perikanan/kelautan berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan petani dan nelayan, 6) Mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Hubungan dokumen perencanaan pembangunan antara Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan adalah pembangunan jalan Muara Labuh-Kambang sebagai salah satu jalur evakuasi dan sosial ekonomi. Seperti diketahui bahwa topografi Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh daerah pesisir yang rentan dengan isu bencana alam (tsunami). Sebagai jalur alternatif evakuasi bencana tersebut, pembukaan jalan Kambang-Muara Labuh merupakan program prioritas antara kedua kabupaten tetangga. Disamping itu, kerjasama berpeluang dilakukan untuk pengembangan hubungan adat dan budaya antara Alam Surambi Sungai Pagu dengan Pasisie Banda Sapuluah sebagai bagian dari pembangunan daerah, termasuk mendukung pembangunan sektor pendidikan dan pariwisata, dimana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki destinasi wisata nasional yaitu kawasan wisata mandeh.

3. Kabupaten Dharmasraya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, dengan Visi **Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya**, dengan Misi 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat, 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk sumber kemajuan ekonomi, ketersediaan sarana pelayanan dasar daerah secara merata, 3) Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata

secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat, 4) Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, 5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah, 6) Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi, 7) Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun.

Salah satu prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya adalah meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Solok Selatan dengan fokus pembangunan infrastruktur dasar dan sosial lainnya. Keterkaitan antara dua dokumen perencanaan ini difokuskan pada pembangunan jalan Taluak Aia Putih-Simpang PB-Madiak-Abai Siat, ruas jalan Abai-Pulau Punjung, dan ruas jalan Sungai Kunyit-Abai Siat sebagai peningkatan akses ekonomi antara kabupaten tetangga. Kerjasama untuk sektor pariwisata dan kebudayaan juga sangat terbuka melalui peningkatan hubungan adat dan budaya antara Dharmasraya dengan Rantau XII Koto, serta pengelolaan DAS Batang Hari sebagai sungai strategis nasional yang memiliki banyak permasalahan dari aspek lingkungan akibat maraknya aktivitas ilegal mining. Kedepan, DAS Batang Hari juga berpotensi dikembangkan untuk sektor pariwisata.

4. Kabupaten Sijunjung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, dengan Visi **Terwujudnya Nagari Madani Yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera**, dengan Misi 1) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera, 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kuat, cerdas dan berakhlak mulia, 3) Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata, 4) Mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani, 5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, 6) Melakukan revitalisasi adat dan budaya berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, 7) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, 8) Revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari.

Sekaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk kedua wilayah kabupaten, maka prioritas pembangunan difokuskan pada pembangunan jalan Sitapus-Sungai Penuh-Kiliran Jao. Hal ini akan meningkatkan akses perekonomian baik

bagi Kabupaten Solok Selatan maupun Kabupaten Sijunjung. Kiliran Jao memiliki posisi strategis dalam menghubungkan antara kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi Riau, dan juga dapat dijadikan jalur alternatif memperpendek jarak antara Kerinci ke Pekanbaru melalui Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung di Kiliran Jao.

5. Kabupaten Kerinci

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019, dengan **Visi Terwujudnya Kerinci Yang Lebih Baik**, dengan Misi 1) Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, serta pariwisata, 2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertakwa, 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi antar sektor, 4) Meningkatkan kualitas ekosistem yang berbasis sumber daya lokal, 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa, amanah dan bermoral.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kerinci dengan RPJMD Kabupaten Solok Selatan adalah dengan ditingkatkan jalan provinsi Sumatera Barat dari Surian-Padang Aro dan ruas jalan Padang Aro-Batas Jambi di Kerinci menjadi jalan nasional pada tahun 2015. Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci yang fokus pada pembangunan infrastruktur, maka peningkatan pembangunan ruas jalan nasional menjadi salah satu isu yang sangat prioritas untuk ditingkatkan pembangunannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan pembangunan jalan yang dimaksud. Disamping itu, peluang kerjasama pembangunan antara Kabupaten Solok Selatan cukup berpotensi dalam pengembangan sektor pariwisata dengan gunung kerinci sebagai ikon, pengembangan energi terbarukan “hydro power” dan pengembangan wilayah perbatasan sebagai sentra pertanian hortikultura dan perkebunan kopi dengan kualitas tinggi.

6. Kabupaten Bungo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor.....Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, dengan **Visi Bungo Maju dan Sejahtera**, dengan Misi 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, 2)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada pelayanan publik, 4) Pemberdayaan masyarakat melalui kearifan local dan nilai-nilai keagamaan serta penguatan otonomi desa, 5) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan dan lembaga ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur antara Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Solok Selatan adalah pembangunan jalan Simpang PB-Talao-KM 44 di Rimbo Bujang dalam rangka peningkatan akses perekonomian antara kedua kabupaten.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Daerah terdiri dari sepuluh (X) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Kondisi Umum Daerah

Berisi tentang gambaran kondisi umum daerah yaitu dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berisi tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis

Berisi tentang analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dalam pembangunan di Kabupaten Solok Selatan yang disesuaikan permasalahan pembangunan pada urusan kewenangan pemerintahan yang meliputi; 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan beserta analisis desain strategi pembangunan.

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Terdiri dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan visi dan misi Bupati Terpilih beserta tujuan dan sasarannya.

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima (5) tahun kedepan.

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Berisi tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah secara terperinci selama lima (5) tahun ke depan yang disesuaikan dalam urusan kewenangan pemerintahan yang meliputi; 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan.

BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Berisi tentang indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tiap tahun.

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Berisi tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021.

BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Berisi tentang gambaran kedudukan dan peran RPJM Daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan syarat keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Solok Selatan serta pedoman program-program transisi tahun 2016.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Solok Selatan terletak pada 01° 17' 13" - 1° 46' 45" Lintang Selatan dan 100° 53' 24" - 101° 26' 27" Bujur Timur dengan luas wilayah 3.590,15 km² dan Ibukota Kabupaten Solok Selatan berada di Padang Aro, yang berjarak ± 166 km dari Kota Padang Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat melalui jalan provinsi dalam waktu tempuh normal lebih kurang 4 jam. Akses ke kabupaten tetangga yang cukup baik hanya ke Kabupaten Solok dan Kabupaten Kerinci, namun semenjak akhir tahun 2014 akses ke Kabupaten Dharmasraya telah dapat melewati Nagari Lubuk Ulang Aling di pinggir Sungai Batang Hari, disamping melalui jalan kebun melewati Nagari Sungai Kunyit yang hanya bisa ditempuh jika cuaca baik. Akses jalan ke Kabupaten Pesisir Selatan hanya dapat dilalui melewati Kota Padang dan Kabupaten Kerinci.

Saat ini, secara administratif Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 7 Kecamatan, 39 Nagari dan 269 Jorong. Adapun nama-nama Kecamatan, yaitu: (1) Sangir; (2) Sungai Pagu, (3) Koto Parik Gadang Diateh, (4) Sangir Jujuan, (5) Sangir Batang Hari, (6) Pauh Duo, dan (7) Sangir Balai Janggo.

Tabel 2.1
Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	
		UU No.38/2003	Perda No. 8/2012
1	Sangir	632,99	632,13
2	Sungai Pagu	596,00	358,41
3	Koto Parik Gadang Diateh	524,10	672,66
4	Sangir Jujuan	278,06	278,63
5	Sangir Batang Hari	280,01	751,66
6	Pauh Duo	348,10	265,31
7	Sangir Balai Janggo	686,94	631,35
Jumlah		3.346,20	3.590,15

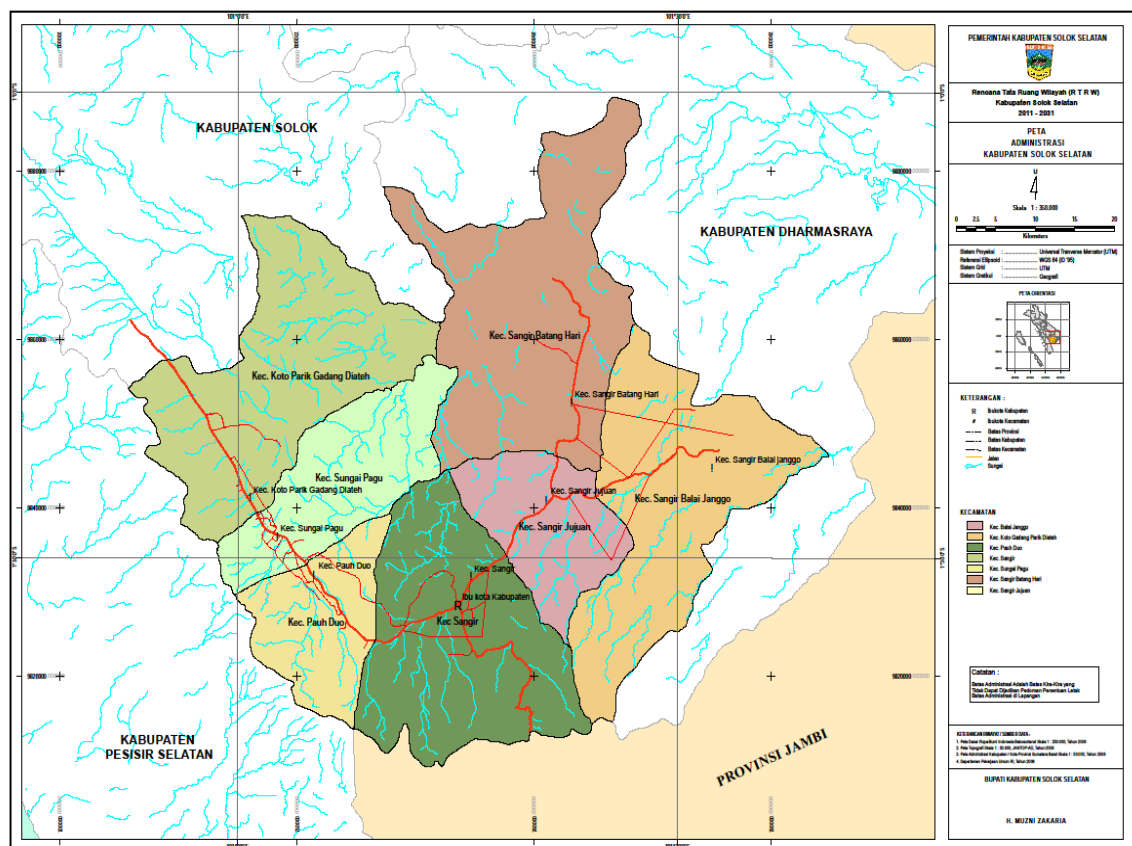
Sumber: UU Nomor 38 Tahun 2003 dan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032 (diolah)

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Solok Selatan, luas wilayah sesuai dengan Proposal Pemekaran adalah 3.346,20 KM². Pada saat penyusunan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032, berdasarkan digitasi peta Topografi AD

ditetapkan luas wilayah 3.590,15. Setahun kemudian, lahir pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan yang berimplikasi terhadap perubahan kembali luas wilayah mendekati UU Nomor 38 Tahun 2003, namun sampai sekarang belum dilakukan perubahan pada Perda tentang RTRW. Sampai saat ini BPS tetap menggunakan data luas wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah 3.346,2 KM².

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 2.1. Peta Batas-batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera.

Secara topografis 60% dari wilayah Kabupaten Solok Selatan berada pada kelereng di atas 40% yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor. Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

- (1) kawasan dataran tinggi bergelombang yang menempati wilayah bagian Timur, mulai dari Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuan ke arah Utara sampai ke wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari;
- (2) kawasan perbukitan, lebih dominan menutupi wilayah Kabupaten Solok Selatan, mulai dari bagian Utara sampai bagian tengahnya;
- (3) kawasan lembah kaki pegunungan yang menempati wilayah bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan bagian Selatan, yang merupakan kaki Gunung Kerinci.

2.1.1.3. Kondisi Klimatologis

Kabupaten Solok Selatan secara umum beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan cukup tinggi yaitu 1.600-4.000 mm/tahun. Dengan kelembaban udara berkisar 80%, Kabupaten Solok Selatan mempunyai iklim tropika basah. Pada umumnya musim penghujan berlangsung pada bulan Januari s/d Mei, September s/d Desember, sedangkan musim kemarau pada bulan Juni s/d Agustus. Angin pada umumnya bertiup dari arah Barat Daya-Tenggara.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjuhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan.

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Secara *geologis*, Kabupaten Solok Selatan berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera, yang dikenal dengan Patahan Semangka yang masih aktif sampai sekarang. Zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia ini masih aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar, akan berpotensi menimbulkan gempa bumi. Di sisi lain berdasarkan peta geologi terlihat adanya potensi sumber daya mineral. Sumber daya mineral tersebut antara lain terdiri dari (a) mineral logam berupa tembaga, emas dan perak, (b) potensi panas bumi yang ditandai oleh munculnya mata air panas dan (c) bahan galian berupa batu gamping, pasir, batu sungai dan batu akik.

Dari sisi *vulkanologis*, kabupaten ini terletak di antara dua gunung berapi yang masih aktif, yang berada di luar Kabupaten Solok Selatan yaitu Gunung Talang di Kabupaten Solok dan Gunung Kerinci di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Jika terjadi aktivitas vulkanik dan seismik kedua gunung berapi tersebut akan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat di Kabupaten Solok Selatan.

Dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Solok Selatan, terdiri atas tanah *Andosol* dan *Litosol*. Jenis tanah seperti ini memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur. Oleh karena itu daerah ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan. Berdasarkan peta kesesuaian lahan diperoleh informasi, bahwa disamping tanaman pangan, komoditas perkebunan yang lebih sesuai dengan potensi lahan adalah jenis tanaman dataran tinggi seperti teh, kakao dan kopi daripada tanaman karet dan kelapa sawit.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan. Di Kabupaten ini terdapat 18 (delapan belas) aliran sungai. Sebanyak 5 (lima) terdapat di Kecamatan Sangir, 3 (tiga) di Sungai Pagu dan 10 (sepuluh) di kecamatan lainnya, masing-masing diantaranya terdapat dua (2) sungai. Sungai-sungai besar yang mengalir pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, bersifat permanen, dan memiliki arus yang cukup deras. Dengan bentangan alamnya yang berbukit-bukit serta dilalui oleh banyak sungai seperti itu, menjadikan Kabupaten Solok Selatan rawan terhadap bahaya banjir dan longsor. Di samping itu, Kabupaten Solok Selatan merupakan hulu (daerah tangkapan-*catchment area*) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Batang Hari yang sebahagiannya adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan kawasan Hutan Lindung. Dengan demikian, Kabupaten Solok Selatan mempunyai nilai ekologis yang sangat tinggi karena merupakan salah satu dari 4

kabupaten yang termasuk daerah yang berada pada bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari yang mengalir ke Pantai Timur.

2.1.1.6. Kondisi Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2014 berdasarkan persentase yaitu 36,53% berstatus Hutan Negara 19,09% Hutan Rakyat. Sementara itu untuk kawasan budidaya berupa persawahan seluas 9.540 ha (2,85%), perkebunan seluas 45,105 ha (13,48%), untuk tegal/ladang 15.275 ha (4,56%), dan lahan yang tidak diusahakan seluas 59.068 ha (19,09%). Sementara untuk peruntukan kawasan sesuai arahan kebijakan dalam Perda RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2
Peruntukan Kawasan di Kabupaten Solok Selatan

PERUNTUKAN KAWASAN BERDASARKAN ARAHAN TATA RUANG	(Ha)	%
Hutan Lindung	84.259,65	23,47
Hutan Konservasi	66.273,25	18,46
Hutan Produksi	12.242,24	3,41
Hutan Produksi Terbatas	53.600,19	14,93
Hutan Poduksi yang Dapat Dikonversi	19.350,64	5,39
JUMLAH KAWASAN HUTAN	235.725,97	65,66
Perkebunan	95.137,65	26,50
Pertanian	14.575,81	4,06
Pertambangan	12.349,94	3,44
Permukiman	1.220,63	0,34
JUMLAH KAWASAN BUDIDAYA	123.284,03	34,34
LUAS WILAYAH	359.010,00	100,00

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032

Pola pemanfaatan lahan Kabupaten Solok Selatan diarahkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya sendiri dibagi atas kawasan budidaya kehutanan dan non kehutanan. Kawasan budidaya kehutanan diarahkan untuk mengembangkan kegiatan pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Sementara kawasan non kehutanan diarahkan untuk mengembangkan kegiatan budidaya pertanian/perkebunan, permukiman dan kegiatan budidaya lainnya. Adapun dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari kawasan hutan ke perkebunan dan permukiman.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan ditetapkan menjadi kawasan strategis. Kegiatan pembangunan pada kawasan strategis akan menjadi prioritas penanganannya karena kawasan ini mempunyai karakteristik yang spesifik khususnya dalam memacu pengembangan wilayah di Kabupaten Solok Selatan maupun untuk pertimbangan strategis lainnya. Dengan menggarap suatu kawasan strategis secara multisektor dan terintegrasi diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah sesuai karakteristiknya sehingga secara umum akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Kawasan strategis ditetapkan dalam RTRW dimaksudkan untuk:

- 1) Mengarahkan perhatian seluruh pihak terhadap perlunya pemusatan sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang ada, baik dari level Pusat hingga Daerah, maupun sumber-sumber donor lain yang memungkinkan, kekawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis, secara terintegrasi sehingga mampu memicu efek pengganda bagi perekonomian wilayah secara menyeluruh;
- 2) Memusatkan perhatian para pemangku kepentingan pembangunan daerah pada kawasan-kawasan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunannya melihat potensi dan permasalahan yang ada.

Memperhatikan Dokumen RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032, disebutkan juga bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan dimasa mendatang diarahkan pada: **“upaya optimalisasi lahan produktif bagi pengembangan wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan bagi wilayah dibawahnya”**. Hal ini sejalan dengan RTRW Nasional Tahun 2008-2028, yang menetapkan kawasan TNKS termasuk dalam pengembangan kawasan strategis nasional. Sementara itu, kawasan Abai Sangir-Taluak Aie Putih telah ditetapkan sebagai pengembangan kawasan provinsi sebagaimana tercantum dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

Selain itu, optimalisasi lahan produktif merupakan upaya ekonomisasi wilayah agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan melalui kreatifitas penyelenggaraan sumber daya buatan yang ramah lingkungan. Perlindungan TNKS dan hutan lindung sebagai upaya penjaminan kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Solok Selatan serta wilayah hilir, terkait dalam hal dukungan penyediaan sumber daya alam. Dukungan untuk pengembangan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan hanya mungkin terjadi kalau aset alam yang ada sekarang ini mendapat perlindungan sebaik mungkin.

Dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan akan dikembangkan ke dalam tiga wilayah pengembangan yang didasarkan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tersebut:

- a. Kecamatan Sangir yang berpusat di Padang Aro sebagai pusat pengembangan I dengan *growth point* pelayanan pemerintahan, pelayanan umum dan perdagangan.
- b. Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh sebagai pusat pengembangan II yang dipusatkan di Muara Labuh dengan *growth point* pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata dan sentra produksi tanaman pangan.
- c. Kecamatan Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo sebagai pusat pengembangan III dengan *growth point* sektor perkebunan.

Sekaitan dengan zonasi tersebut, maka pengembangan kawasan strategis di Wilayah Kabupaten Solok Selatan yang akan diangkat meliputi:

- 1) Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan adalah kawasan Muara Labuh-Padang Aro, kawasan agropolitan serta kawasan kerjasama regional dan perbatasan.
- 2) Kawasan strategis untuk kepentingan sosio-kultural;
Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosio-kultural di Kabupaten Solok Selatan adalah Kawasan situs Nagari Seribu Rumah Gadang di Koto Baru, Kawasan Rumah Gadang Panjang di Abai dan RPC, Monumen PDRI di Bidar Alam, Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Labuh dan daerah sekitarnya, Kawasan RTH Padang Aro dan sekitarnya, dan Kawasan Petilasan Rumah Gadang Rajo Balun dan Kawasan Petilasan Mesjid Anam Puluah Kurang Aso di Kecamatan Sungai Pagu.
- 3) Kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup.
Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah Kawasan delapan belas (18) Daerah Aliran Sungai di tujuh (7) kecamatan, Kawasan Pegunungan Kerinci di Kecamatan Sangir, Kawasan TNKS, Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Kawasan penambangan emas di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir, Kawasan Penambangan Biji Besi di Kecamatan KPGD, Kawasan ex-HPH PT. Andalas Merapi Timber (AMT), Kawasan Lahan Kritis di Ulu Suliti Kecamatan KPGD, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Nagari.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana Kabupaten Solok Selatan telah ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan budidaya ataupun lindung yang memiliki potensi resiko degradasi lingkungan dan bencana alam. Melihat kedudukan Kabupaten Solok Selatan yang berada pada suatu Sistem Patahan Besar dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana, baik gempa bumi, longsor maupun banjir. Secara kewilayahan, wilayah-wilayah kritis lingkungan di Kabupaten Solok Selatan meliputi lahan kritis, erosi, bencana tanah longsor dan banjir.

Secara garis besar pengelompokan daerah rawan bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. **Gerakan Tanah.** Gerakan tanah disebabkan oleh sesar yang ada di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Dari kedudukan wilayah Kabupaten Solok Selatan yang berada pada sistem Patahan Besar yaitu sistem Patahan Semangka, yang meliputi sebahagian besar daerah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Sungai Pagu.
2. **Gempa Bumi dan Gunung Api.** Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Walaupun sebenarnya Kabupaten Solok Selatan secara administrasi daerah tidak memiliki gunung api, tetapi sebahagian besar wilayah kaki Gunung Kerinci berada diwilayahnya, sehingga beberapa wilayah akan terkena imbas yang tidak langsung (awan panas dan lahar dingin) dari letusan dari gunung tersebut, seperti wilayah Sangir, Pauh Duo dan Sungai Pagu. Sedangkan untuk potensi bahaya gempa cukup besar hal ini mengingat pulau Sumatera secara umum berada di daerah tektonik aktif dimana lempeng Samudera Hindia bergerak ke Utara menghujam secara menyerong terhadap lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke Selatan, dengan laju pergerakan mencapai 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar maka akan menyebabkan pergeseran lempeng benua mikro (*mikro plate*) yang berada di antara Jalur Tumbukan (Palung) dan Zona Patahan Semangka. Pergerakan tersebut akan memicu pergerakan sesar/patahan yang ada di wilayah Solok Selatan dan juga dapat menyebabkan pergerakan tanah. Daerah-daerah yang akan terkena dampak langsung jika terjadi pergeseran Patahan Sumatera akibat gempa bumi meliputi daerah sepanjang Balun, Muara Labuh sampai dengan Pekonina yang berada di sekitar zona Patahan Sumatera.
3. **Longsor.** Longsor umumnya terjadi pada daerah perbukitan yang bertebing terjal dan daerah tebing sungai terutama pada daerah *cut of slope* seperti pada daerah berlereng dengan kelerengan > 15%, daerah perbukitan bergelombang, daerah perbukitan terjal

dan daerah kaki pegunungan. Daerah ini meliputi sebahagian besar wilayah Kabupaten Solok Selatan.

4. **Banjir.** Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Selain itu juga daerah cekungan-cekungan dapat juga terjadi genangan yang menyebabkan banjir. Daerah yang perlu diwaspadai (berpotensi) rawan banjir terdapat di sepanjang Sungai Batang Hari, Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Suliti, Sungai Batang Liki dan sepanjang Sungai Batang Sangir. Upaya penanganan banjir dilakukan secara terpadu dengan mengkoordinasikan kerjasama lintas wilayah administratif dan lintas sektoral yang meliputi kegiatan normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pada daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan kritis yang terletak di sekitar jalur lintas air serta koordinasi antar pihak yang terlibat.

Kebijaksanaan pengamanan kawasan lindung ditentukan sesuai dengan tujuan pemantapannya, yaitu mencegah terjadinya bencana (lahan kritis, longsor dan banjir), meningkatkan fungsi hidroorologis, dan menjaga kelestarian kawasan bawahan maupun disekitarnyasendiri. Pengendalian dan pengarahan kegiatan yang ada dan berkembang di kawasan tersebut untuk menjaga fungsi kawasan, serta pemantapan kawasan lindung. Pengurangan atau relokasi penduduk pada kawasan rawan bencana, pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung.

2.1.4. Demografi

Manusia (penduduk) merupakan salah satu modal dalam pembangunan. Daya guna dari modal tersebut ditentukan oleh berbagai kondisi yang meliputi kuantitas, kualitas dan distribusinya. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan periode 2010-2015 terus mengalami peningkatan yaitu dari 144,797 jiwa pada tahun 2010 menjadi 159,796 jiwa pada tahun 2015, dengan komposisi jenis kelamin penduduk pada tahun 2015 komposisi penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan yaitu 80.520 jiwa (50,39%) penduduk laki-laki dan 79.278 (49,61%) jiwa penduduk perempuan. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Solok Selatan menunjukkan *trend* penurunan per tahunnya. LPP pada tahun 2010 ke 2011 senilai 2,10 % dan terus mengalami penurunan hingga 1,92 % pada tahun 2013 ke 2014 dan 1,85% pada tahun 2014 ke 2015.

Jika ditinjau dari rasio jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, selama kurun waktu 2010-2015, sex ratio mengalami fluktuasi cenderung meningkat namun tidak mengalami perubahan yang cukup besar. Pada tahun 2010, sex ratio berkisar 100,83% dan terus mengalami peningkatan hingga 101,59% pada tahun 2014 dan

menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 101,57%. Rasio jenis kelamin lebih dari 100 ini menggambarkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Keadaan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk (jiwa)	144.797	147.884	150.885	153.943	156.901	159.796
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	40,33	41,19	42,03	42,89	43,70	44,51
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	8,22	2,10	2,04	2,02	1,92	1,85
Sex Ratio (%)	100,83	101,19	101,18	101,20	101,59	101,57

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan (Diolah).

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2015 berdasarkan luas wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan adalah 44,51 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (88,13 jiwa/km²), menyusul Kecamatan Sangir (64,4 jiwa/km²), Pauh Duo (56,78 jiwa/km²), Sangir Jujuan (45,44 jiwa/km²), Koto Parik Gadang Diateh (34,9 jiwa/km²), Sangir Balai Janggo (26,9 jiwa/km²), dan Kecamatan Sangir Batang Hari tercatat mempunyai kepadatan terendah (25,4 jiwa/km²).

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Penduduk			Perda No. 8/2012	Kepadatan (jiwa/km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Sangir	20,655	20,044	40,699	632.13	64.38
2	Sungai Pagu	15,337	16,250	31,587	358.41	88.13
3	Koto Parik Gadang Diateh	11,803	11,695	23,498	672.66	34.93
4	Sangir Jujuan	6,499	6,407	12,906	278.63	46.32
5	Sangir Batang Hari	9,642	9,435	19,077	751.66	25.38
6	Pauh Duo	7493	7,571	15,064	265.31	56.78
7	Sangir Balai Janggo	9,091	7,876	16,967	631.35	26.87
Jumlah		80,520	79,278	159,798	3,590.15	44.51

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan (Diolah).

Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk, Kabupaten Solok Selatan tergolong daerah yang berpenduduk tidak padat (Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu: tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km²; kurang padat antara 51-250 jiwa/Km²; cukup padat 251-400 jiwa/Km²; dan sangat padat dengan

tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km²). Jika dibandingkan dengan rata-rata Sumatera Barat lebih rendah, dimana kepadatan penduduk Sumatera Barat sebesar 121,33 jiwa/Km².

Sebaran keadaan penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut; Usia 0-4 tahun 18.218 jiwa, 5-9 tahun 17.245 jiwa, 10-14 tahun 15.991 jiwa, 15-19 tahun 13.619 jiwa, 20-24 tahun 12.628 jiwa, 25-29 tahun 14.218 jiwa, 30-34 tahun 12.743 jiwa, 35-39 tahun 11.791 jiwa. Sementara itu untuk usia 40-44 tahun sebanyak 10.119 jiwa, 45-49 tahun 8.509 jiwa, usia 50-54 tahun 7.103 jiwa, usia 55-59 tahun 5.987 jiwa. Kemudian kelompok usia 60-64 tahun sebanyak 4.594 jiwa, usia 65-69 tahun 2.686 jiwa, 70-74 tahun 2.013 jiwa serta kelompok usia 75 tahun keatas sebanyak 2.332 jiwa.

Kabupaten Solok Selatan memiliki Rasio Ketergantungan yang terus menurun selama periode 2010-2015, namun masih di atas angka Provinsi Sumatera Barat dengan selisih relatif sama setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Rasio Ketergantungan Kabupaten Solok Selatan sebesar 57,53 berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 57-58 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggungan lebih sedikit, yaitu 56 orang pada tahun yang sama.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

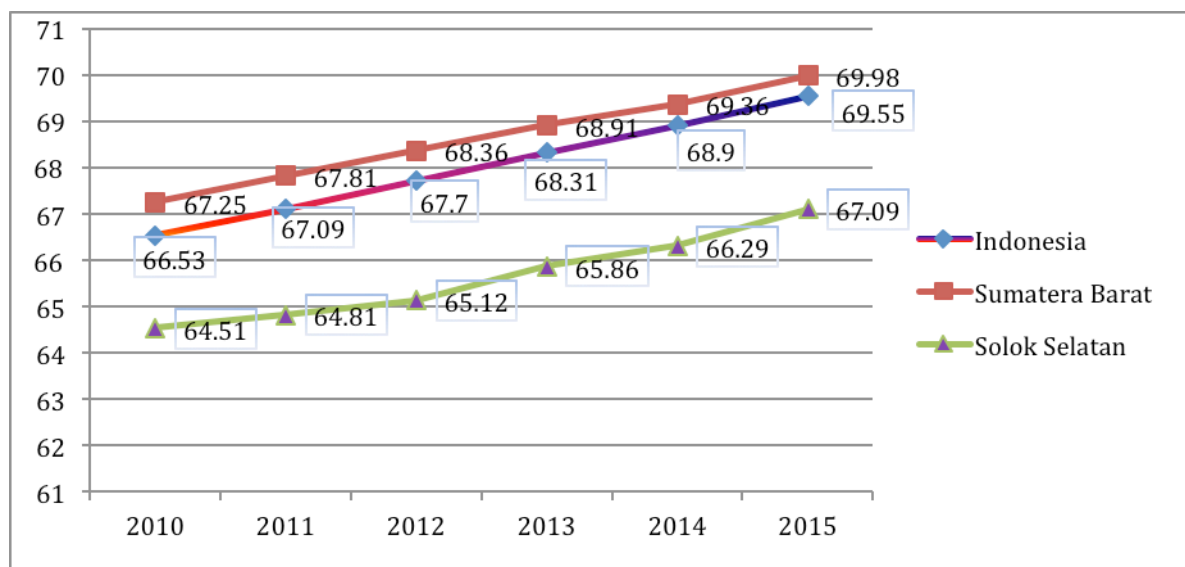
2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia kemudian muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam konsep ini, manusia dipandang sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan dan didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah. Jika dilihat dari perkembangan Indeks pembangunan Manusia selama tahun 2010-2015 dapat dilihat bahwa indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan menunjukkan trend yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu

dari 64,51 pada tahun 2010 menjadi 67,09 pada tahun 2015. Namun, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun angkanya masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 69,98 pada tahun 2015 dan rata-rata nasional yaitu 69,55. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat berada pada rangking 15 berada diatas Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.2.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



umber: BPPMD Kabupaten Solok Selatan, 2016 (Diolah)

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB dan Inflasi

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dominasi sektor-sektor pembentuk PDRB tersebut. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Setiap tahun data PDRB dikumpulkan dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dua versi yaitu harga konstan dan harga berlaku.

PDRB Kabupaten Solok Selatan atas harga berlaku dalam kurun waktu tahun 2010-2015 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp 2.465.185 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 4.224.476 juta pada tahun 2015. Sedangkan PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2010 sebesar Rp 2.465.185 juta menjadi sebesar Rp. 3.267.781 juta pada tahun 2015. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ialah berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selama periode

2010-2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan terus meningkat, namun peningkatannya berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan sebesar 5,60 persen, dan terus meningkat menjadi 6,13 persen pada tahun 2013. Meskipun pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan melambat menjadi 5,90 persen (tahun 2014) dan 5,34 persen (tahun 2015). Penurunan seiring dengan terjadinya penurunan ekonomi nasional dan provinsi.

Tabel 2.5
PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan
Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (hargaberlaku)		PDRB (harga konstan tahun)	
	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan
2010	2.465.185,1	12,53	2.465.185,1	5,60
2011	2.774.024,9	10,18	2.602.649,0	5,58
2012	3.090.219,6	9,18	2.759.897,9	6,04
2013	3.434.160,7	8,92	2.929.009,3	6,13
2014*	3.889.024,0	11,11	3.101.897,4	5,90
2015**	4.224.476,6	8,63	3.267.781,8	5,34

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015

Jika dilihat dari kontribusi PDRB per sektor dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar atas PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar Harga konstan sampai tahun tahun 2015, yaitu sebesar 34,07% dan 32,88%, Dengan kontribusi PDRB terkecil berasal dari lapangan usaha sektor listrik, gas, air yang menyumbang sebesar dan jasa jasa perusahaan sebesar untuk PDRB pada tahun 2015. Prediksi lima tahun ke depan (2020) PDRB Kabupaten Solok Selatan baik atas dasar harga berlaku dan harga konstan, masih didominasi oleh sektor pertanian, meskipun tetap mengalami pertumbuhan namun kontribusi sektor pertanian (dalam arti luas) diprediksikan semakin menurun namun masih berkisar antara 32% – 34%, Penurunan ini lebih disebabkan karena peningkatan dari sektor diluar sektor pertanian lebih cepat dari pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu sektor lain yang diprediksi meningkat kontribusinya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor konstruksi/bangunan, pertambangan dan penggalian dan sektor industri. Perkembangan sektor industri lebih diarahkan pada peningkatan industri pengolahan hasil pertanian dan pendukungnya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 2.6
Kontribusi Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku
Tahun 2010-2015

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,78	35,46	34,80	34,38	34,69	34,07
B	Pertambangan dan Penggalian	8,27	8,40	8,40	8,70	9,60	10,13
C	Industri Pengolahan	6,20	6,25	6,22	6,05	5,75	5,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	10,12	10,30	10,59	11,04	11,03	11,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,43	18,68	18,65	18,21	17,38	17,75
H	Transportasi dan Pergudangan	5,56	5,47	5,53	5,82	5,90	5,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,70	0,68	0,69	0,67	0,68	0,73
J	Informasi dan Komunikasi	4,29	4,21	4,40	4,18	4,25	3,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	0,83	0,87	0,88	0,86	0,85
L	Real Estate	0,86	0,83	0,81	0,81	0,80	0,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,89	4,88	4,93	4,94	4,74	4,35
P	Jasa Pendidikan	1,92	1,92	1,93	2,04	2,04	2,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,02	1,10	1,12	1,11	1,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,03	1,00	1,01	1,08	1,08	1,09
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPPMD dan BPS Kabupaten Solok Selatan 2015

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Berdasarkan dari kecenderungan perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Solok Selatan, jika dilihat dari kelompok sektor (sektor primer, sekunder, dan tersier) maka dominasi kelompok sektor primer mulai bergeser ke arah kelompok sektor sekunder dan tersier. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dari sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, konstruksi pada PDRB harga berlaku. Walaupun demikian karakternya masih dipengaruhi perekonomian primer (*agriculture/pertanian*). Kondisi ini sejalan dengan komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Solok Selatan yang masih dominannya untuk kegiatan pertanian dan perkebunan (primer).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara umum dapat diketahui dari pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 2010-2015 bersifat fluktuatif dan ada kecenderungan negatif, yaitu berturut-turut sebesar 4,81% (tahun 2010);

5,58% (tahun 2011); 6,04% (tahun 2012); 6,13% (tahun 2013); 5,90% (tahun 2014); 5,35% (tahun 2015), Hal ini dipengaruhi situasi politik nasional dan daerah yang masih belum kondusif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat yaitu 5.85%. Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5.10%, Kabupaten Solok Selatan masih lebih tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan lima tahun ke depan (2015) diprediksikan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan sebagai salah satu daerah pemekaran, masih banyak sumberdaya yang belum dikelola dengan optimal.

Tabel 2.7
Kontribusi Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan
Tahun 2010-2015

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.78	35.21	34.50	33.62	33.34	32.88
B	Pertambangan dan Penggalian	8.27	8.24	8.19	8.16	8.12	8.29
C	Industri Pengolahan	6.20	6.22	6.34	6.31	6.12	6.01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.05	0.52	0.05
F	Konstruksi	10.12	10.37	10.60	11.08	11.23	11.49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.43	18.50	18.61	18.73	18.57	18.68
H	Transportasi dan Pergudangan	5.56	5.67	5.80	5.97	6.04	6.19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.70	0.71	0.71	0.69	0.70	0.70
J	Informasi dan Komunikasi	4.29	4.29	4.55	4.87	4.98	5.26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.83	0.85	0.88	0.88	0.87	0.86
L	Real Estate	0.86	0.85	0.85	0.84	0.82	0.82
M,N	Jasa Perusahaan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.89	4.96	4.80	4.63	4.51	4.50
P	Jasa Pendidikan	1.92	1.96	1.96	1.98	1.98	2.03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.02	1.04	1.09	1.10	1.12	1.12
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.03	1.04	1.04	1.04	1.06	1.07
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPPMD dan BPS Kabupaten Solok Selatan 2015

*) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Sedangkan untuk tingkat inflasi di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi, dan cenderung mengalami penurunan. Meskipun dari tahun 2010-2013 terus mengalami penurunan dari 6,6 % menjadi 4,71% pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 6,93%. Dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3,11%. Jika dikaitkan dengan tingkat infalsi daerah dapat dilihat posisi pertumbuhan

ekonomi terbaik berada pada tahun 2013 yaitu di kala pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan relative meningkat cukup tinggi yang diikuti oleh penurunan dari tingkat inflasi.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor PDRB Atas Harga Konstan dan Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2010-2015

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,88	3,91	3,91	3,42	5,51	3,42
B	Pertambangan dan Penggalian	3,47	5,17	5,46	5,76	5,85	7,03
C	Industri Pengolahan	5,78	5,95	8,05	5,70	3,17	2,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,85	4,18	3,41	4,74	6,92	5,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,76	5,90	2,58	6,69	6,63	3,99
F	Konstruksi	6,73	8,20	8,35	10,96	7,87	7,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,15	5,98	6,67	6,83	5,48	5,49
H	Transportasi dan Pergudangan	12,22	7,57	8,49	9,30	7,63	7,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,91	6,99	6,34	2,48	7,82	5,39
J	Informasi dan Komunikasi	5,24	5,57	12,41	13,53	8,74	10,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,25	7,80	9,27	6,55	5,31	3,77
L	Real Estate	5,26	4,50	5,41	4,96	3,58	5,90
M,N	Jasa Perusahaan	5,37	8,25	6,40	5,05	6,94	5,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	7,00	2,64	2,35	3,62	4,71
P	Jasa Pendidikan	5,12	7,40	6,28	7,16	6,33	7,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,36	7,50	10,58	7,51	7,91	5,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,68	6,70	6,10	6,85	7,47	6,46
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,81	5,58	6,04	6,13	5,90	5,35
	Tingkat Inflasi	6,60	6,58	5,05	4,71	6,93	3,11

Sumber: BPPMD dan BPS Kabupaten Solok Selatan 2015

*) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

2.2.1.3. Pemerataan Pendapatan Diukur Dengan Indeks Gini dan Versi World Bank

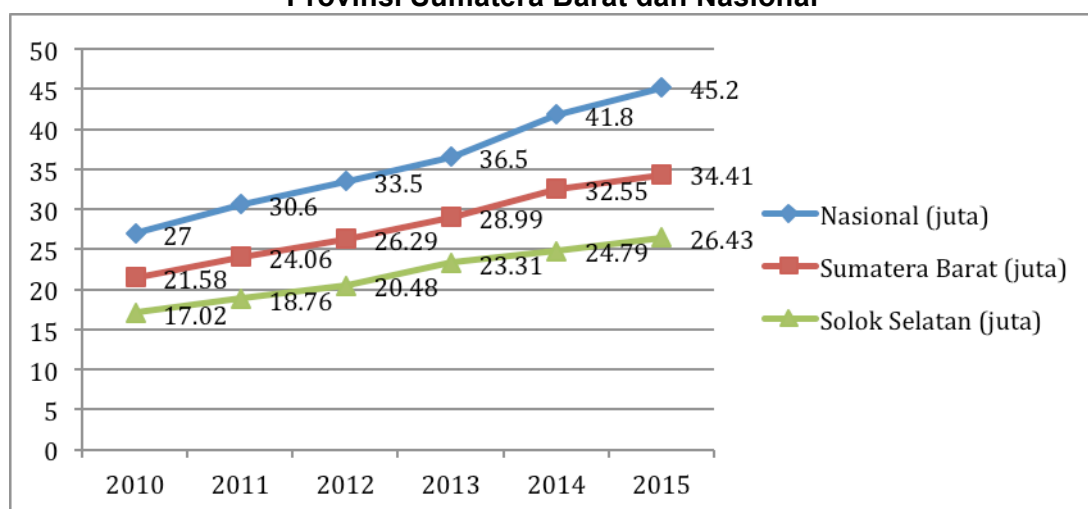
Koefisien indeks gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Hal ini berarti

semakin besar indeks gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan social. Berdasarkan data BPS, indeks gini Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 kecenderungan terjadinya kenaikan sampai tahun 2015 yaitu berturut-turut; 0,292 (tahun 2011); 0,308 (tahun 2012); 0,317 (tahun 2013); 0,292 (tahun 2014) dan 0,384 (tahun 2015). Peningkatan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan kurang merata namun masih kategori ketimpangan sedang karena indeknya masih berada diatas 0,3 dan dibawah 0,5 ($0.3 \leq G \leq 0.5$).

2.2.1.4. PDRB per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Solok Selatan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.3.
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: BPPMD Kabupaten Solok Selatan, 2016 (Diolah)

Pada tahun 2010 pendapatan per kapita Kabupaten Solok Selatan masih mencapai angka sebesar Rp 17,02 Juta, tahun 2015 sudah menjadi Rp 26,43 Juta atau naik sebesar 8,18% tiap tahun. Sedangkan perkembangan pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 yaitu Rp. 21,58 Juta dan pada tahun 2015 sudah menjadi Rp. 34,41 Juta atau naik sebesar 8,82%.

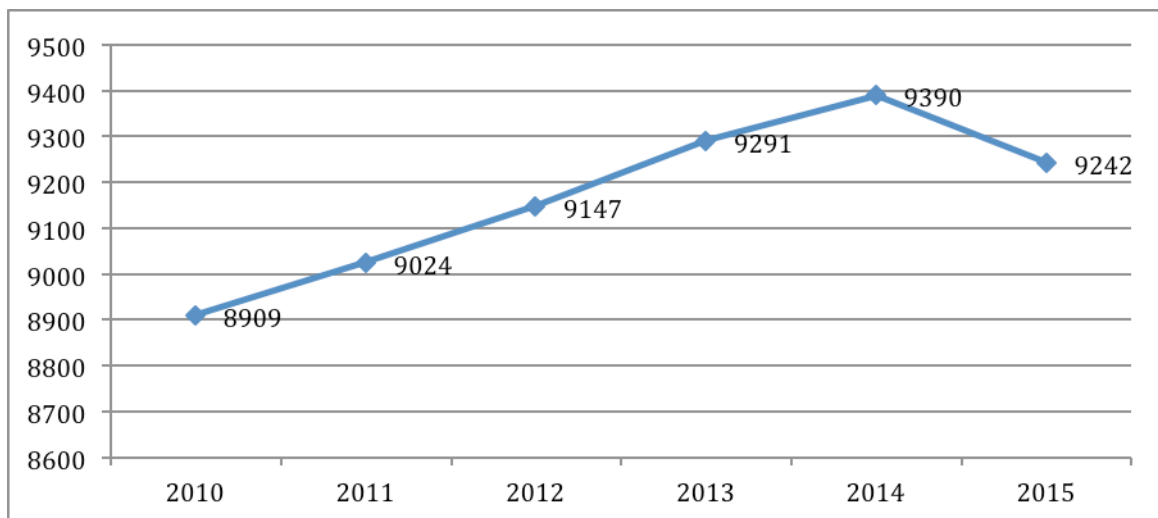
Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Sumatera Barat sama-sama meningkat sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir. Namun, dibandingkan dengan Sumatera Barat, PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan selalu lebih rendah dengan

selisih yang semakin melebar, dengan tingkat pertumbuhan juga lebih rendah. Pada tahun 2010, selisih keduanya sekitar 5.3 juta rupiah, kemudian terus bertambah hingga menjadi 8,98 juta rupiah pada tahun 2015.

2.2.1.5. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita menggambarkan berapa rata-rata pengeluaran penduduk dalam pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan berupa makanan maupun non makanan. Jika dilihat dari pertumbuhannya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2010-2015 dapat dilihat terjadi peningkatan yaitu dari Rp. 8.909.000,- menjadi Rp.9.390.000.- Namun pada tahun 2015 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Solok Selatan menjadi Rp 9.242.000.

Gambar 2.4.
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Penduduk Kabupaten Solok Selatan



Sumber: BPPMD Kabupaten Solok Selatan, 2016 (Diolah)

Penurunan ini merupakan dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi, terutama harga komoditi sektor pertanian sehingga berdampak kepada penurunan PDRB per kapita penduduk dan akhirnya berpengaruh kepada besaran pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Solok Selatan.

2.2.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyaknya pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin, maka banyak definisi tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah “kekurangan” dalam “kesejahteraan”. Di lain pihak Badan Pusat Statistik (BPS) secara lebih spesifik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita

selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonominya tinggi, serta diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin ini bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang menghitungnya, serta kriteria yang ditetapkan. Rincian Indikator kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Kemiskinan (%)	11,11	10,61	9,38	8,12	7,33	7,52
Jumlah Penduduk Miskin (000 Orang)	16,10	15,52	14,00	12,60	11,56	11,9
Indeks Kedalam Kemiskinan (P1)	1,33	1,39	1,24	1,21	0,71	0,75
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,29	0,31	0,24	0,26	0,15	0,15
Garis Kemiskinan (Rp)	195.997	220.308	235.018	252.018	268.902	365.827

Sumber BPS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

Setelah tercatat cukup tinggi pada tahun 2007 yaitu 17,43% sebagai dampak negatif dari pemberantasan illegal logging, angka kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan terus mengalami penurunan menjadi 11,10% tahun 2010 hingga 7,36 % pada tahun 2015. Meskipun mengalami penurunan namun penurunannya cenderung mengalami perlambatan yaitu dari 0,50 pada tahun 2011 menjadi 0,02% pada tahun 2015. Penurunan ini juga diikuti oleh penurunan dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). dari 1,33% dan 0,29% pada tahun 2010 menjadi 0,71% dan 0,15% pada tahun 2014. Meskipun indeks keparahan kemiskinan (P2) terus mengalami penurunan menjadi 0.15% pada tahun 2015, namun Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan kembali pada tahun 2015 menjadi 0.75%. Peningkatan Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) berarti semakin menurunnya kesejahteraan penduduk miskin atau kata lain besaran rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan Kemiskinan (P2) penurunan ini menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk sangat miskin dan penduduk miskin dengan hampir miskin semakin mengecil. Namun jika dilihat dari pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2010-2014 terus mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2015 meskipun mengalami penurunan tingkat

kemiskinan 0,02% namun dari segi jumlah peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 40 Orang.

2.2.1.7. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Jumlah kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 108 kasus pada tahun 2010 menjadi 301 kasus 2015. Kasus-kasus yang terjadi diantaranya pembunuhan, aniaya berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, pencurian biasa, narkoba, penipuan perjudian, pencurian kayu, perkosaan dan lain- lain. Jika dilihat penyelesaian kasus pada tahun 2010-2015, sampai tahun 2015 terjadi fluktuasi persentase kasus yang terselesaikan (cenderung mengalami penurunan) yaitu dari 76,85% tahun 2010 menjadi 26,23% pada tahun 2015. Penurunan ini diiringi dengan meningkatnya jumlah kasus kriminalitas yang ditangani oleh pihak keamanan. Secara rinci terlihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang Terselesaikan
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus	108	426	92	580	539	301
Kasus yang Terselesaikan	83	188	51	326	304	88
Persentase Kasus yang Terselesaikan	76,85	44,13	55,43	56,20	56,40	29,23

Sumber BPS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

2.2.2.1. Aspek Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2015.

1. Angka Melek Huruf (AMH)

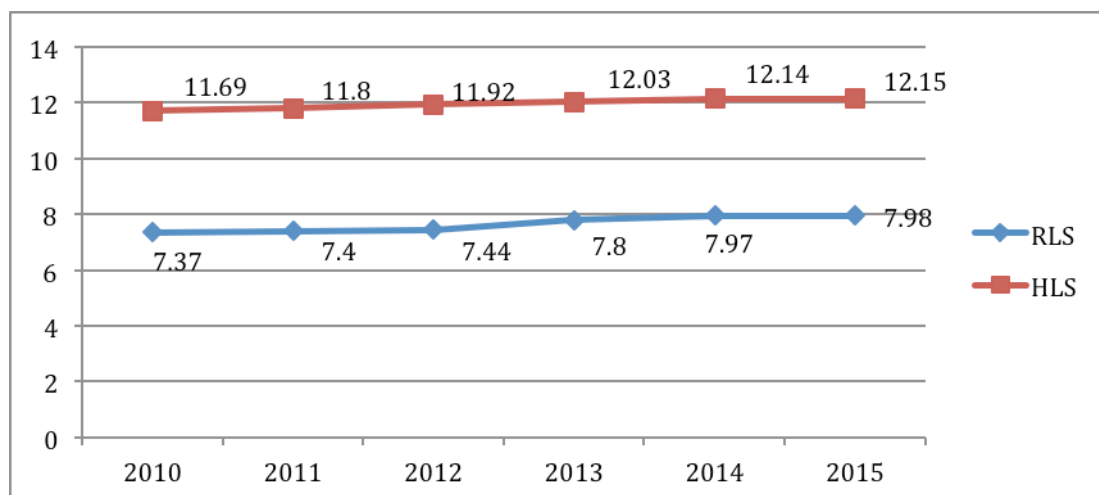
Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2010-2015, capaian angka melek huruf di Kabupaten Solok Selatan cukup mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 AMH sebesar 97,53%, tahun 2011 sebesar 97,6%, tahun 2012 sebesar 97,63%, tahun 2013 sebesar 97,72%, tahun 2014 sebesar 97.80%, dan terus mengalami peningkatan pada

tahun 2015** sebesar 98.87%. Ini berarti upaya pemberantasan buta huruf baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal berdampak positif bagi pengurangan penderita buta huruf di Kabupaten Solok Selatan, namun meskipun demikian angka tersebut menunjukkan bahwa masih tersisa sebesar 1,23% penderita buta huruf. Atas keberhasilan ini Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendapatkan penghargaan Penuntasan Buta Aksara Tingkat Pratama dari Presiden RI.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain angka melek huruf, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) juga mempengaruhi nilai IPM. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 7,37 tahun pada tahun 2010 menjadi 7,98 tahun pada tahun 2015.

Gambar 2.5.
Perkembangan RLS dan HLS Penduduk Kabupaten Solok Selatan



Sumber: BPPMD Kabupaten Solok Selatan, 2016 (Diolah)

Pada tahun 2015, RLS Kabupaten Solok Selatan sebesar 7,98 yang berarti rata-rata pendidikan yang ditamatkan setara kelas 2 SMP. Lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia diatas 40 tahun dan relatif banyaknya penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi cenderung mencari pekerjaan diluar Kabupaten Solok Selatan.

Jika disandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau lamanya sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun keatas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah dimasa mendatang. Data menunjukkan adanya peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu dari 11,69 tahun pada tahun 2010 menjadi 12,15 tahun pada tahun 2015. Ini berarti rata rata harapan lama sekolah penduduk yang akan masuk sekolah (usia 7 tahun) dapat bersekolah sampai tingkat SMA-D1. Peningkatan ini terutama

disebabkan oleh perubahan kebijakan pendidikan dari pendidikan dasar sembilan tahun menjadi pendidikan universal (12 tahun).

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut (usia sekolah).

Tabel 2.11
Perkembangan APK Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI/Paket A (%)	114,75	105,23	108,23	108,22	114,13	112,54
2	SMP/MTs/Paket B (%)	82,05	84,04	86,95	90,48	94,43	108,94
3	SMA/SMK/MA/Paket C (%)	65,91	55,35	67,23	70,81	74,91	94,30

Sumber: Ikhtisar Data Perencanaan Pembangunan Kab. Solok Selatan 2010-2015

Tabel 2.12
Perkembangan APM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI/Paket A (%)	96,53	93,37	95,64	98,23	98,23	97,43
2	SMP/MTs/Paket B (%)	69,71	61,73	73,45	78,78	78,78	80,62
3	SMA/SMK/MA/Paket C (%)	51,30	47,59	55,58	65,40	65,40	70,02

Sumber: Ikhtisar Data Perencanaan Pembangunan Kab. Solok Selatan 2010-2015

Jika dilihat dari perkembangan APK dan APM di berbagai tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa cenderung berfluktuasi namun mengalami peningkatan kecuali untuk APK SD/MI/Paket A. Penurunan ini lebih disebabkan karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penerimaan murid sekolah SD/MI/Paket minimal usia 7 Tahun. Perkembangan APK dan APM di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 menunjukkan terjadinya trend peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terdapat pada Tabel 2.11 dan Tabel 2.12.

4. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Selama periode 2011-2015, perkembangan APT diberbagai tingkat pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2015 untuk tingkat SD/MI/Paket A sebanyak 17,5% menjadi 32,5%, Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B sebanyak 15,0% menjadi 19,8%, Untuk Tingkat SMA 2,5% menjadi

17,8%. Jika dilihat dari angka pendidikan yang ditamatkan maka dapat dilihat bahwa sampai tahun 2015 sebahagian besar (52,3%) penduduk Kabupaten Solok Selatan baru tamat pendidikan dasar (SD dan SMP).

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015**
1	SD/MI/Paket A (%)	17,5	20,7	29,0	32,5	32,5	32,5
2	SMP/MTs/Paket B (%)	15,0	14,7	15,6	19,8	19,8	19,8
3	SMA/SMK/MA/Paket C (%)	2,5	9,2	11,2	17,8	17,8	17,8

Sumber: Dinas Pendidikan dan LKPJ AMJ Kabupaten Solok Selatan

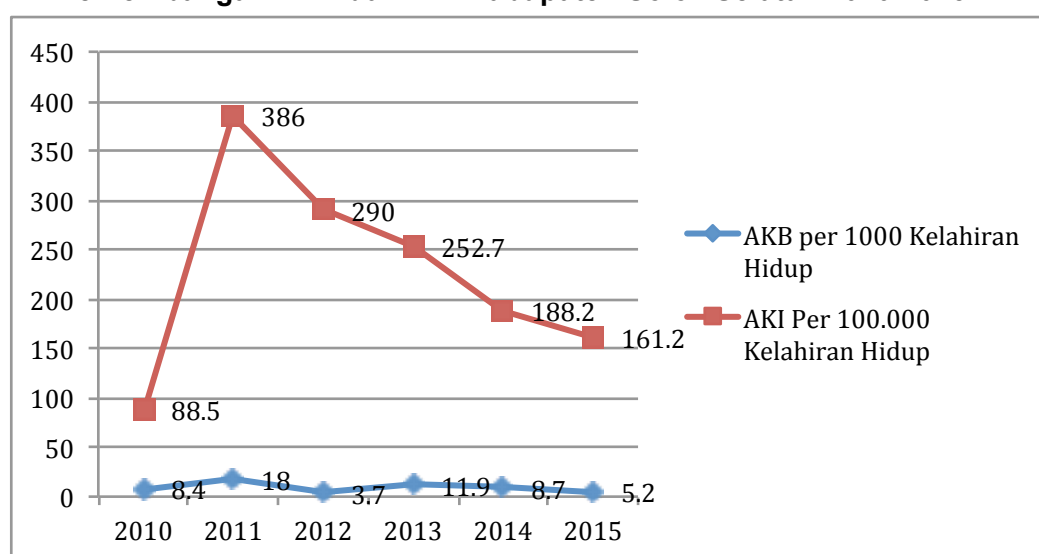
2.2.2.2. Aspek Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja Kabupaten Solok Selatan dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 Tahun tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Ibu adalah angka yang menunjukan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Gambar 2.6
Perkembangan AKB dan AKI Kabupaten Solok Selatan 2010-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan 2010-2015

Dari Gambar 2.6 dapat dilihat, meskipun pada tahun 2011 indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan namun dari sejak tahun 2012 terus mengalami penurunan hingga menjadi 5,2 per 1000 Kelahiran Hidup untuk Angka Kematian Bayi dan 161,2 per 100.000 Kelahiran Hidup untuk Angka Kematian Ibu pada tahun 2015. Penurunan ini lebih disebabkan karena meningkatnya keberadaan Bidan Desa di setiap Jorong sehingga meningkatnya ibu hamil memeriksakan kehamilan dan peningkatan penolong kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

2. Angka Harapan Hidup

Aspek kesehatan masyarakat direpresentasikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Pada periode tahun 2010-2015, AHH Kabupaten Solok Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun dari 65,93 tahun (2010), 65,96 tahun (2011), 65,99 tahun (2012), 66,02 tahun (2013), 66,04 tahun (2014), menjadi 66,64 tahun pada tahun 2015, atau naik sebesar 1,71 dari tahun 2010.

3. Balita Gizi Buruk

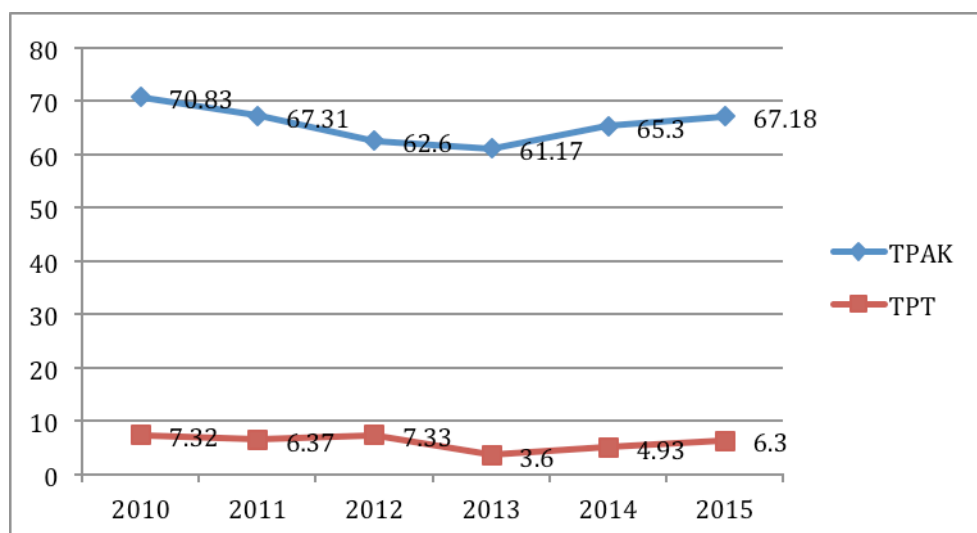
Perkembangan Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2010-2015 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan sudah berada di bawah target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%). Tahun 2010 balita dengan gizi buruk sebesar 0,1%, 0,3% (2011), 0,17% (2012), 0,08% (2013), 0,05% (2014) dan terus mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,04% dari jumlah seluruh balita.

2.2.2.3. Aspek Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dari dua indikator pokok yaitu Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan persentase angkatan kerja yang telah bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Dilihat dari perkembangan TPAK Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 (70,83%) hingga 2013 (61,17%). Penurunan TPAK ini cenderung lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia kerja namun bukan merupakan angkatan kerja seperti penduduk yang sedang sekolah atau melanjutkan pendidikan, dan mengurus rumah tangga bagi perempuan. Pada periode 2013-2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 67,18%. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk yang berada pada usia kerja yang

selama tahun 2013-2015 yang awalnya lebih memilih melanjutkan sekolah telah menamatkan pendidikan. Gambar 2.7 memperlihatkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2010-2015.

Gambar 2.7
Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015



Sumber: BPPMD Kabupaten Solok Selatan, 2016 (Diolah)

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. TPT bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya (contoh: kriminalitas).

Dilihat dari perkembangan TPT Kabupaten Solok Selatan periode 2010-2015 cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Awalnya, pada tahun 2010, TPT bernilai 7,32% kemudian sedikit meningkat dua tahun berikutnya. Setelah itu, turun cukup signifikan menjadi 3,60% tahun 2013, meskipun akhirnya kembali naik menjadi 6,3% tahun 2015. Peningkatan dari TPT ini sebagai akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2013 dari 6,13 % tahun menjadi 5,35 % tahun 2015, sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat dari pertumbuhan angkatan kerja.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan nasional bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

A. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kabupaten Solok Selatan selama ini telah dikenal dengan Ikon Seribu Rumah Gadang. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan cenderung meningkat di kalangan masyarakat. Pembangunan nilai-nilai sosial dan budaya yang merupakan jati diri yang khusus dan spesifik yang berada di Kabupaten Solok Selatan dengan spirit Sarantau Sasurambi lebih diarahkan kepada pembinaan, pemeliharaan cagar budaya, pelestarian seni budaya tradisional dan pelaksanaan festival Sarantau Sasurambi, sehingga nilai-nilai sosial dan budaya yang berada di Kabupaten Solok Selatan akan tetap terpelihara kelestariannya.

Tabel 2.14
Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Jumlah Grup Kesenian	76
2	Jumlah Gedung Kesenian	-

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Solok Selatan (2016)

Berdasarkan Tabel 2.14 dapat diketahui bahwa kondisi untuk potensi seni budaya di Kabupaten Solok Selatan saat ini terdapat sebanyak 76 grup kesenian yang terdiri dari sangar tari, randai, silat, rabab gandang serunai, saluang, kuda lumping, kuda kepang, wayang kulit, rabana, batombe dan musik modern (band), namun belum tersedia gedung kesenian sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya.

B. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan jumlah gedung olahraga selama periode 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Perkembangan Prasarana Olah Raga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Klub Olahraga	80	90	125	125	125	125
2	Jumlah Gedung Olahraga	3	4	8	8	8	8

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Solok Selatan (2016)

Berdasarkan data pada Tabel 2.15 terlihat bahwa jumlah klub olahraga dan gedung olah raga selama lima tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yaitu terdiri dari 125 klub olah raga dan 8 unit gedung olahraga. Jika diukur dalam bentuk rasio, tentu terjadi penurunan nilai rasio dari tahun ke tahun karena bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah klub olah raga dan gedung olah raga di Kabupaten Solok Selatan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Solok Selatan telah mengalami kemajuan bertahap dibidang pendidikan selama periode 2010-2015, berikut ini diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan Kabupaten Solok Selatan:

1. Pada level pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2010-2015 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 40,28%, tahun 2011 42,99%, tahun 2012 41,87%, tahun 2013 44,91%, tahun 2014 64,26% dan tahun 2015 64,26%. Hal ini relevan dengan meningkatnya perhatian orang tua dalam menyiapkan pendidikan anaknya sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI yang mendorong banyak berdiri lembaga PAUD formal maupun nonformal.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Kabupaten Solok Selatan cukup tinggi dan melebihi dari 100 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Ini tergambar pada tahun 2010 APK SD/MI/Paket A senilai 114,74 yang kemudian turun menjadi 105,23 pada tahun 2011. Namun pada tahun-tahun berikutnya naik hingga 114,13 pada tahun 2014. Tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 112,54%. APK SD lebih tinggi dibanding dengan APK SMP/MTs, Paket B dan SMA/MA/Paket C. Berbeda dengan APK SD, APK SMP menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Mulai dari 82,05% pada tahun 2010, lalu secara bertahap terus bertambah hingga menjadi 108,94% pada tahun 2015. Sementara itu, APK SMA juga berfluktuasi yaitu turun dari 65,91% ke 55,35% periode 2010-2011, dan terus naik sampai level 94,20% pada tahun 2015.
3. Perkembangan APM SD, SMP dan SMA mengalami kenaikan sampai tahun 2015 Untuk

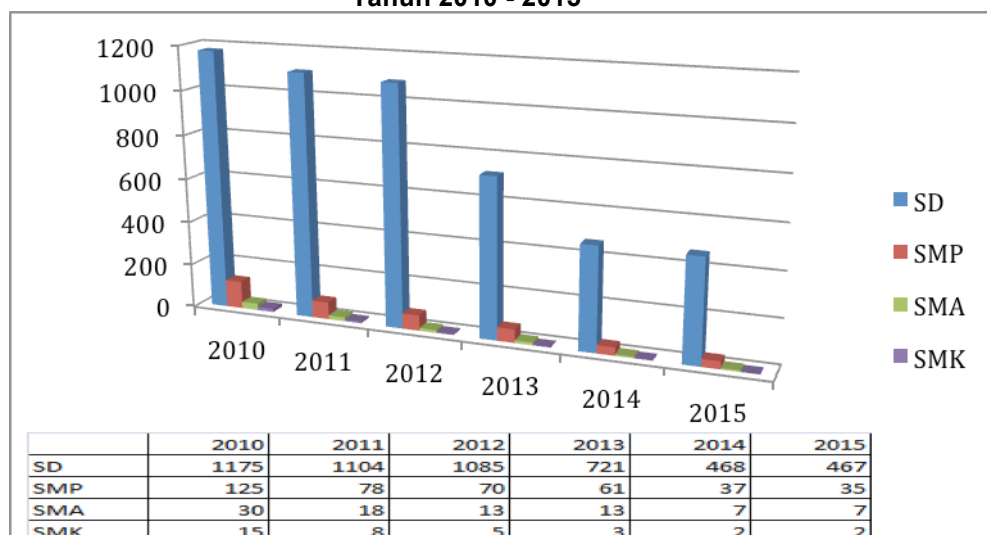
APM SD/MI/Paket A yang pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 96,53% menjadi 93,37%, lalu naik terus hingga tahun 2015 menjadi 97,43%. Namun pada APM SMP terus mengalami peningkatan yang positif yaitu dari 69,71% pada tahun 2010 menjadi 80,62% pada tahun 2015. Sedangkan untuk APM SMA/MA/Paket C, setelah mengalami penurunan pada tahun 2011 dari 51,30 menjadi 47,59, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi 70,62%.

4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Solok Selatan sepanjang periode 2010–2015 cenderung meningkat. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2010 sebesar 92,75 dan terus meningkat secara bertahap hingga 99,88 pada tahun 2015. Sementara APS penduduk usia 13-15 tahun juga memiliki pola yang sama dengan APS usia 7-12 Tahun, yaitu cenderung meningkat secara signifikan dari 92,21 pada tahun 2010 menjadi 99,84 pada Tahun 2015. Sedangkan APS penduduk usia 16-18 tahun juga mengalami peningkatan yaitu dari 62,44 tahun 2010 menjadi 82,79 pada tahun 2015.
5. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI dalam rentang waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan. Jika pada tahun 2010 APS SD/MI berada di posisi 0%, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,39%. Namun angka Putus Sekolah SMP/MTs mengalami penurunan yang berarti selama periode 2010-2015. Jika pada tahun 2010, tingkat APS SMP/MTs Kabupaten Solok Selatan ada di tingkat 0,82%, maka pada tahun 2015 mengalami penurunan hanya menjadi 0,18%. Sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Kabupaten Solok Selatan juga mengalami trend peningkatan, pada tahun 2010, tingkat APS SMA/SMK/MA ada di tingkat 0,91%, maka pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 3,17%.
6. Terkait dengan angka kelulusan (AL), pada periode 2010-2015 terdapat peningkatan di berbagai jenjang pendidikan, untuk jenjang pendidikan SD/MI meskipun terjadi penurunan pada tahun 2011 dari 97,78% tahun 2010 menjadi 96,10%. Namun dari tahun 2012-2015 Angka Kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI terus mencapai angka 100%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada periode 2010-2015 juga mengalami hal sama yaitu setelah mengalami penurunan pada tahun 2011 dari angka 100% tahun 2010 menjadi 96,53% pada tahun 2011, angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs terus mengalami peningkatan yaitu 98,04% pada tahun 2012, 98,99% pada tahun 2013, 99,96% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mencapai angka 100%. Peningkatan angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada periode tahun 2010-2015 mempunyai peningkatan kinerja yang

relative lebih baik yaitu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 angka kelulusan murid SMA/SMK/MA baru sebesar 79,7% dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 97,10%, tahun 2012 sebesar 99,28% tahun 2013 sebesar 98,87%, tahun 2014 sebesar 99,10% dan pada tahun 2015 menjadi 100%

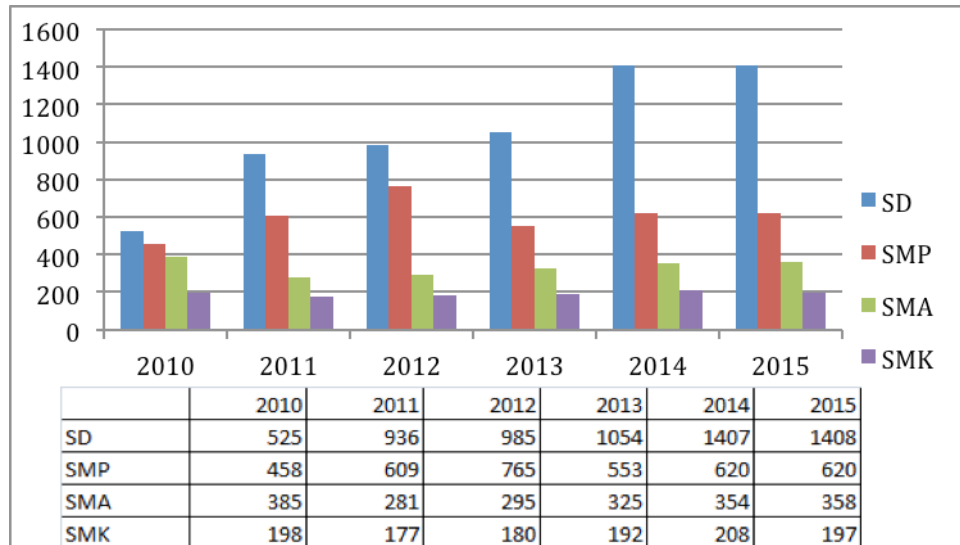
7. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2010-2015 mengalami kenaikan yaitu dari 95,02% menjadi 96,03%. Sementara Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA selama periode 2010-2015 mengalami kenaikan sebesar 0,65% yaitu dari 93,96% pada tahun 2010 menjadi 94,61% pada tahun 2015.
8. Berdasarkan Gambar 2.8, dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan menurunnya jumlah guru yang berpendidikan di bawah S1. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dan tuntutan peningkatan kompetensi guru sehingga diberikan izin belajar/tugas belajar guru pada beberapa perguruan tinggi di dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2010, guru yang berpendidikan dibawah S1 sebesar 1.175 orang untuk jenjang SD, 125 untuk jenjang SMP dan untuk jenjang SMA sebanyak 30 orang dan guru SMK yang berijazah dibawah S1 sebanyak 15 orang, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 yaitu 467 untuk Guru SD, 35 Orang untuk guru SMP, 7 orang untuk guru SMA dan 2 orang untuk guru SMK.

Gambar 2.8.
Jumlah Guru Kab Solok Selatan yang Berijazah di Bawah S 1
Tahun 2010 - 2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan (2016)

Gambar 2.9:
Jumlah Guru Kabupaten Solok Selatan yang Berijazah S1 Keatas
Tahun 2011 - 2015



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan (2016)

10. Pada Gambar 2.9 memperlihatkan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah guru yang berpendidikan di atas S1, terutama ditingkat SD, SMA dan SMK, sedangkan ditingkat SMP relatif tetap. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya guru-guru yang mengikuti pendidikan lanjutan baik atas biaya sendiri (izin belajar) maupun dibiayai oleh negara melalui tugas belajar. Pada tahun 2010, jumlah guru SD yang berijazah S1 keatas 525 orang, tingkat SMP 458 orang, tingkat SMA 385 orang dan tingkat SMK berjumlah 198 orang, dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu guru SD yang berijazah S1 keatas 1408 orang, tingkat SMP 620 orang, SMA 358 orang dan tingkat SMK berjumlah 197 orang. Sedangkan untuk guru SMA dan SMK angkanya berfluktuasi seiring dengan adanya perpindahan guru antar daerah dari/ke Kabupaten Solok Selatan.
11. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk guru agar tercapai kualitas pembelajaran. Selama kurun waktu tahun 2010-2015, rasio ketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Solok Selatan cenderung menurun namun masih ideal karena terjadi peningkatan dari 60,45 menjadi 61,00 (1 guru : 16 siswa). Sejalan dengan itu rasio guru dan murid SMP/MTS serta Rasio guru dan murid SMK/MA/SMK juga mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu rasio guru dan murid SMP/MTS pada tahun 2010 sebesar 51,62 menjadi 58,40 (1 guru : 17 siswa) tahun 2015 dan Rasio guru dan murid SMK/MA/SMK dari tingkat 60,25 pada tahun 2010 meningkat menjadi 81,20 tahun 2015 (1:12).

12. Bangunan sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar, karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama kurun waktu 2010-2015, persentase bangunan sekolah SD/MI dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 50,75% tahun 2010, menjadi 75,52% pada tahun 2015, sementara untuk sekolah SMP/MTs, bangunan sekolah dalam kondisi baik pada tahun 2010 sebesar 65,2%, dan pada tahun 2015 sebesar 80,25%. Bangunan sekolah SMA/SMK/MA dalam kondisi baik pada tahun 2010 sebesar 45,28% dan mengalami peningkatan 76,95 % pada tahun 2015.

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Sumber daya manusia yang sehat merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran kinerja pelayanan urusan kesehatan Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah posyandu mandiri pada tahun 2010 sebanyak 1,75 %, dan pada tahun 2011 naik menjadi 6,10%. Kemudian menurun menjadi 4,47% pada tahun 2012 dan naik menjadi 6,02% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu menjadi 60,07% posyandu. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75–100 balita. Cakupan yang mengalami peningkatan ini disebabkan oleh adanya tindakan yang proaktif dari petugas kesehatan yang membina posyandu mandiri. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu.
2. Rasio jumlah Puskesmas untuk per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan adalah 1 per 19.975 penduduk atau jumlah Puskesmas sebanyak 8 unit yang tersebar di 7 Kecamatan yang disesuaikan dengan sebaran penduduk berdasarkan kecamatan kecuali untuk kecamatan Sangir Balai Janggo yang memiliki 2 Puskesmas yaitu Talunan dan Mercu. Dilihat dari capaian indikator rasio Puskesmas per satuan penduduk masih dalam target yang diharapkan (1 per 30.000 penduduk). Pada tahun 2015 sedang di bangun satu Puskesmas baru yaitu di daerah Lubuk Ulang Aling karena daerah ini berada di sepanjang aliran Sungai Batang Hari yang merupakan daerah sulit atau kriteria daerah terpencil di Kabupaten Solok Selatan. Jika ditinjau dari rasio Puskesmas per satuan penduduk masih besar cakupan Puskesmas untuk melayani penduduk di wilayah kerjanya, namun demikian jika ditinjau dari sebaran penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Solok Selatan yang tidak merata dan secara dominan merupakan daerah perbukitan sehingga dalam memenuhi pelayanan kesehatan pada masyarakat diupayakan dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau secara kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk di Kabupaten Solok Selatan

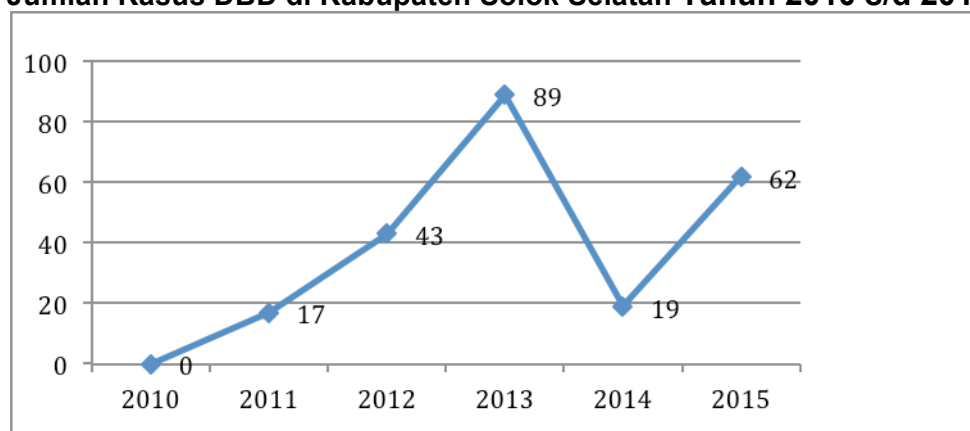
pada tahun 2015 sebanyak 159.796 jiwa dengan luas wilayah 3346.2 km² dan mempunyai kepadatan penduduk 47.75 km², maka rasio jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1 : 19.975 penduduk. Jika dibandingkan dengan rasio puskesmas dengan jumlah penduduk idealnya 1 : 30.000 penduduk, ini berarti bahwa rasio puskesmas di Kabupaten Solok Selatan jauh lebih besar atau dengan capaian kinerja sebesar 150,20 %, dengan demikian bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah kerja puskesmas itu sendiri dan ini diharapkan akan berdampak pada pemberian kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat.

3. Untuk capaian rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis (perawat, bidan) per 100.000 penduduk secara umum hampir terpenuhi yang tersebar di seluruh Puskesmas, Pustu dan Poskesdes. Untuk rasio dokter umum sebanyak 10,02 per 100.000 penduduk (target 20 orang per 100.000 penduduk). Sementara itu untuk rasio tenaga perawat dalam hal ini perawat capaiannya sebesar 47,5 orang per 100.000 (target 47,5 orang per 100.000 penduduk) dan rasio bidan sebanyak 43,8 orang per 100.000 penduduk (target 43,8 orang per penduduk). Akan tetapi jumlah tenaga medis tetap (dokter spesialis) pada RSUD Solok Selatan untuk tipe rumah sakit Kelas C masih kurang yaitu hanya 3 orang untuk pelayanan spesialis dasar pada tahun 2015, yang seharusnya berjumlah 8 orang, jumlah tenaga anestesi hanya 1 orang yang seharusnya berjumlah 4 orang, jumlah tenaga kesehatan lingkungan hanya 2 orang dan belum adanya tenaga epidemiologi.
4. Salah satu indikator kesehatan yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum adalah persentase penolong kelahiran balita oleh tenaga medis. Definisinya adalah persentase balita (usia 0-59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh tenaga kesehatan/medis, yaitu dokter, bidan, mantri kesehatan, dan tenaga paramedis lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga non-medis antara lain dukun bayi, paraji, famili dan sendiri. Persentase penolong kelahiran balita oleh tenaga medis di Kabupaten Solok Selatan cenderung meningkat sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2015. Pada tahun 2010, persentasenya sebesar 65,75 persen, kemudian naik ke 62,3 persen pada tahun 2011, dan kembali meningkat cukup signifikan tahun berikutnya menjadi 66,5 persen. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan ke level 75,43 persen. Peningkatan persentase penolong kelahiran balita oleh tenaga medis di Kabupaten Solok Selatan kembali terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 76,47 persen, dan menjadi 97,31% pada tahun 2015.
5. Perkembangan cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Solok Selama periode 2010-2015 telah mencapai 100%. Tahun 2015 cakupan Desa/Kelurahan UCI telah mencapai 92,19%. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal*

Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Dari 269 jorong yang ada di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 248 jorong telah sesuai dengan UCI yaitu tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan) terutama imunisasi yang menjadi indikator UCI. Keberhasilan dalam peningkatan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari peran aktif dari tenaga kesehatan dan kader posyandu dilapangan serta lintas sektor terkait, meskipun Kabupaten Solok Selatan memiliki wilayah atau daerah yang sulit dijangkau tetap melakukan koordinasi dalam melakukan kegiatan kesehatan ibu dan anak, imunisasi dan penyuluhan disetiap posyandu serta melakukan sweeping/kunjungan ke rumah-rumah penduduk yang tidak dapat datang membawa anak bayinya ke posyandu. Selama 6 tahun terakhir selalu ada balita yang mengalami gizi buruk, dan pada tahun 2010 dilakukan perawatan gizi buruk sebesar 18 kasus, meskipun pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 44 kasus namun tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi 10 kasus. Sedangkan pada tahun 2015 turun kembali menjadi 8 kasus.

8. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Solok Selatan mengalami naik turun (fluktuatif) dari tahun 2010 s/d 2015, angka cakupan tersebut adalah 0 per 100.000 penduduk pada tahun 2010, dan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 38,79 per 100.000 penduduk pada tahun 2015. Berdasarkan Gambar 2.13 dapat dilihat fluktuasi jumlah kasus DBD mengalami naik turun selama 6 tahun terakhir hal ini disebabkan karena kondisi cuaca yang berubah-ubah yang mengakibatkan habitat nyamuk senang berkembang biak saat terjadinya musim pancaroba (perubahan cuaca), termasuk masih kurangnya kualitas kesehatan lingkungan.

Gambar 2.10
Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 s/d 2015

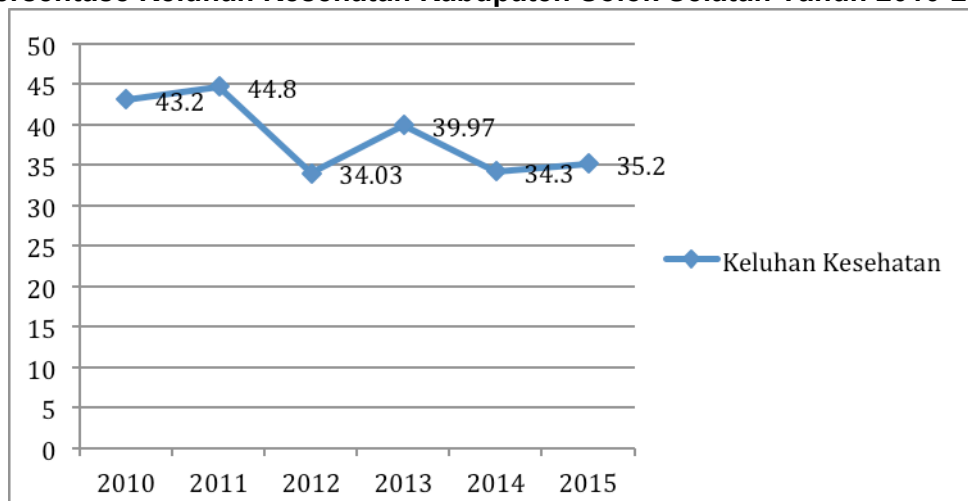


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan (2016)

9. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk

karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada satu bulan terakhir yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Persentase keluhan kesehatan yang dialami penduduk Kabupaten Solok Selatan periode 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 2.11. Pergerakan presentase yang ditampilkan cukup fluktuatif antar tahun. Mulai dari tahun 2010 dengan nilai 43,2% yang kemudian sedikit meningkat ke 44,8% pada tahun berikutnya. Pada tahun 2012, *progress* yang terjadi cukup menggembirakan, persentase keluhan kesehatan Kabupaten Solok Selatan menitik tajam ke level 34,03%. Lalu, kembali menanjak hingga 39,97%. Setelah itu, kembali menurun hingga menjadi 34,30% pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan menjadi 35,2%.

Gambar 2.11
Persentase Keluhan Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan (2016)

10. Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan kunjungan bayi tahun 2010 sebesar 80,96%, tahun 2011 sebesar 86,02%, tahun 2012 sebesar 94,46%, tahun 2013 sebesar 95,50%, tahun 2014 sebesar 95,56% dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 92,50%
11. Untuk cakupan puskesmas di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2011-2015 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu Kecamatan ada yang lebih dari 1 puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2014 mencapai 114,29%. Begitu juga untuk cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2011-2015 juga sudah di atas 100%. Cakupan puskesmas pembantu di tahun 2015 mencapai 110,25%.

12. Selama periode 2010-2015 pelayanan RSUD Kabupaten Solok Selatan belum optimal disebabkan standar pelayanan RSUD belum terakreditasi, hal ini terlihat pada capaian BOR yang masih rendah yaitu pada tahun 2010 31,2%, tahun 2011 40,3%, tahun 2012 40,9%, tahun 2013 42,7%, tahun 2014 44,7% dan tahun 2015 46,7%. Capaian ini relatif cukup rendah dari yang seharusnya yaitu mencapai 80 %.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Berikut ini digambarkan kinerja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Solok Selatan 2010-2015:

1. Sekalipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (aspal kondisi baik) di Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan orang dan barang. Tahun 2010 kondisi baik 13,03%, tahun 2011 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 13,91%, Tahun 2012 16,10, tahun 2013 23%, tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 24,57%, tahun 2015 20,10%. Ini berarti lebih 75% dari panjang jaringan jalan di Kabupaten Solok Selatan dalam kondisi rusak (ringan, sedang atau berat). Dari table 2.16 dapat dilihat kondisi jalan lokal di Kabupaten Solok Selatan dari 1.980,58 km jalan kabupaten baru sekitar 9,53 % yang aspal hotmik, 2,92% beton, 12,55% Burda/Burtu/Lapen, dan 20,13% sirtu/kerikil, selebihnya masih berupa jalan tanah.

Tabel 2.16
Perkembangan Kondisi Jalan Lokal Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Tahun Anggaran	Panjang Total (Km)	Type Perkerasan						
			Aspal (AC)	Burda	Sirtu / Kerikil	Burtu	Tanah	Beton	Lapen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2010	1.599,66	78,53	209,65	378,34	75,21	805,90	20,72	31,31
2	2011	1.633,71	88,53	198,08	310,50	33,10	972,50	24,00	7,00
3	2012	1.701,16	104,48	218,88	353,77	27,95	957,08	28,00	11,00
4	2013	1.830,62	152,53	207,92	384,96	40,75	994,14	38,80	11,00
5	2014	1.952,23	183,36	207,92	424,17	50,28	1.026,57	48,91	11,00
6	2015	1.980,58	188,91	190,91	398,96	48,60	997,89	58,24	9,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan (2016)

Dari data pada Tabel 2.17 terlihat bahwa telah terjadi penambahan panjang jalan sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 sepanjang 384,33 Km. Tahun 2015, dari 2.233,23 kilometer jalan di Kabupaten Solok Selatan, sekitar 79,91% atau sepanjang 1784,45 kilometer dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor:

248/KPTS/M/2015 tanggal 20 April 2015 terjadi perubahan status ruas jalan provinsi Lubuk Selasih-Surian, Surian-Padang Aro, Padang Aro-Batas Jambi (Kerinci) dan Batas Jambi (Kerinci)-Tapan menjadi jalan nasional. Ruas jalan Surian-Padang Aro sepanjang 65,22 km dan ruas Padang Aro-Batas Jambi (Kerinci) sepanjang 34 km berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.17
Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Tahun 2010-2015

No.	Jenis Jalan	Tahun (Km)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jalan Nasional	-	-	-	-	-	99,22
2.	Jalan Propinsi	135,25	348,25	348,25	250,16	250,16	153,44
3.	Jalan Kabupaten	1.599,66	1.633,71	1.701,16	1.830,62	1.952,23	1.980,58
	Total	1.947,91	1.981,96	2.049,41	2.080,78	2.202,39	2233,24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan (2016)

2. Panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 (empat) sepanjang periode 2010–2015 di Kabupaten Solok Selatan mengalami perkembangan cukup baik, terlihat pada tahun 2011 sepanjang 1.947,91 km, meningkat menjadi 2.233,24 km pada tahun 2015. Sementara itu panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik juga mengalami perbaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2010 panjang jalan kabupaten yang berkondisi baik sepanjang 253,87 Km dan meningkat menjadi 491,72 Km pada tahun 2015.
3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah, meskipun mengalami perkembangan pada setiap tahunnya, ini terlihat pada tahun 2011 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air pada tingkat 0,61% kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,80%. Namun kondisi ini belum signifikan untuk kondisi jalan yang kondusif bagi masyarakat terutama bagi pejalan kaki, dan pencegahan banjir atau genangan air pada badan jalan.
4. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya di Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2010-2015 jumlah areal irigasi yang telah dibangun mengalami peningkatan pada tahun 2010 luas irigasi teknis 6.521 Ha dan irigasi non teknis 2.749 Ha meningkat sampai tahun 2015 yaitu luas areal irigasi teknis 6.791 Ha dan irigasi non teknis 2.749 Ha untuk irigasi non teknis.

Selanjutnya gambaran kinerja pelayanan sub urusan penataan ruang Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2012 ditetapkan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dan di tahun 2014 telah tersusun dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kota Padang Aro, dan Kajian Pengembangan Kawasan Kandis yang merupakan dokumen turunan dari RTRW Kabupaten.

2. Pada tahun 2014 Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Ekowisata Teluk Air Putih. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pada tahun 2015 telah disusunnya dokumen rencana/desain Eks Pasar Lama Muara Labuh yang merupakan salah satu kawasan strategis cepat tumbuh.
4. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas tata ruang dan lingkungan di Kabupaten Solok Selatan juga tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola di Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2015 masih sekitar 0,0010% dari luas wilayah, terdiri dari taman kota di Pasar Muaralabuh, keadaan ini memang kelihatan sangat rendah, namun bila dilihat dari kondisi daerah Kabupaten Solok Selatan yang memiliki kawasan hutan $\pm 60\%$, secara garis besar ruang terbuka hijau di Kabupaten Solok Selatan telah lebih dari 30%. Pada tahun 2015, juga telah dimulai pembangunan RTH Padang Aro. Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Solok Selatan juga telah disusun oleh Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015, bersamaan dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.
5. Selama tahun 2013-2015 telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan Keputusan Bupati Solok Selatan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Sekretariatnya berada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah yang melaksanakan urusan tata ruang.

1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Berikut ini diuraikan hasil kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015:

1. Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi layak di Kabupaten Solok Selatan mengalami perkembangan selama periode 2010–2015. Tahun 2010, rumah tinggal bersanitasi layak baru sekitar 19,18% dari total rumah tinggal yang ada. Kemudian di tahun 2015 capaiannya sudah mencapai 27,45%. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) Pembuangan tinja (3) Pembuangan air limbah (4) Pembuangan sampah. Walaupun terjadi peningkatan kinerja, namun hal ini menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Kabupaten Solok Selatan masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan.
2. Dalam hal penggunaan listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN

selama periode 2011-2015 di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik berjumlah 91,02%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 93,57%, peningkatan ini juga diiringi oleh peningkatan pemenuhan daya listrik yang bersumber dari PLN yaitu dari 60,02% pada tahun 2011 menjadi 62,31 pada tahun 2012, 64,02 tahun 2013, 67,68% tahun 2014 dan 68,57% pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan rumah tangga yang telah mempunyai akses listrik di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2015 dengan rasio elektrifikasi PLN masih terdapat 25% rumah di Kabupaten Solok Selatan yang menggunakan listrik yang bersumber dari non PLN baik yaitu bersumber dari PLTMH, Gengset (baik Ganset perusahaan dan Gengset milik pribadi) dan sekitar 6,63% rumah tangga yang belum mendapat layanan listrik.

3. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air minum layak di Kabupaten Solok Selatan cukup meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2011 rumah tangga pengguna air minum layak sudah mencapai 37,69%, dan terus meningkat di tahun 2015 menjadi 54,73%. Akses air minum layak bagi masyarakat Kabupaten Solok Selatan hingga kini masih belum dapat memenuhi standar kelayakan secara sepenuhnya karena akses pada permukiman dan perubahan fisik lingkungan. Pelaksanaan Program PAMSIMAS yang telah dimulai tahun 2008 dan tetap berlanjut sampai dengan tahun 2015 memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan cakupan rumah tangga pengguna air minum di Kabupaten Solok Selatan. Jumlah rumah tangga pelanggan PDAM tahun 2015 sebanyak 8.821 sambungan rumah (rumah tangga) melayani 37.678 jiwa atau 23,58% dari jumlah penduduk. Khusus untuk layanan PAMSIMAS sebanyak 99 lokasi yang dikelola BP-SPAM. Sementara cakupan layanan PDAM sampai dengan akhir tahun 2015 dengan 9.197 sambungan rumah (rumah tangga) melayani 39.548 jiwa atau 24,75 % dari jumlah penduduk.

Tabel 2.18
Perkembangan Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak dan Akses Rumah Berlistrik di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Akses Air Minum Layak (%)	37,77	37,69	39,39	40,54	42,11	54,73
Akses Sanitasi Layak (%)	19,18	19,21	19,23	21,46	21,67	27,45
Akses Rumah Berlistrik (%)	91,02	92,59	92,58	93,12	93,37	93,57

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (2016)

4. Dilihat dari perkembangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2011-2015 terdapat penurunan dari 1.911 unit rumah pada tahun 2011 menjadi 1800 unit rumah pada tahun 2015. Penurunan ini seiring dengan komitmen pemerintah

daerah untuk menurunkan angka kemiskinan daerah melalui pengurangan biaya hidup penduduk miskin yang salah satu programnya adalah bedah rumah bagi penduduk miskin.

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Gambaran kinerja pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Kesbangpol Linmas, Barisan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Rasio	11,089	12,418	12,328	11,888	11,408	9,295
2.	Jumlah Linmas	Unit	na	na	na	na	na	na
3.	Persentase Jorong Memiliki Pos Kamling	%	na	na	na	na	na	24
4.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	%	49	50	83	90	100	80
5.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	%	1	1	1	1	1	0,014
6.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten	Kali	n.a	n.a	n.a	n.a	13	15
7.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	64	64	64	71	71	71
8.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	77	77	86	80	74	88

Sumber: Kantor Kesbangpol Linmas, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Solok Selatan (2016)

Data pada Tabel 2.19 menunjukkan beberapa indikator kinerja aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mengalami peningkatan selama periode tahun 2010-2015 yaitu jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah dari 49 kegiatan tahun 2010 meningkat menjadi 100 kegiatan tahun 2015, persentase cakupan layanan bencana kebakaran dari 64% tahun 2010 meningkat menjadi 71% tahun 2015, kemudian pencapaian tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dari 77% pada tahun 2010 meningkat menjadi 88% pada tahun 2015. Peningkatan ini merupakan dampak dari peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP dan Barisan Pemadam Kebakaran serta peningkatan kompetensi personil dalam melaksanakan tugas setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan.

Kemudian indikator kinerja aspek ketertiban umum yang mengalami penurunan dan tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu menurunnya rasio jumlah polisi pamong (PNS) praja per 1.000 Jumlah penduduk, kemudian terbatasnya jumlah patroli Satpol PP, masih rendahnya tingkat penyelesaian kasus K3 ditingkat kabupaten dan belum terdatanya secara akurat jumlah personil Linmas dan Poskamling di tingkat Nagari dan Jorong.

Selanjutnya dapat pula digambarkan kinerja pelayanan sub urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2010-2015 seperti terdapat pada Tabel 2.20 dan Tabel 2.21.

Tabel 2.20
Perkembangan Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kali	-	-	-	-	-	-
2.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kali	-	-	-	1	-	1

Sumber: Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Solok Selatan (2016)

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
dan Pembinaan Politik Daerah di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010–2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyuluhan wasbang						
	a) Pelaksanaan (kali)	-	1	1	1	1	1
	b) Peserta (orang)	-	70	70	70	70	70
2	FKUB						
	a) Pelaksanaan (kali)	4	4	4	4	4	4
	b) Peserta (orang)	19	19	21	21	21	23
3	Sosialisasi P4GN						
	a) Pelaksanaan (kali)	3	3	7	1	1	1
	b) Peserta (orang)	350	350	350	200	150	100
4	Pendidikan Politik bagi warga Negara			-			
	a) Pelaksanaan (kali)	-	-	-	1	-	1
	b) Peserta (orang)	-	-	-	36	-	39
5	Pembinaan Politik Daerah						
	a) Jumlah Parpol	38	38	38	38	12	12
	b) Parpol yang mendapat bantuan	12	12	12	12	11	11
	c) Jumlah LSM/Ormas	11	14	20	17	17	26
6	Bakorpullahdasila/Kominda						
	a) Anggota KOMINDA (orang)	20	20	20	25	25	25
	b) Pelaksanaan Rapat (kali)	12	12	4	3	4	4
	c) Opservasi Lapangan (kali)	1	1	1	-	-	-

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten. Solok Selatan (2016)

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 telah dilaksanakan pembinaan administrasi bagi Pengurus Partai Politik. Secara khusus kegiatan pembinaan kepada LSM, sedangkan untuk Ormas dan OKP belum dilaksanakan akan tetapi pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP secara tidak langsung sudah dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan wasbang, FKUB, Sosialisasi P4GN. Dalam

pembinaan politik daerah di Kabupaten Solok Selatan, selama periode 2012-2014 tiap tahunnya terdapat 1 kegiatan pembinaan, yaitu berupa pelatihan dan pembinaan administrasi bagi Pengurus Partai Politik

2.3.1.6. Urusan Sosial

Gambaran kinerja pelayanan urusan sosial Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.22:

Tabel 2.22
Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015

No	Jenis Masalah	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Gelandangan	orang	0	0	0	0	0	0
2	Pengemis	orang	0	0	0	0	0	0
3	Wanita Tuna Susila	orang	0	0	0	0	0	0
4	Bekas Narapidana	orang	0	0	0	0	0	267
5	Anak jalanan	orang	14	0	0	0	0	n.a
6	Anak nakal korban Narkotika	orang	0	0	0	0	0	1
7	Penyandang cacat	orang	682	970	970	600	619	211
8	Fakir miskin	KK	94	8.709	8.709	447	6.253	19.025
9	Lanjut usia terlantar	orang	902	902	902	1.385	1.472	100
10	Lansia yang menjadi korban tindak kekerasan	orang	0	0	0	0	0	0
11	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	1.911	1.911	1.911	903	939	1.800
12	Anak terlantar	orang	0	348	348	102	114	44
13	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah	orang	0	0	0	0	0	1
14	Anak nakal	orang	0	0	0	0	0	1
15	Balita terlantar	orang	295	0	0	0	0	0
16	Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis	orang	0	1	1	0	0	0
17	Keluarga bermasalah sosial psikologis	orang	0	0	0	0	0	n.a
18	Wanita rawan sosial ekonomi	orang	0	917	917	1.105	1.319	1.319
19	Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan	Rasio	0	0	0	0	0	0,097
20	Korban akibat bencana alam & musibah lainnya	orang	0	81	81	0	0	356
21	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	orang	0	2	2	0	0	0
22	Eksodan	orang	0	0	0	0	0	0
23	Komunitas adat terpencil	orang	64	16	16	0	0	0
24	Pekerja migran	orang	0	0	0	0	0	0
25	Penderita HIV/AIDS	orang	0	0	0	0	0	2

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan (2016)

Berdasarkan data pada Tabel 2.22, untuk kondisi pada tahun 2015, terlihat bahwa masalah kesejahteraan sosial secara berurutan yaitu fakir miskin (19.095 orang), keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni (1.800 KK), wanita rawan sosial ekonomi (1.319 orang),

korban akibat bencana alam dan musibah lainnya (356 orang), bekas narapidana (267 orang), penyandang cacat (211 orang), lanjut usia terlantar (100 orang) dan anak terlantar (44 orang). Disamping itu, data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang harus menjadi perhatian meskipun masih dalam angka relatif kecil yaitu masalah penderita HIV/AIDS, anak nakal korban narkoba dan anak yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan salah.

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan hingga tahun 2015 berjumlah 2 unit. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya pemberian bantuan, pendampingan serta pemberian pekerjaan agar menjadi produktif.

2.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Gambaran kinerja pelayanan urusan ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2010-2015 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan semakin menurun bagian dari penduduk usia kerja Kabupaten Solok Selatan yang terlibat dalam kegiatan produktif. Jika pada tahun 2010 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,83%, tahun 2011 (67,31%), tahun 2012 (62,60%), 2013 (61,17%), 2014 (65,30%) dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 67,18%.
2. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Solok Selatan dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,32%, tahun 2011 sebesar 6,37%, tahun 2012 sebesar 7,33%, tahun 2013 sebesar 3,60%, tahun 2014 sebesar 4,93% pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 6,30%. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian Kabupaten Solok Selatan, menjadi faktor pendorong (*driving forces*) dalam penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, terutama pada sektor-sektor primer dan industri pengolahan.

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran kinerja pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya

dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Solok Selatan masih rendah. Jika pada tahun 2010 tingkat partisipasi berada di posisi 37,46%, tahun 2011 turun menjadi 37,09%, tahun 2012 turun lagi menjadi 31,24%, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 36,33%, kemudian tahun 2014 meningkat lagi menjadi 36,62%, terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 37,47%, melebihi 0,01% dari tahun 2010. Pola penurunan dan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan ketersediaan lapangan kerja baru dan tingginya kecenderungan wanita melanjutkan pendidikan terutama pada pendidikan tinggi keguruan selama tahun 2010-2015.

2. Tingkat pertumbuhan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2015 sebesar 2,72 % bila dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 0,815%. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh himbuan Pemerintah Pusat untuk senantiasa melibatkan peran perempuan dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di setiap kegiatan publik. Data 2010 (44,40%), 2011 (44,65%), 2012 (44,41%), 2013 (44,88%), 2014 (47,02%), 2015 (47,46%). Namun demikian, di lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan saat ini untuk periode 2014-2019 tidak satupun (0%) anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini berbeda dengan dua periode sebelumnya dimana sebanyak 4 (empat) orang (16%) untuk periode 2004-2009, kemudian 1 (satu) orang (4,0%) untuk periode 2009-2014. Artinya tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan meningkat pada jajaran eksekutif dan menurun pada jajaran legislatif.
3. Penanganan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2010-2015 meningkat sangat signifikan, hal ini terlihat pada tahun 2010 penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan berada pada tingkat 50,0%, meningkat tajam pada tahun 2015 yaitu berada pada tingkat 100%. Hal ini berarti bahwa kasus pengaduan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan terselesaikan seluruhnya. Pemerintah Daerah telah berupaya menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penambahan kader penanganan terpadu.

2.3.2.3 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Indikator yang digunakan

untuk mengukur kinerja urusan pangan adalah ada atau tidaknya peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan lain sebagainya, kemudian ketersediaan pangan utama yang dihitung dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun. Kondisi kinerja urusan pangan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.23 yang memperlihatkan bahwa masih kurangnya jumlah regulasi pangan, dimana selama periode ini belum ada produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pangan, dan hanya disusun sebanyak satu Peraturan Bupati tentang pangan.

Sementara data menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan bahan pangan utama dan bahan pangan hewani mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Oleh karena itu, dimasa datang kelembagaan dan personil aparatur yang melaksanakan urusan pangan perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya, apalagi saat ini kedaulatan pangan menjadi isu dan prioritas nasional.

Tabel 2.23
Perkembangan Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Regulasi Ketahanan Pangan, dalam bentuk:							
	• Peraturan Daerah	Dokumen		-	-	-	-	-
	• Peraturan Bupati	Dokumen		-	1	-	-	-
	• Keputusan Bupati	Dokumen		-	-	-	-	-
	• Lain-lain	Dokumen		-	-	-	-	-
2.	Ketersediaan Pangan Utama, berupa:							
	• Padi	ton	147.261	127.894	135.648	121.939	124.501	131.437
	• Jagung		2.176	4.529	31.486	19.551	8.739	54.074
	• Kacang Hijau		52	102	88	66	34	0
	• Kacang Tanah		351	892	1.036	809	468	1.025
	• Kedelai		54	111	223	117	83	59
	• Ubi Jalar		910	1.815	5.546	3.080	2.976	2.650
	• Ubi Kayu		1.474	2.367	5.608	4.241	4.016	4.522
	Pangan Hewani							
	• Daging	ton	4,02	3,149	3,773	4,489	5,264	3,123
	• Telur		1,60	1,601	1,940	1,617	1,670	1,164
	• Susu		-	-	-	-	-	-
	• Ikan		3,35	5,116	4,386	3,781	3,085	3,029

Sumber: KPKP Kabupaten Solok Selatan, Diolah (2016)

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Gambaran kinerja pelayanan urusan pertanahan Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 dapat dilihat dari perkembangan jumlah tanah bersertifikat seperti pada Tabel. 2.24.

Tabel 2.24
Jumlah Tanah Bersertifikat yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Tanah Bersertifikat	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Hak Milik	bidang	n.a	1.974	1.173	1.527	1.032	1.889
2	Hak Guna Bangunan	bidang	n.a	0	1	18	8	21
3	Hak Guna Usaha	bidang	n.a	0	0	0	0	0
4	Hak Pakai	bidang	n.a	9	3	3	10	12
5	Girik	bidang	n.a	0	0	0	0	0
	Jumlah tanah yang bersertifikat	bidang	n.a	1.983	1.177	1.548	1.050	1.922

Sumber: BPN Kabupaten Solok Selatan (2016)

Berdasarkan data pada Tabel 2.24, terlihat bahwa selama tahun 2010-2015 jumlah sertifikat yang dikeluarkan berfluktuasi dan trennya menurun, dimana jumlah sertifikat yang paling banyak dikeluarkan justru pada tahun 2011 yaitu 1.974 bidang, kemudian menurun menjadi 1.173 bidang pada tahun 2012, naik kembali menjadi 1.527 bidang pada tahun 2013 dan turun kembali menjadi 1.032 bidang tahun 2014 dan naik kembali menjadi 1.889 bidang pada 2015. Fluktuasi jumlah sertifikat yang dikeluarkan dipengaruhi oleh jumlah kegiatan sertifikat prona yang dibiayai oleh pemerintah pusat, sementara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum memiliki kegiatan khusus untuk mendorong percepatan jumlah tanah yang bersertifikat. Seiring dengan banyaknya kasus-kasus dan sengketa pertanahan, maka untuk lima tahun kedepan, sangat diperlukan peningkatan jumlah kegiatan untuk memfasilitasi pensertifikatan tanah yang didanai melalui APBD berbentuk program replikasi sertifikat prona di daerah. Secara teoritis, kepemilikan sertifikat tanah tidak hanya terkait dengan aspek kepastian hukum, akan tetapi juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi, karena bagi dunia usaha terutama pelaku UMKM, kepemilikan sertifikat dapat dijadikan anggunan untuk mendapatkan kredit permodalan usaha dari perbankan.

Dilihat dari jenis sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2015, sebagian besar masih merupakan sertifikat hak milik (SHM) dan sebagian kecil yang merupakan sertifikat Hak Guna Bangunan (1.11%) dan Hak Pakai (0,64%), dan bahkan Hak Guna Usaha (0,00%). Hal ini memberikan indikasi masih rendahnya tingkat pertumbuhan investasi yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah atau lahan di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2010-2015. Namun demikian, untuk sertifikat Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai trendnya meningkat dengan persentase yang sangat kecil.

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Gambaran kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Solok Selatan, harus mendapat perhatian khusus. Bila dilihat dari sudut pandang pemberian layanan (*service provider*) di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 159.796 orang terlihat dari persentase capaian kinerja layanan persampahan masih sangat rendah dimana baru bisa terlayani sebanyak 242,75m³/minggu dibandingkan dari target 3.276m³/minggu, maka cakupan layanan persampahan pada tahun 2015 hanya mencapai 7% saja dimana pada tahun 2014 terlayani hanya sebesar 28m³/minggu. Dengan demikian masih banyak volume sampah yang belum bisa dilayani (dibuang). Hal ini tidak terlepas dari persoalan daya tampung dan daya angkut yang belum optimal dimana belum adanya lokasi TPA dan TPS yang permanen serta masih kurang sarana prasarana pengangkutan persampahan. Untuk mengatasi hal tersebut dalam meningkatkan cakupan layanan persampahan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah diupayakan penambahan sarana dan prasarana persampahan melalui pembebasan tanah untuk lokasi TPA dan telah terealisasi pada tahun 2015 dengan pembebasan tanah sebesar 4,2 Ha di Jujutan Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir. Kemudian sudah dimulai proses rencana pembebasan 2 (dua) lokasi untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Jorong Sungai Siriah Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu dan di Jorong Taratak Baru Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan. Selain itu dilaksanakan pula penambahan mobil dan kontainer sampah dan pengangkatan petugas-petugas kebersihan pada jalan utama kawasan perkotaan (Padang Aro dan Muara Labuh).
2. Capaian kinerja program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu tersusunnya 2 Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terkoordinirnya penyusunan sebanyak 58 dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL, terselesaikannya sebanyak 5 sengketa lingkungan hidup melalui Pos P3SLH, terawasi dan termonitornya semua kegiatan/usaha yang berpotensi merusak lingkungan (67 kali kegiatan), tersedianya 10 paket sarana dan prasarana pengendali pencemaran dan kerusakan lingkungan. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2011–2014 mengalami peningkatan yang cukup baik. Jika pada tahun 2011 berada pada tingkat 0,13%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,34%.
3. Capaian kinerja program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yaitu tersedianya 10 dokumen data tentang pedoman perlindungan dan konservasi sumber daya alam, terlaksananya sosialisasi konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 157 orang. Capaian kinerja program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup yaitu tersedianya 10 dokumen data dan informasi lingkungan hidup daerah (SLHD). Kemudian diperingatinya setiap tahun hari lingkungan hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Capaian kinerja program Peningkatan pengendalian polusi yaitu tersedianya data dan informasi kualitas sungai dan pencemaran air (66 sampel air).

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran kinerja pelayanan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2010 sebesar 14,75%, kemudian mengalami kenaikan tahun 2011 mencapai 55,61%, dan tahun 2012 sebesar 74,51%. Data tahun 2013 dan 2014 tingkat kepemilikan KTP mengalami penurunan menjadi 71,19% dan 63,17% dan tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 73,07%. Capaian yang fluktuatif ini disebabkan oleh data konsolidasi bersih dari pusat dan penghapusan data ganda. Dalam hal penerapan KTP Nasional berbasis NIK, khusus untuk Kabupaten Solok Selatan baru mulai terlaksana tahun 2012.
2. Untuk kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2010 baru sebesar 23,16% dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu 25,01% dan 33,33 %, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 31,94% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 yaitu 37,08 menjadi 44,01 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 44,01%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kelahiran terutama untuk bayi yang baru lahir.
3. Sedangkan untuk rasio pasangan yang berakte perkawinan (ditujukan bagi pasangan non muslim) yang diukur dari jumlah pasangan nikah berakte perkawinan sampai dengan 2015 baru sebesar 4,22%.
4. Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten sudah dimulai sejak tahun 2009. Kabupaten Solok Selatan saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK-online) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*.

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Solok Selatan adalah Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk semua tingkatan yaitu Nagari, Kecamatan dan Kabupaten, kemudian Posyandu yang aktif. Pencapaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa juga terkait dengan perkembangan nilai swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dan persentase pemeliharaan pasca program dari kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat. Pencapaian kinerja urusan ini terkait dengan kegiatan dan program lintas SKPD yang berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kesbangpol Linmas, dan Dinas Kesehatan.

Tabel. 2.25
Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 – 2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari (LPMN)	buah	38	38	39	39	39	39
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Klp	35	525	1.050	1.575	1.775	1.775
3.	LSM yang aktif	%	na	na	10	17	17	26
4.	LPM Berprestasi	Lembaga	1	1	1	1	1	1
5.	PKK Aktif	%	35	35	35	35	35	35
6.	Posyandu Aktif	Lembaga	231	259	260	260	287	287
7.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	17	19	18	20	17	na
8.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	17	19	18	20	17	na

Sumber: BPM PPr KB, Kantor Kesbangpol Linmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, Diolah (2016)

Data pada Tabel 2.25 menunjukkan gambaran kinerja pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015. Indikator kinerja yang mengalami peningkatan yaitu jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat nagari mengalami peningkatan dari 38 lembaga tahun 2010 menjadi 39 lembaga pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh terjadinya pemekaran satu nagari yaitu nagari Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir pada tahun 2011. Kemudian jumlah rata-rata kelompok binaan PKK dari 35 kelompok tahun 2010 menjadi 1.775 kelompok pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin luasnya cakupan binaan PKK yang sebelumnya hanya sebatas tingkat kecamatan dan nagari, kemudian dikembangkan kepada kelompok Jorong dan kelompok-kelompok fungsional lainnya di tingkat nagari dan jorong. Selanjutnya jumlah LSM yang aktif juga mengalami peningkatan dari 10 LSM tahun 2012 menjadi 26 LSM tahun 2015. Posyandu aktif juga mengalami peningkatan dari 231 posyandu tahun 2010 menjadi 287 posyandu.

Capaian Indikator kinerja yang tidak mengalami peningkatan (stagnan) selama tahun 2010-2015 yaitu jumlah LPMN yang berprestasi (1 LPMN) dan persentase PKK aktif (35%), kemudian capaian yang fluktuatif dan stagnan yaitu persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebesar 17% (2010), meningkat menjadi 18% (2011), menurun menjadi 18% (2012), meningkat kembali menjadi 20% (2013) dan menurun

kembali menjadi 17% (2014) dan tahun 2015 tidak tersedia data. Kencenderungan yang sama juga terjadi pada persentase terpeliharanya sarana dan prasarana pasca program pemberdayaan masyarakat. Fenomena ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi setelah selesainya program PNPM Mandiri Pedesaan terkait dengan masalah keberlanjutan program.

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Gambaran kinerja pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010, cakupan peserta KB aktif sebesar 70,27%, mengalami peningkatan sampai tahun 2015 mencapai 75%. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan.
2. Sedangkan persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 lebih cenderung konstan. Pada tahun 2010 sebesar 32,18% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 32,77%, hal ini menunjukkan dimana belum terjadi peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 menjadi keluarga sejahtera.

2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Gambaran kinerja pelayanan urusan perhubungan Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Belum terdapat transportasi umum yang representative di Kabupaten Solok Selatan, selain itu volume kendaraan angkutan umum dalam jangka waktu tahun 2010-2015 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun masih banyak angkutan umum yang tidak resmi dan belum terdaftar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Untuk menunjang pelayanan arus penumpang ke daerah yang belum memiliki moda transportasi angkutan umum, maka Perum DAMRI memberikan bantuan armada perintis yaitu rute: Padang Aro-Letter W, Padang Aro-Lubuk Malako-Sungai Kunyit-Sungai Rumbai dan Padang Aro-Lubuk Malako-Abai. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum dan rasio izin trayek sebagaimana terdapat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26

Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum, Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal Bis di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum	Unit	8	11	11	11	20	20
2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	46.981	47.455	49.143	51.367	51.672	52.351
3.	Rasio Izin Trayek	Rasio	0,18	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4.	Jumlah Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Solok Selatan (2016)

2. Kinerja pada urusan perhubungan juga dapat dilihat dari cakupan layanan KIR terhadap kendaraan umum seperti pada Tabel 2.27. Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki KIR terus mengalami peningkatan, yaitu 58% tahun 2010 dan terus meningkat setiap tahun sehingga telah mencapai 86% pada tahun 2015. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum dalam melakukan uji kelayakan kendaraannya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat 14% jumlah angkutan umum yang belum melakukan uji kelayakan kendaraannya, dan ini menjadi tantangan untuk lima tahun kedepan agar mencapai 100 %.

Tabel 2.27

Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	58	68	72	81	84	86
2.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Kendaraan /Menit	20	20	20	20	20	20
3.	Biaya KIR:							
	PNP	Rp.	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 51.000 (ganti Buku)	43.500 51.000 (ganti Buku)
	Bus dan Barang	Rp.	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)	53.500 61.000 (Ganti Buku)

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Solok Selatan (2016)

Untuk menentukan kinerja pelayanan, maka dapat dihitung dengan persentase dari jumlah rambu-rambu yang dipasang setiap tahun dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia kemudian dikalikan 100%. Selama periode 2011-2015, Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Solok Selatan juga sudah melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 228 rambu, dengan cakupan kinerja pelayanan tahun 2010 (12%), 2011 (2,3%), 2012 (3%), 2013 (3%), 2014 (0%), 2015 (2%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasangan rambu-rambu memiliki kinerja yang kurang memuaskan, artinya masih sangat banyak jalan-jalan yang belum memiliki rambu-rambu lalu

lintas sesuai dengan standar pelayanan minimal. Pemasangan rambu-rambu tidak seimbang dengan peningkatan panjang ruas jalan yang dibangun dan yang semakin baik kemantapannya. Kekurangan ini menjadi target capaian untuk lima tahun yang akan datang.

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Gambaran kinerja pelayanan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 - 2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Jaringan Telekomunikasi	Operator/ Provider	4	4	6	6	6	6
2.	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	Rasio	na	1/1.600	1/1.600	1/1.600	1/2.200	1/2.400
3.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Surat Kabar	na	17	17	17	17	17
4.	Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal	Stasiun	3	3	2	2	2	2
5.	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada/ Tidak Ada	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Pameran/Expo	Kegiatan	3	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Solok Selatan, Diolah (2016)

Data pada Tabel 2.26 menunjukkan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015. Jumlah jaringan telekomunikasi mengalami peningkatan yaitu 4 operator/provider pada tahun 2010 meningkat menjadi 6 operator/provider pada tahun 2015. Pada sisi lain, terjadi penurunan rasio warnet terhadap jumlah penduduk yaitu 1/1600 tahun 2010 menurun menjadi 1/2.400 jumlah penduduk tahun 2015. Fenomena ini menunjukkan bahwa jumlah warnet semakin berkurang sedangkan jumlah penduduk meningkat. Dua kondisi yang berbeda ini mengalami kaitan yang cukup erat karena peningkatan jumlah jaringan telekomunikasi menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang dapat memanfaatkan dengan menggunakan alat telekomunikasi terutama handphone, dan berdampak terhadap berkurangnya ketergantungan penduduk terhadap warung internet. Hal yang sama juga berdampak terhadap berkurangnya jumlah penyiaran radio lokal, dimana pada tahun 2010 sebanyak 3 radio dan menurun menjadi 2 radio tahun 2015. Kemudian untuk indikator jumlah surat kabar nasional dan lokal tidak mengalami peningkatan (stagnan) dimana tahun 2010-2015 tetap sebanyak 17 surat kabar. Selanjutnya untuk Website Milik Pemerintah Daerah (www.solselkab.go.id) telah ada dan aktif semenjak tahun 2012, karena sebelumnya tidak aktif, bahkan mendapatkan penilaian dari lembaga Alexa tahun 2013 sebagai website terbanyak lamanya mendapatkan kunjungan untuk kategori website pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Namun saat ini, beberapa keluhan yang

didapatkan dari pengunjung adalah kurang updatenya informasi pada website www.solselkab.go.id. Update data ini semakin dirasakan akibat kurang updatenya layanan informasi dibandingkan dengan media sosial seperti *facebook*, *WatsApp* dan lain.

Kegiatan promosi melalui pameran/expo merupakan media yang cukup efektif dalam memperkenalkan produk/jasa tertentu termasuk sektor pariwisata dan budaya. Perkembangan pelaksanaan pameran/expo yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selama periode 2010-2015, minimal 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada awal tahun dalam rangka Ulang Tahun Kabupaten Solok Selatan setiap tanggal 7 Januari dan pertengahan tahun yaitu Festival Sarantau Sasurambi yang diintegrasikan dengan event Tour de Singkarak dan Pameran Pembangunan Pertanian.

2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambaran kinerja pelayanan urusan koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum keberadaan Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal, sehingga kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, secara kuantitas jumlah koperasi aktif di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan, jika pada tahun 2010 koperasi aktif 60 %, maka pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 48,5%. Akan tetapi, jika dilihat dari koperasi aktif yang RAT mengalami kenaikan dari 45,5% pada tahun 2010 menjadi 61,9% pada tahun 2015. Permasalahan secara umum dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Solok Selatan adalah: (1). Pilihan bidang usaha koperasi kurang prospektif, (2). Rendahnya kualitas SDM dan komitmen pengurus koperasi.

Tabel 2.29
Perkembangan Kinerja Koperasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Koperasi Berbadan Hukum	Unit	100	111	117	125	130	130
2.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	60	60	61	60	66	63
3.	Persentase Koperasi Aktif	%	60,0	54,1	52,1	48,0	50,8	48,5
4.	Jumlah Koperasi Aktif yang RAT	Unit	27	27	31	32	36	39
5.	Persentase Koperasi Aktif yang RAT	%	45,0	45	50,8	53,3	54,5	61,9

Sumber: Dinas Kopperindag Kabupaten Solok Selatan (2016)

2. Selain koperasi, usaha mikro dan kecil (UMKM) merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi

terhadap gejolak eksternal. Perkembangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 seperti pada Tabel 2.30

Tabel 2.30
Perkembangan UMKM di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah UKM Non BPR/LKM	Unit	320	323	310	458	554	1.342
2.	Jumlah BPR/LKM	Unit	5	5	5	5	5	5
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	%	91,6	91,6	91,3	94,1	95,1	97,5

Sumber : Dinas Kopperindag Kabupaten Solok Selatan (2016)

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Gambaran kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan investasi selama tahun 2010-2014.

Tabel 2.31
Perkembangan Investasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2014

TAHUN	INVESTASI		PERTUMBUHAN
	ADHB	ADHK	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	651,64	651,64	-
2011	763,13	691,24	6,08
2012	868,56	749,09	8,37
2013	923,45	787,40	5,11
2014*	1.047,21	836,57	6,25
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Investasi Tahun 2010-2014			6,45

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (Buku ICOR Kabupaten Solok Selatan 2010-2014)

Dari Tabel 2.31 dapat dilihat terjadi peningkatan dari investasi yang ditanamkan di Kabupaten Solok Selatan baik di hitung berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Untuk ADHK terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari perkembangan investasi yakni 651,64 milyar menjadi 1.047,21 Milyar tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar 395,57 Milyar. Sedangkan untuk melihat pertumbuhan investasi secara riil dapat dilihat dari pertumbuhan investasi berdasarkan harga konstan dengan rata-rata pertumbuhan 6,45%.

Tabel 2.32
Investasi Berdasarkan Pelaku Ekonomi Kabupaten Solok Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah)

Tahun	Pemerintah	Swasta	Masyarakat	Total Kab. Solok Selatan
2010	367,05	141,31	143,28	651,64
2011	420,16	169,33	173,64	763,13
2012	456,14	199,28	213,14	868,56
2013	449,77	221,18	252,51	923,45
2014*	496,74	256,09	294,38	1.047,21
2010-2014	2.189,86	987,19	1.076,94	4.253,99

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (Buku ICOR Kabupaten Solok Selatan 2010-2014)

Jika dilihat pada pelaku ekonomi yang menanamkan investasi pada periode 2010-2014 berdasarkan Tabel 2.32 dimana sektor pemerintah masih bersifat dominan yaitu sekitar 51,46,%, diikuti oleh investasi masyarakat yaitu 25,29% dan sektor swasta sebesar 23,20%. Dengan demikian, keberadaan Kabupaten Solok Selatan sebagai salah Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dalam dokumen MP3EI tahun 2010-2025 belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kontribusi sektor swasta dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Solok Selatan.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi bidang investasi dimana selama periode tahun 2010-2015, terjadi moratorium perizinan terutama untuk sektor pertambangan dan energi yang menjadi salah satu potensi daerah dan tidak bertambahnya investasi bidang perkebunan akibat keterbatasan cadangan lahan konsensi untuk perkebunan besar.

Dilihat dari struktur investasi berdasarkan sektor investasi yang ditanamkan selama tahun 2014 dapat dilihat sektor pertanian masih mendominasi investasi yakni 32,38%. Hal ini disebabkan besarnya investasi di sub bidang pertanian yakni perkebunan. Selanjutnya diikuti oleh sektor bangunan yakni sebesar 18,89 %, dimana investasi pada lapangan usaha ini berkembang seiring dengan pesatnya kegiatan pembangunan infrastruktur dan sektor perekonomian lainnya. Kegiatan investasi yang relatif kecil terjadi pada sektor listrik dan gas dan air minum yaitu sebesar 0,02 %, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,75 %. Rendahnya investasi pada sektor tersebut disebabkan lambatnya perkembangan sektor sekunder dan tersier terutama pada kegiatan industri dan jasa. Secara rinci terlihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Distribusi Investasi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2014* Atas Dasar Harga Berlaku

Kategori	Uraian	Persentase	Investasi (Rp Juta)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,38	339.064,57
B	Pertambangan dan Penggalian	4,80	50.278,15
C	Industri Pengolahan	7,42	77.689,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	164,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	443,61
F	Konstruksi	18,89	197.867,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,47	151.576,58
H	Transportasi dan Pergudangan	4,73	49.573,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,15	12.092,50
J	Informasi dan Komunikasi	5,25	55.016,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	7.762,17
L	Real Estate	0,69	7.272,25
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	129,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,14	64.272,87
P	Jasa Pendidikan	1,57	16.411,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	8.910,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,83	8.687,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	1.047.212,39

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan Buku ICOR Kabupaten Solok Selatan 2010-2014

Dari aspek manajemen pelayanan publik kinerja pelayanan urusan penanaman modal juga dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan dan Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015.

Data pada Tabel 2.34 menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja aspek manajemen pelayanan publik seperti sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintahan mengalami peningkatan dari kondisi tidak ada menjadi ada. Kemudian meingkatnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan nagari yang baik dari 2 % tahun 2010 menjadi 35% tahun 2015. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemberian dana *block grant* kepada nagari sejak tahun 2013 dan dilanjutkan dengan pemberian dana alokasi desa oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai tahun 2015. Disamping itu, sistem informasi manajemen pemerintah berbasis IT (e-) juga mengalami peningkatan dari 2 (dua) unit pada tahun 2010 yaitu e-KTP dan SIMPEG menjadi 5 (lima) unit tahun 2015 yaitu tambahannya *e-budgeting* (SIMDA) di DPPKAD, *e-Monev* dan *e-Procurement* di Bagian

Ekbang Sekretariat Daerah. Kemudian untuk survey Indeks Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 walaupun belum pada semua SKPD.

Tabel 2.34
Perkembangan Kinerja Aspek Manajemen Pelayanan Publik
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintahan	Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa (Nagari) yang baik	Unit	14	15	15	20	32	35
3.	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah	Unit	2	2	2	3	4	5
4.	Indek Kepuasan Masyarakat	Ada/Tidak disurvey	Tidak disurvey	Tidak disurvey	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: SKPD Terkait di Kabupaten Solok Selatan, Diolah (2016)

Meskipun capaian target mengalami peningkatan, untuk lima tahun yang akan datang capaian ini harus terus ditingkatkan dengan target mencapai standar pelayanan minimal bidang pelayanan publik.

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan kinerja pelayanan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 seperti terlihat pada Tabel 2.35

Tabel 2.35
Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	Buah	10	10	10	10	10	10
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	Buah	24	24	24	25	34	34
3.	Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta)/Jumlah Penduduk	%	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Budparpora Kabupaten Solok Selatan (2016)

Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti balai remaja hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan balai karang taruna masih perlu ditingkatkan. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2011-2015 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2011 lapangan olahraga per 1000 penduduk sebesar 2,10, maka di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1,56. Disamping itu

dampak dari kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga serta lemahnya manajemen organisasi olahraga prestasi juga terlihat dari tidak meningkatnya secara signifikan prestasi olahraga selama periode 2010-2015. Pada event PORPROV Sumatera Barat tahun 2010 yang dilaksanakan di Kabupaten Agam Kontingen Kabupaten Solok Selatan meraih peringkat 17 dari 19 Kabupaten/Kota, kemudian pada PORPROV Sumatera Barat Tahun 2012 di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi peringkat 13 dari 19 Kabupaten Kota, dan terakhir pada PORPROV Sumatera Barat tahun 2014 di Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi peringkat 18 dari 19 Kabupaten/Kota. Kondisi ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah alokasi APBD Kabupaten Solok Selatan dalam pengelolaan dan pembinaan kegiatan olahraga prestasi selama tahun 2010-2015.

2.3.2.14 Urusan Statistik

Gambaran kinerja pelayanan urusan statistik Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah disusun dan diterbitkannya dokumen/buku statistik sebagai berikut:

1. Buku Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka (DDA) selama periode 2010-2015 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Solok Selatan dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
2. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.
3. Tahun 2015 dilaksanakan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam menyusun iktisar data makro Kabupaten Solok Selatan dalam bentuk sajian data time series untuk indikator kunci selama tahun 2010-2014, dan menjadi data awal dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021.

2.3.2.15 Urusan Persandian

Selama periode tahun 2010-2015 penyelenggaraan urusan persandian belum dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, demikian juga perangkat daerah daerah yang melaksanakannya tidak ada.

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 dapat dilihat dari jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana

penyelenggaraan seni dan budaya dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.36

Tabel 2.36
Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 – 2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	0	1	1	1	1	1
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	3	3	3	4	3
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	0	17	17	17	17	17

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Solok Selatan (2016)

Dari Tabel 2.36 terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selama lima tahun terakhir rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya yang disebut dengan **Festival Sarantau Sasurambi**. Kegiatan ini berupa pementasan potensi seni dan budaya anak nagari dan pameran atau bazar usaha-usaha kecil dan menengah serta produk-produk kerajinan dan kuliner kabupaten Solok Selatan. Selain pencapaian kinerja yang cukup baik, maka juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima terkait dengan prioritas bidang seni dan budaya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Gambaran kinerja pelayanan urusan Perpustakaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.37

Tabel 2.37
Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Unit	41	46	52	52	52	50
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	271	326	556	521	637	598
3.	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah							
	• Jumlah Judul	Judul	1.400	1.867	2.411	2.538	2.538	2.922
	• Jumlah Buku	Buah	4.200	5.600	7.232	7.614	7.614	8.764

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok Selatan, Diolah (2016)

Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan,. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat tinggal

masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Gambaran kinerja pelayanan urusan kearsipan Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Perkembangan Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2010 - 2015

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan (Tahun)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengelolaan Arsip Secara Baku	Nagari/SKPD	0	0	0	0	0	8
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	-	-	-	-	-	1

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Solok Selatan, Diolah(2015)

Perkembangan kinerja urusan kearsipan berdasarkan aspek fokus, baru dimulai pada tahun 2015 atau tahun terakhir periode RPJMD Tahun 2010-2015. Pengelolaan Arsip secara baku tahun 2015 telah dilaksanakan pada 8 nagari, kemudian untuk peningkatan SDM Pengelola Kearsipan telah dilaksanakan 1 kali kegiatan pada tahun 2015.

2.3.3 Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 meliputi beberapa urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Adapun gambaran capaian kinerja fokus layanan urusan pilihan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagai berikut:

2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 adalah seperti terdapat pada Tabel 2.39;

Tabel 2.39
Perkembangan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan (realisasi/target daerah)	%	85,91	86,07	96,09	98,61	89,81	93,41
2	Konsumsi ikan (realisasi/target daerah)	%	70,29	58,67	66,08	84,64	76,76	74,11
3	Cakupan bina perikanan (jumlah kelompok perikanan yang dibantu pemda/jumlah kelompok perikanan)	%	75,00	86,67	80,00	80,87	72,46	72,30
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (jumlah produksi ikan hasil kelompok perikanan/jumlah produksi ikan di daerah)	%	58,51	68,35	65,46	73,66	69,29	82,46

Sumber: PDRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 (diolah)

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi perikanan darat yang cukup menjanjikan, karena didukung oleh banyak sungai dan daerah ini juga dikenal dengan sebutan sebagai Nagari Seribu Sungai yang keberadaan debit airnya cukup terjamin dengan terlindunginya Taman Nasional Kerinci Seblat. Disamping potensi sungai, juga terdapat beberapa potensi embung yang salah satunya berfungsi untuk lahan budidaya perikanan darat. Kemudian, pola budidaya perikanan berupa kolam, empang dan juga mina padi juga telah dilakukan oleh masyarakat di kawasan pertanian.

Namun pada sisi lain, kegiatan pengembangan budidaya perikanan belum berkembang dengan baik, antara lain dapat dilihat dari masih besarnya impor kebutuhan ikan dari luar daerah untuk konsumsi Kabupaten Solok Selatan. Data menunjukkan bahwa impor ikan yang masuk ke Kabupaten Solok Selatan, untuk jenis ikan tawar berasal dari Maninjau Kabupaten Agam dan Koto Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota, Singkarak Kabupaten Solok dan daerah-daerah lain yang membudidayakan ikan tawar (perikanan darat). Sedangkan untuk jenis ikan laut berasal dari Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Gambaran kinerja pelayanan urusan pariwisata Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kunjungan Wisatawan	Orang	1.104	1.564	1.674	1.862	1.890	2.750
2.	Objek wisata yang dikelola	Objek	0	0	0	0	1	2

Sumber: Dinas Budparpora Kabupaten Solok Selatan (2016)

Sektor pariwisata menjadi alternatif pilihan untuk dikembangkan dimasa depan, ditopang oleh ketersediaan wisata alam Kabupaten Solok Selatan yang masih alami serta potensi kearifan lokal di sektor kebudayaan yang relatif orisinal dengan ikon **Nagari Seribu Rumah Gadang**. Pengembangan potensi pariwisata ini diawali dengan perubahan cara berfikir eksploitatif yang mengandalkan sektor perkebunan dan pertambangan menjadi berfikir konservasi produktif dengan menjadikan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan budaya sebagai pendorong sektor ekonomi lain. Hal sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi.

Data tahun 2010-2015 menunjukkan bahwa meskipun objek wisata belum ada yang dikelola dengan baik pada tahun 2010-2013, namun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok Selatan tetap meningkat, hal tersebut terjadi sebagai dampak event Tour de Singkarak. Setelah beroperasinya Objek Wisata Hot Waterboom Sapan Maluluang tahun 2014, maka secara signifikan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal tersebut diproyeksi akan mengalami peningkatan yang cukup pesat sejalan dengan telah mulai dibenahinya objek wisata unggulan lainnya yaitu Kawasan Seribu Rumah Gadang Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, Air Terjun Tangsi Ampek, Jalur Pendakian Gunung Kerinci terintegrasi dengan Bumi Perkemahan Camin Toran di Kecamatan Sangir, dan Rumah Gadang Panjang di Abai Kecamatan Sangir Batang Hari.

Keberhasilan dalam pembangunan Pariwisata sangat ditentukan oleh keterpaduan pola pikir antara para *stakeholder* di pemerintahan, swasta, pemerhati wisata dan masyarakat serta adanya sinkronisasi program dan kegiatan sehingga dalam perjalanannya mampu tumbuh dan berkembang menjadi daya tarik tersendiri dan mampu mengundang minat para pengunjung. Program dan kegiatan dalam upaya mendekati urusan pariwisata antara lain pemasaran dan penyuluhan wisata, dan pengembangan obyek wisata unggulan. Peningkatan sarana dan prasarana wisata ini juga harus didukung oleh sektor lain seperti transportasi, kebersihan, pertanian dan ekonomi keratif, pendidikan, kesehatan dan ketertiban umum.

2.3.3.3 Urusan Pertanian

Gambaran kinerja pelayanan urusan pertanian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

adalah seperti terdapat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produktivitas padi atau bahan pangan lainnya utama lokal	Ton/Ha	5,54	4,89	4,95	4,95	4,28	4,98
2	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	35,78	35,46	34,80	34,38	34,69	34,07
3	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap PDRB	%	15,30	14,64	14,19	13,96	14,01	13,87
4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	15,03	15,34	15,16	15,02	15,48	14,81
5	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	0,08	0,91	0,91	0,91	0,85	0,82
6	Cakupan bina kelompok petani	%	42,0	48,48	39,42	39,44	35,8	71,35

Sumber: PDRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 (diolah)

1. Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, dimana mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Dalam pembentukan struktur ekonomi, sektor ini merupakan sektor andalan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusil sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Solok Selatan, yaitu sebesar 34,69% di tahun 2014 meningkat dari 34,07% dari tahun 2015.

Tabel 2.42
Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015
(Dalam Ton/Tahun)

No	Komoditi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi	147.261	127.894	135.648	121.939	124.501	131.437
2	Jagung	2.176	4.529	31.486	19.551	8.739	54.074
3	Kacang Hijau	52	102	88	66	34	0
4	Kacang Tanah	351	892	1.036	809	468	1.025
5	Kedelai	54	111	223	117	83	59
6	Ubi Jalar	910	1.815	5.546	3.080	2.976	2.650
7	Ubi Kayu	1.474	2.367	5.608	4.241	4.016	4.522

Sumber Dinas Pertanakkan Kabupaten Solok Selatan (2016)

Subsektor tanaman pangan merupakan subsektor yang menyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten Solok Selatan setelah subsektor

perkebunan seperti yang disajikan pada Tabel 2.42. Subsektor ini mencakup beberapa komoditi (yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan) seperti padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu.

2. Padi menjadi komoditi tanaman pangan terbesar di Kabupaten Solok Selatan dengan luas panen yang terus meningkat hingga mencapai 26.415 Ha dengan produksi 133.097 Ton tahun 2015. Jagung juga termasuk komoditi tanaman pangan unggulan dengan kenaikan paling pesat, dari luas panen 558 Ha dengan produksi 3.088 Ton tahun 2010 menjadi 9.149 Ha dengan produksi 48.741 Ton. Kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu memiliki trend produksi meningkat, berbeda dengan kacang hijau dan kedelai yang berfluktuatif.

Tabel 2.43
Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015
(Dalam Ha)

No	Komoditi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi	26.645	25.944	27.430	28.788	28.793	26.415
2	Jagung	558	1.663	4.051	3.926	7.775	9.149
3	Kacang Hijau	42	91	70	56	28	0
4	Kacang Tanah	251	676	481	514	394	461
5	Kedelai	49	132	150	87	61	29
6	Ubi Jalar	77	124	145	149	116	101
7	Ubi Kayu	101	209	150	171	148	147

Sumber: Ikhtisar Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan 2010-2014 (diolah)

3. Perkembangan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.44

Tabel 2.44
Perkembangan Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2010-2015 (Dalam Ton)

No	Komoditi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jeruk	3.851	111	2.687	4.501	4.591	805
2	Manggis	24	n.a	38	191	192	198
3	Pisang	998	231	605	121	196	202

Sumber: Dinas Pertanakaan Kabupaten Solok Selatan (2016)

Berdasarkan data Tabel 2.44 terlihat bahwa untuk komoditi buah Jeruk dan Pisang mengalami produksi yang fluakuatif dan cenderung menurun. Sedangkan untuk buah Manggis mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Manggis merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Solok Selatan, dan sejak tahun 2013 telah dilakukan kajian pengembangan atau diversifikasinya yang dibiayai oleh Kementerian Perindustrian. Tindak lanjut dari pengembangan produk olahan manggis juga telah dikerjasamakan dengan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

4. Perkembangan sektor peternakan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.45

Tabel 2.45
Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015
(Dalam Ekor)

No	Ternak	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sapi Potong	8.907	7.663	7.837	8.206	9.017	9.200
2	Sapi Perah	0	0	0	0	12	15
3	Kerbau	9.223	6.999	7.290	6.717	6.117	6.664
4	Kambing	8.280	8.395	8.467	8.429	8.442	8.635
5	Ayam Petelur	6.037	6.630	6.562	6.500	6.400	3.000
6	Ayam Pedaging	21.969	22.080	22.195	66.705	80.436	67.549
7	Ayam Buras	86.583	87.335	87.993	105.940	99.829	87.027
8	Itik	34.639	35.601	36.541	30.760	32.952	28.459

Sumber: Dinas Pertanakkan Kabupaten Solok Selatan (2016)

Perkembangan ternak sapi selama tahun 2010-2015 mengalami peningkatan, terutama untuk sapi potong. Besarnya bantuan sapi potong dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perkembangan ternak sapi di Kabupaten Solok Selatan. Sementara itu, perkembangan ternak kerbau mengalami penurunan selama tahun 2010-2015.

Untuk ternak ayam (petelur, pedaging dan buras) memiliki populasi yang dinamis dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Perkembangannya tergantung kepada mekanisme ekonomi yang berkembang di pasar yaitu para pengusaha ternak ayam dan permintaan dari konsumen.

Kemudian untuk ternak itik, sudah pernah mendapatkan alokasi bantuan dari APBD Provinsi dan APBN dengan sasaran beberapa kelompok tani. Namun demikian dalam perkembangannya, regenerasi ternak itik tidak berkembang di kelompok tani, dan salah satu penyebabnya adalah tingginya harga pakan (dedak, jagung dan konsentrat) sehingga tidak seimbang biaya produksi dan nilai jual produksi ternak itik, terutama penjualan telur itik.

5. Subsektor peternakan memberikan *share* yang cukup berarti bagi PDRB sektor pertanian Kabupaten Solok Selatan periode 2010-2015. Hal ini dicerminkan dengan berada di posisi ketiga setelah subsektor tanaman pangan. Ternak yang diusahakan/dipelihara oleh rumah tangga pertanian dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: kelompok ternak besar (sapi, kerbau); kelompok ternak kecil (kambing, domba); kelompok unggas (ayam, itik), dan kelompok ternak lainnya (burung puyuh, dsb). Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB harga berlaku adalah pada tahun 2010 (2,52%), tahun 2011 (2,57%), tahun 2012

(2,60%), tahun 2013 (2,60%), tahun 2014 (2,52%) dan tahun 2015 (2,57%).

2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Gambaran kinerja pelayanan urusan perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 adalah sebagai mana tersaji pada Tabel 2.46

Tabel 2.46
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB	%	18,43	18,68	18,65	18,21	17,38	17,35
2	Ekspor Bersih Perdagangan	juta	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	14,32	17,08	19,62	22,88	26,04	28,95

Sumber: PDRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 (diolah)

Berdasarkan data Tabel 2.46 terlihat kecenderungan selama tahun 2010-2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten menurun yaitu 18,43% tahun 2010 menjadi 17,35% tahun 2015. Data ini memberikan arti bahwa pengelolaan sektor perdagangan belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Secara teoritis, untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam perspektif industrialisasi antara lain dilihat dari sejauh mana perkembangan kontribusi sektor jasa dan perdagangan terhadap PDRB suatu daerah. Kemudian data ekspor bersih perdagangan tidak tersedia. Selanjutnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 cakupan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yaitu 14,32% dan terus meningkat setiap tahun hingga menjadi 28,95% pada tahun 2015. Jika dirata-ratakan terjadi peningkatan cakupan pembinaan tahun 2010-2015 yaitu 14,63 % atau rata-rata 2,44 % per tahun.

2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Gambaran kinerja pelayanan urusan perindustrian Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 sebagaimana pada Tabel 2.47

Tabel 2.47
Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6,20	6,25	6,22	6,05	5,75	5,59
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	3,04	3,12	3,11	3,05	2,73	n.a
3.	Pertumbuhan Industri	%	11,1	13,4	10,6	15,3	0,8	1,6
4.	Cakupan Bina Pengrajin	%	9,5	9,1	9,1	9,1	9,8	13,3

Sumber: PDRB Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 (diolah)

Dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 berkontribusi 6,25% dan pada tahun 2015 menjadi 5,59%, penurunan ini lebih disebabkan karena terjadinya peningkatan yang lebih besar dari sektor lain terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, dan konstruksi. Demikian juga dengan tingkat pertumbuhan industri juga mengalami penurunan yang cukup drastis, meskipun cakupan bina pengrajin mengalami kecenderungan peningkatan. Disamping akibat lesunya perekonomian nasional dan global, rendahnya tingkat pertumbuhan industri juga disebabkan oleh belum jelasnya fokus pengembangan sektor industri di Kabupaten Solok Selatan. Sesuai dengan potensi daerah, secara teoritis potensi sektor yang prospek adalah pengembangan industri berbasis pertanian, seperti pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi dari hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Solok Selatan seperti manggis, jeruk, produk turunan dari sektor peternakan dan buah-buahan potensial lainnya.

2.3.3.6 Urusan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil kinerja urusan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan urusan Ketransmigrasian Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 seperti pada Tabel 2.48

Tabel 2.48
Perkembangan Kinerja Urusan Ketransmigrasian
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Transmigran swakarsa (UPT)	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Sosnakertrans Kabupaten Solok Selatan

Selama tahun 2010-2015 tidak ada kegiatan transmigrasi swakarsa. Kegiatan urusan transmigrasi hanya dalam bentuk fasilitas beberapa kegiatan pendukung perkembangan eks UPT transmigrasi yang dibangun sebelum tahun 2010 di Kabupaten Solok Selatan, yaitu dengan fokus pada penyelesaian masalah tanah dan pengembangan ekonomi warga UPT Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Dilihat dari perkembangan pengeluaran konsumsi masyarakat kabupaten Solok Selatan relatif cukup tinggi yaitu sekitar 19,19% pertahun. Namun jika dilihat dari peningkatan besaran pengeluaran perkapita penduduk masih relatif rendah yaitu dari Rp. 514.639 ,- pada tahun 2010 menjadi Rp 915,226,- tahun 2015. Dari total pengeluaran tersebut rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh konsumsi makanan dengan rata-rata 60% pertahun. Ini berarti jumlah penduduk yang berada pada kelas menengah keatas masih sedikit. Salah satu karakteristik menengah keatas yaitu meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan non makanan.

Tabel 2.49
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Solok Selatan Periode 2010-2015 (Rata-rata per bulan)

Kelompok Pengeluaran	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Rumah Tangga	514.639	517.747	555.815	710.985	735.213	915.226
• Makanan	326.254	327.355	357.037	434.607	426.435	488.911
• Non Makanan	188.381	190.392	198.778	276.378	308.778	425.315

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (2016)

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani menjadi satu-satu indikator urusan pertanian untuk mengukur dari aspek daya saing daerah dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah. Secara konseptual, yang dimaksud dengan nilai tukar petani merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani. Sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Solok Selatan belum tersedia data tentang Nilai Tukar Petani.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Infrastruktur Perhubungan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan perhubungan dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah barang/orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun. Perkembangan indikator urusan perhubungan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.50

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,156	0,157	0,150	0,156	0,117	0,137
2.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	4.530	6.200	6.645	6.725	6.520	6.020
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	130.684	125.568	768.000	510.326	342.300	350.212
3.	Jumlah orang melalui dermaga/ terminal per tahun	orang	3.120	5.870	6.321	6.457	6.132	5.435
	Jumlah barang melalui dermaga/ terminal per tahun	Ton	100.536	119.100	589.100	478.990	311.114	320.109

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Solok Selatan (2016)

Data Tabel 2.50 menggambarkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 0,156 menjadi 0,137 tahun 2015. Artinya peningkatan panjang jalan tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Peningkatan jumlah kendaraan juga diikuti oleh peningkatan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yaitu 4.530 orang tahun 2010 meningkat menjadi 6.020 orang tahun 2015, meningkat rata-rata 5,4 % per tahun. Sementara itu, jumlah barang yang terangkut angkutan umum mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu 130.684 Ton tahun 2010 meningkat menjadi 350.212 Ton tahun 2015, meningkat rata-rata 28% per tahun. Kemudian perkembangan jumlah orang dan barang yang melalui dermaga/terminal juga mengalami peningkatan. Jumlah orang melalui dermaga/terminal tahun 2010 sebanyak 3.120 orang meningkat menjadi 5.435 orang tahun 2015, meningkat rata-rata 12% per tahun. Jumlah barang melalui dermaga/terminal tahun 2010 yaitu 100.536 Ton meningkat menjadi 320.109 Ton tahun 2015, meningkat rata-rata

36% per tahun.

2.4.2.2 Infrastruktur Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat diukur melalui empat indikator yaitu: jenis dan jumlah bank dan cabangnya, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, dan kelas dan jumlah penginapan/hotel. Perkembangan indikatornya di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jenis dan jumlah bank dan cabangnya							
	Jumlah Bank	Buah	7	8	10	10	12	12
	Bank Umum	Buah	2	2	4	4	5	5
	Bank Syariah	Buah	1	2	2	2	2	2
	BPR	Buah	4	4	4	4	5	5
2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan							
	Jumlah perusahaan asuransi	Buah	2	2	2	2	3	3
	Asuransi jiwa	Buah	1	1	1	1	1	1
	Asuransi lainnya	Buah	1	1	1	1	2	2
3.	Jenis, kelas dan jumlah restoran							
	Restoran	Buah		-	-	-	-	-
	Cafe	Buah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
	Rumah Makan	Buah	20	20	22	25	45	33
4.	Jenis, dan kelas dan jumlah penginapan/hotel							
	Jumlah Penginapan/Hotel	Buah	9	9	9	10	10	17
	Kelas Wisma	Buah	4	4	4	5	6	6
	Hotel Melati	Buah	4	4	4	4	4	5
	Hotel Bintang 1	Buah	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Solok Selatan (2016)

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan komunikasi dan informatika dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Perkembangan indikator urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika untuk Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Rasio	n.a	60,02	62,31	64,02	67,68	68,57
2.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	%	91,02	92,59	92,58	93,12	93,37	93,57
3.	Persentase penduduk yang menggunakan Telepon	%	na	7	10	13	16	25

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom dan Dinas ESDM Kabupaten Solok Selatan serta Ranting PLN Muara Labuh (2016)

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan penataan ruang dapat diukur melalui enam indikator yaitu: ketaatan terhadap RTRW, Luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan. Perkembangan indikator urusan penataan ruang di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Urusan Penataan Ruang untuk Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	n.a	n.a	n.a	38,41	45,65	46,36
2.	Luas Wilayah Produktif	%	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24
3.	Luas Wilayah Industri	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Luas Wilayah Banjir	%	5,00	5,00	5,00	5,40	5,40	5,50
5.	Luas Wilayah Kekeringan	%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6.	Luas Wilayah Perkotaan	%	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14

Sumber: BPPMD dan BPBD Kabupaten Solok Selatan (2016)

Sejalan dengan dilaksanakannya sosialisasi penyelenggaraan tata ruang sebagai kelanjutan dari penetapan RTRW Kabupaten Solok Selatan tahun 2012, maka ketaatan terhadap RTRW semakin meningkat. Setiap kegiatan pembangunan termasuk investasi yang terkait dengan pemanfaatan ruang diwajibkan mendapatkan rekomendasi BKPRD melalui BPPMD tentang kesesuaian tata ruang. Sampai dengan kondisi tahun 2015, tingkat ketaatan terhadap RTRW telah mencapai 46,36%. Artinya masih ada kegiatan pembangunan dan investasi yang belum mentaati RTRW, terutama kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat pada kawasan-kawasan yang dilarang oleh Perda RTRW seperti disepanjang sempadan sungai dan lain sebagainya.

Luas wilayah produktif tidak mengalami peningkatan yaitu 49,24%, dimana selama lima tahun terakhir tidak terjadi penambahan izin lokasi untuk kegiatan investasi terutama perkebunan besar. Demikian juga halnya dengan luas wilayah industri yaitu, kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan industri rumah tangga seperti di Kecamatan KPGD,

Sungai Pagu dan Sangir dan untuk industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Luas wilayah banjir meningkat dari 5,0% tahun 2010 menjadi 5,5% tahun 2015 terutama pada kawasan yang berada di sepanjang pinggir sungai utama yaitu Batang Suliti, Batang Bangko, Batang Liki, Batang Sangir, Batang Ikur dan Batang Hari. Wilayah banjir ini dari sisi fungsi adalah kawasan pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan.

Luas wilayah kekeringan terutama pada musim panas yaitu di Kecamatan Sangir Balai Janggo terutama nagari Sungai Kunyit Barat, Sungai Kunyit dan Talunan Maju yang diperkirakan luasnya sebesar 7% dari luas Kabupaten Solok Selatan.

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan perumahan rakyat dan permukiman dapat diukur melalui satu indikator yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. Perkembangan indikator urusan perumahan rakyat dan permukiman di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.54

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	Rumah Tangga	37,77	37,69	39,39	40,54	42,11	54,73

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan (2016)

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk melihat fokus iklim berinvestasi dalam mengukur aspek daya saing daerah dilakukan dengan mengukur enam indikator yaitu: 1) angka kriminalitas, 2) jumlah demo, 3) lama proses perizinan, 4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, 5) jumlah perda yang mendukung iklim investasi, dan 6) persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Perkembangan fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka kriminalitas,	%	34,53	35,39	40,92	36,26	40,86
2.	Jumlah Demo	Kali/Tahun	2	3	4	3	1
3.	Lama Proses Perizinan,	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
4.	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah						
	• umlah Pajak Daerah	(Milyar Rp)	3,595	3,691	6,409	7,409	6,532
	• enis Pajak Daerah	Jenis	13	13	13	13	13
	• umlah Retribusi Daerah	(Milyar Rp)	6,347	11,798	12,254	21,319	21,272
	• enis Retribusi Daerah	Jenis	38	38	38	38	38
5.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi	Dokumen	0	0	0	0	0
6.	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	2,63	2,56	2,56	2,56	2,56

Sumber: Kantor Kesbang, Pol Linmas, DPPKAD, BPPMD, KPUP dan Bagian Pemnag Setda Kabupaten Solok Selatan (2016)

Data pada Tabel 2.54 menunjukkan bahwa perkembangan indikator fokus iklim invetasi terkait dengan daya saing daerah angka kriminalitas persentasenya cenderung meningkat dari 34,53% tahun 2011 menjadi 40,86% tahun 2015. Tindakan kriminalitas yang menonjol adalah pencurian dan penganiayaan dengan kekerasan. Pencurian yang menonjol yaitu pencurian kendaraan bermotor dan pencurian ternak. Selama jangka waktu 2011 sampai 2015, didapatkan data tentang demontrasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi, yaitu berkaitan dengan investasi pertambangan dan perkebunan serta investasi panas bumi.

Selanjutnya perkembangan jumlah pajak dan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015, namun jika dianalisis lebih jauh peningkatannya tidak banyak dari kontribusi pengelolaan potensi daerah melalui penanaman investasi. Akan tetapi peningkatan yang terjadi pada retribusi daerah akibat peningkatan retribusi kesehatan yang berasal dari dana kapitasi jaminan kesehatan daerah. Untuk jumlah jenis pajak dan retibusi daerah yang dipungut tidak mengalami peningkatan (tetap), 13 jenis pajak daerah dan 38 jenis retribusi daerah.

Selama tahun 2011-2015 tidak ada Peraturan Daerah yang dibuat dalam rangka mendukung iklim investasi daerah. Namun demikian beberapa kajian awal untuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan telah disusun pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Peraturan daerahnya disusun pada tahun 2016.

2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Untuk melihat fokus sumberdaya manusia dalam mengukur aspek daya saing daerah diukur dari dua indikator yaitu rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio ketergantungan. Rasio lulusan S1/S2/S3 dihitung dengan cara membagi jumlah lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk kemudian dikali dengan 10.000 pada tahun tertentu. Sedangkan rasio ketergantungan dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk usia <15 tahun + usia >64 tahun dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun di kali 100.

Perkembangan fokus sumber daya manusia di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Urusan Ketenagakerjaan untuk Fokus Sumberdaya Manusia di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,24	0,24	0,21	0,20	0,26	0,27
2.	Rasio Ketergantungan	43,4	59,7	59,3	58,9	58,4	58,0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan (2016)

Data Tabel 2.56 menunjukkan bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami peningkatan dari 0,24 tahun 2010 meningkat menjadi 0,27 pada tahun 2015. Namun demikian, rasio ketergantungan juga mengalami peningkatan dari 43,4% tahun 2010 menjadi 58,0 tahun 2015. Hal terkait dengan meningkatnya angka pengangguran dan meningkatnya usia harapan hidup.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana sumber-sumber pembiayaan desentralisasi fiskal tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menghendaki pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; *pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah*, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan daerah merupakan uang dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan daerah dan bendahara pengeluaran daerah. Pendapatan daerah bersumber dari: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga (Pasal 12-13, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007).

Selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus.

Perkembangan dan realisasi APBD Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2011-2015 ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel. 3.1.
Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2011 - 2015

Tahun	Uraian	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	
				Penerimaan	Pengeluaran
2011	Anggaran	441,714,616,730	477,168,008,814	53,202,833,797	700,000,000
	Realisasi	439,490,042,649	396,297,360,932	31,101,767,641	633,000,000
	Pencapaian Target	99.50	83.05	58.46	90.43
2012	Anggaran	474,383,633,205	532,125,849,564	62,952,964,632	1,363,000,000
	Realisasi	461,402,661,175	487,389,724,518	62,902,716,896	1,363,000,000
	Pencapaian Target	97.26	91.59	99.92	100.00
2013	Anggaran	541,263,913,578	576,751,339,190	35,552,653,000	0
	Realisasi	515,127,843,434	530,578,741,208	35,934,744,836	0
	Pencapaian Target	95.17	91.99	101.07	100
2014	Anggaran	640,675,214,248	660,540,529,613	35,552,653,000	0
	Realisasi	630,492,374,821	595,547,531,731	20,528,232,563	0
	Pencapaian Target	98.41	90.16	57.74	100
2015**	Anggaran	737,791,461,762	790,299,792,360	54,508,330,598	2,000,000,000
	Realisasi	739,447,807,717	703,395,983,375	55,423,614,315	2,000,000,000
	Pencapaian Target	100.22	89.00	101.68	100.00
Rata-Rata Pencapaian Target		98.11	89.16	83.77	98.09

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa kinerja dari pencapaian dan realisasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan cukup baik dengan rata-rata pencapaian pendapatan daerah sekitar 98,11% sedangkan realisasi belanja daerah 89,16%, penerimaan pembiayaan 83,77% dan realisasi pengeluaran pembiayaan 98,09%. Ini dapat bahwa target dari perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode 2011-2015 cukup realistis.

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah terdiri dari: (a). Pendapatan Asli Daerah, (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah, (b). Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan (c). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Jika dilihat dari perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp 439.490,04 juta

pada tahun 2011 menjadi Rp 739.447,81 juta pada tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan 14,08 %.

Selanjutnya dari Tabel 3.2 terlihat bahwa sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan masih bersumber dari dana perimbangan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan rata-rata 80,08% per tahun. Peningkatan kontribusi ini seiring peningkatan dari realisasi pendapatan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2011 realisasi dana perimbangan Rp. 332.869,51 juta atau berkontribusi terhadap pendapatan sebesar 75,7% dan mengalami terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi Rp. 569.880,54 juta dengan berkontribusi 77,11% dalam pembentukan pendapatan daerah.

Kemudian perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan pada 2011-2015 juga terjadi peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,68% yaitu dari Rp. 14.800,64 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 41.207,40 juta pada tahun 2015, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu penerimaan dana Kapitasi Kesehatan yang berasal dari BPJS yang diterima oleh puskesmas serta penerimaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Sedangkan untuk pajak dan retribusi daerah peningkatan relatif kecil dengan rata-rata peningkatan hanya 6,81% dan 3,9% pertahun. Jika dilihat dari kontribusi total pendapatan asli daerah terhadap total Pendapatan Daerah dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap pembentukan pendapatan daerah masih relatif kecil namun cenderung terus mengalami peningkatan yaitu dari 3,36% pada tahun 2011 menjadi 5,57% pada tahun 2015. Hal ini berarti bahwa sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan masih sangat bergantung pada dana perimbangan terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten Solok Selatan dari Pemerintah Pusat.

Rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah ini menggambarkan masih lemahnya aktifitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan objek pungut, serta belum tergalinya dan terkelolanya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penggalan sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dapat dikurangi. Penggalan sumber pendapatan tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan

retribusi daerah, serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan untuk pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu rata-rata 15,63% pertahun yaitu dari Rp. 91.819,89 juta tahun 2011 menjadi Rp. 128.359,87 juta pada tahun 2015. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu mengalami peningkatan 32,82% menjadi 45,37%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya hibah yang didapat oleh Kabupaten Solok Selatan untuk kegiatan mitigasi bencana dan peningkatan transfer dana desa dari pemerintah pusat, serta peningkatan bagi hasil pajak yang diterima oleh Kabupaten Solok Selatan dari Provinsi Sumatera Barat.

Tabel. 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011 - 2015 (Rp Juta)

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015**	Rata-Rata Pertumbuhan
A.	Pendapatan Asli Daerah	14.800,64	22.054,66	22.225,15	32.342,61	41.207,40	30,68
1.	Pajak Daerah	4.334,40	2.339,17	3.338,46	4.112,08	4.415,20	6,81
2.	Retribusi Daerah	5.071,28	5.267,64	9.196,73	11.369,25	1.538,46	3,90
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan	1.860,07	1.737,43	1.966,66	1.957,02	1.458,05	-4,85
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.534,90	12.710,42	7.723,31	14.904,25	33.795,69	110,02
B	Dana Perimbangan	332.869,52	387.238,79	426.420,20	509.850,54	569.880,54	14,45
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.527,44	38.183,79	28.439,51	30.845,91	21.655,75	-13,16
2.	Dana Alokasi Umum	264.086,20	315.024,09	351.505,74	406.540,35	433.585,91	13,29
3.	Dana Alokasi Khusus	28.255,88	34.030,91	46.474,96	72.464,28	114.638,88	42,78
C	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	91.819,89	52.109,21	66.482,49	88.299,23	128.359,87	15,63
1.	Pendapatan Hibah	3.8922,4	4.183,47	3.813,19	2.490,74	20.035,15	167,08
2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.662,50	21.565,43	22.672,12	28.605,45	33.724,01	13,39
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.165,27	25.743,31	38.039,80	51.863,53	70.475,72	14,87
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	2.099,88	617,00	1.957,38	5.339,51	4.125,00	74,17
	TOTAL PENDAPATAN	439.490,04	461.402,66	515.127,84	630.492,37	739.447,81	14,08

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap, jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban, jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban,

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Jika dilihat dari Tabel 3.3 yang menggambarkan perkembangan Neraca Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015, terlihat bahwa pertumbuhan total aset meningkat sangat signifikan, yaitu dari Rp. 661.372,03 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.671.292,66 juta pada tahun 2015, dengan peningkatan rata-rata 32,76%. Meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan aset cukup signifikan yaitu dari Rp. 1.327.611,17 juta pada tahun 2013 menjadi Rp. 995.750,56 juta yang diakibatkan dari peningkatan akumulasi penyusutan dari aset tetap yang relatif tinggi yaitu Rp. 580.728,18 juta. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan aset yang cukup tinggi menjadi Rp. 1.671.292,66 juta. Hal ini terjadi terjadi karena peningkatan dari aset tetap sebagai akibat dari peningkatan dari belanja modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok Selatan terutama pada peningkatan infrastruktur daerah dan layanan masyarakat serta peningkatan aset lancar yang disebabkan oleh meningkatnya Kas Daerah sebagai akibat meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang diperoleh dari tahun tersebut.

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga sama untuk pertumbuhan jumlah dari kewajiban dan ekuitas dana. Jika dilihat pada periode tahun 2011-2014 terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap kewajiban pemerintah daerah terutama kewajiban jangka pendek yaitu dari Rp. 492,31 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 5.284,66 juta pada tahun 2014, dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi Rp. 1.637,44 juta. Sedangkan perkembangan ekuitas dana lebih mendominasi dan cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tahun 2011 ekuitas dana Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 660.879,72 juta menjadi Rp. 1.669.655,22 juta pada tahun 2015. Jika dilihat komposisi pembentuk ekuitas dan kewajiban dapat dilihat komposisi ekuitas dana jauh lebih besar dibandingkan total kewajiban yaitu rata-rata sekitar 99,85% ekuitas dana dan hanya 0,15% kewajiban daerah.

Tabel. 3.3.
Neraca Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011 - 2015 (Rp Juta)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
Aset	661.372,03	779.162,07	1.327.611,17	995.750,56	1.671.292,66	32,76
Aset Lancar	79.966,12	55.921,46	44.266,10	74.128,35	129.226,37	22,72
Aset Tetap	532.236,56	672.598,61	1.160.345,99	855.207,11	1.474.411,98	36,24
Investasi Jangka Panjang	17.672,58	27.760,11	26.894,39	26.872,54	32.209,29	18,43
Aset Lainnya	31.496,77	22.881,88	96.104,67	39.542,56	35.445,02	55,85
Kewajiban dan Ekuitas Dana	661.372,03	779.162,07	1.327.611,17	995.750,56	1.671.292,66	32,76
Kewajiban Jangka Pendek	492,31	102,87	336,58	5.284,66	1.637,44	387,29
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	660.879,72	779.059,20	1.327.274,58	990.465,90	1.669.655,22	32,86

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015

Untuk memahami kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dilakukan analisis rasio keuangan, meliputi *rasio likuiditas* dan *rasio solvabilitas*. *Rasio likuiditas* lebih ditujukan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo. Sedangkan *rasio solvabilitas* berguna untuk mengukur kemampuan pemerintahan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Tabel. 3.4.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011 - 2015

NO	Uraian	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
Rasio Likuiditas						
1	Rasio lancar (current ratio)	162,43	543,61	131,52	14,03	78,92
2	Rasio quick (quick ratio)	158,41	503,33	115,09	11,68	63,35
Rasio Solvabilitas						
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,000744	0,000132	0,000254	0,005307	0,000980
4	Rasio hutang terhadap modal	0,000745	0,000132	0,000254	0,005336	0,000981

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 (data diolah)

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat *rasio likuiditas* keuangan Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2011-2015 relatif baik meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan yang cukup tinggi hingga 14,03 untuk *current ratio* dan 11,68 untuk *quick ratio*. Penurunan ini lebih disebabkan karena peningkatan kewajiban jangka pendek, namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan hingga 78,92 untuk *current ratio* dan 63,35 untuk *quick ratio*. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Solok Selatan mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar. Sedangkan untuk *rasio solvabilitas* dapat dilihat kemampuan keuangan Kabupaten Solok Selatan sangatlah

baik, hal ini dapat dilihat dari rasio total hutang terhadap ekuitas dana atau total aset, yaitu berkisar hanya dibawah 1% saja. Ini berarti hutang yang dimiliki Kabupaten Solok Selatan berada dibawah 1 % dari jumlah aset atau ekuitas dananya. Rendahnya nilai rasio *likuiditas* dan *solvabilitas* lebih disebabkan oleh rendahnya nilai hutang pemerintah daerah.

Berdasarkan analisa dari ke empat rasio keuangan diatas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang sangat kuat (baik) dalam melunasi seluruh hutangnya. Namun dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan belum memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari pihak lain. Hal ini disebabkan belum adanya program pembangunan yang membutuhkan dana yang besar yang mempunyai aspek ekonomis terhadap peningkatan pendapatan daerah dimasa datang. Karena pengambilan kebijakan tersebut akan berdampak peningkatan kewajiban pada masa yang akan datang yang akan mengakibatkan pada penurunan sumber daya ekonomi di masa datang.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap belanja yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maupun kegiatan penunjang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja daerah terdiri atas belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 menkonversikan ketiga belanja tersebut menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengklasifikasian belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung terkait dengan metode penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mulai diterapkan dalam era otonomi daerah merupakan usaha untuk meningkatkan dan mempercepat efektifitas proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran) dan outcome (hasil) daripada menitikberatkan alokasi biaya atau input semata dan mengabaikan keluaran yang akan dicapai. Output (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan, sedangkan Input (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap

penggunaan sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan produk berupa barang atau jasa yang akan dihasilkan serta hasil atau mamfaat yang diharapkan dari barang tersebut, kecuali untuk belanja tidak langsung yang memang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang dan jasa yang dihasilkan,

Dari Tabel 3.5 dapat dilihat terjadi peningkatan belanja daerah, yaitu dari 2011 sebesar Rp. 396.297,36 juta dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi Rp. 703,395,98 juta dengan rata-rata pertumbuhan 15,55 pertahun. Dengan komposisi pos belanja sampai tahun 2015, belanja langsung masih mendominasi belanja daerah dengan rata-rata sekitar 52,06% dari total belanja. Jika dilihat dari masing-masing pos belanja, dapat dilihat terjadi pos belanja tidak langsung pada periode 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari Rp 196.129,62 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 334.145,48 juta pada tahun 2015, atau mengalami rata-rata pertumbuhan 14,41%. Peningkatan tertinggi terjadi pada pos belanja pegawai dan Belanja hibah pemerintah kepada Badan/Lembaga/dan Organisasi Swasta. Peningkatan belanja pegawai lebih disebabkan oleh kebijakan penerimaan pegawai dari umum, K1 dan K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai daerah serta kebijakan kenaikan gaji PNS yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peningkatan ini terjadi juga pada pos belanja langsung yang juga mengalami peningkatan dengan rata-rata yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 200.167,74 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 369.250,50 juta pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan 16,66%. Kenaikan dari belanja langsung tertinggi terjadi pada belanja modal dan belanja barang dan jasa yang ditujukan untuk percepatan pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2010-2015, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel. 3.5.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011 - 2015 (Rp. Juta)

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015**	Rata-Rata Pertumbuhan
A	Belanja Tidak Langsung	196.129,62	236.379,07	251.290,90	279.031,05	334.145,48	14,41
1	Belanja Pegawai	175.618,74	207.603,83	224.329,65	255.551,42	287.956,99	13,22
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	5.447,89	7.594,19	6.595,50	2.775,74	14.652,50	99,05
5	Belanja Bantuan Sosial	4.077,22	3.698,48	3.121,70	1.305,00	1.015,00	-26,33
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0

7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	7.506,07	14.469,95	15.635,77	17.721,66	29.542,17	45,22
8	Belanja Tidak terduga	3.479,70	3.012,62	1.608,28	1.677,24	978,83	-24,35
B	Belanja Langsung	200.167,74	251.010,66	279.287,84	316.516,48	369.250,50	16,66
1	Belanja Pegawai	13.069,30	15.722,66	15.768,70	17.959,00	17.647,49	7,97
2	Belanja Barang dan Jasa	74.751,30	89.480,38	97.929,37	114.714,91	136.144,11	16,28
3	Belanja Modal	112.347,13	145.807,63	165.589,77	183.842,57	215.458,90	17,89
	TOTAL BELANJA	396.297,36	487.389,72	530.578,74	595.547,53	703.395,98	15,55

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja untuk aparatur, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, termasuk belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu tahun 2011-2015, kebijakan belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur juga menunjukkan kebijakan yang relatif baik yaitu dengan peningkatan 62,76%. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada Tabel 3.6, yaitu dari Rp 244.117,44 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 397.318,90 juta pada tahun 2015. Peningkatan untuk belanja aparatur ini terutama disebabkan oleh kenaikan belanja tidak langsung sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan gaji aparatur pemerintahan dan peningkatan jumlah pegawai sehingga terjadi kenaikan dari dari Rp. 199.547,36 juta pada tahun 2011 menjadi Rp.287.956,99 juta pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan 44,31%. Sedangkan untuk belanja langsung peningkatan ini disebabkan oleh belanja yang berhubungan untuk peningkatan kinerja aparatur, seperti belanja modal, dan perjalanan dinas, dengan peningkatan belanja modal dari Rp. 9.486,31 juta pada tahun 2011 menjadi Rp.48.138,83 juta pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan 407,46%. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas mengalami peningkatan dari Rp. 18.167,58 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 32.306,59 juta pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 77,83 %.

Tabel. 3.6.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung	199.547,36	207.603,83	224.329,65	255.551,42	287.956,99
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	159.194,93	158.964,18	160.093,55	179.574,07	203.508,79
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	36.521,78	44.387,79	60.119,81	71.742,98	79.648,64
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.949,26	3.537,66	3.504,63	3.675,23	4.133,45
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	881,40	714,20	611,65	559,13	666,11
B	Belanja Langsung	44.570,08	56.241,77	62.759,60	74.833,17	109.361,91
1	Belanja Honorarium PNS**)	13.069,30	15.722,66	15.734,64	17.922,68	17.494,61
2	Belanja Uang Lembur**)	75,01	67,51	34,06	36,33	152,88
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	322,92	284,76	78,77	86,15	63,88
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	877,99	921,89	975,55	1.325,12	1.804,92
5	Belanja premi asuransi kesehatan	1.981,98	2.264,12	4.425,19	4.658,10	7.639,35
6	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	264,00	288,75	268,05	595,03	571,82
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	325,00	493,07	580,08	1.140,16	1.189,04
8	Belanja perjalanan dinas**)	18.167,58	21.074,39	24.223,43	27.079,36	32.306,59
9	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
10	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
11	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	9.486,31	15.124,63	16.439,82	21.990,25	48.138,83
	TOTAL	244.117,44	263.845,61	287.089,25	330.384,58	397.318,90

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015

Berdasarkan hasil pengolahan data perbandingan antara belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7. meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2012 dari 61,50% pada tahun 2011 menjadi 53,98%. Namun pada tahun 2013-2015 proporsi belanja aparatur terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengeluaran daerah. Pada tahun 2013 proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur adalah 54,11%, dan meningkat menjadi 56,33% pada tahun 2015. Peningkatan ini terutama terjadi karena adanya peningkatan belanja tidak langsung akibat peningkatan gaji dan jumlah pegawai serta peningkatan belanja langsung yang bertujuan untuk peningkatan kinerja aparatur seperti belanja modal dan perjalanan dinas untuk aparatur yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian dan perlu peningkatan dimana data belanja beasiswa pendidikan PNS yang cenderung menurun, artinya kurangnya perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM Aparatur. Kemudian terdapat dua item belanja pegawai yaitu

Belanja perjalanan pindah tugas dan Belanja Pemulangan Pegawai yang belum dianggarkan. Sementara belanja tersebut berkaitan terhadap motivasi dan kinerja pegawai.

Tabel. 3.7.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011- 2015

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x100%
1	Tahun 2011	244,117,437,698	396,930,360,932	61.50
2	Tahun 2012	263,845,606,377	488,752,724,518	53.98
3	Tahun 2013	287,089,248,075	530,578,741,208	54.11
4	Tahun 2014	330,384,584,741	595,547,531,731	55.48
5	Tahun 2015**	397,318,896,063	705,395,983,375.	56.33

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 (data diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Jika dilihat dari Tabel 3.8 dari tahun 2011 sampai tahun 2015 penerimaan pembiayaan Kabupaten Solok Selatan di dominasi oleh penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, SILPA ini merupakan hasil dari penghematan atau kelebihan penganggaran dari penganggaran kegiatan tahun anggaran sebelumnya. Jika dilihat dari penggunaan SILPA ini pada penganggaran cenderung berfluktuatif namun cenderung meningkat yaitu dari Rp. 30.987,75 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 55,423,61 juta pada tahun 2015. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan hanya digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah yang diinvestasikan kepada Bank Nagari, PT Balairung, Perusda dan PDAM.

Tabel. 3.8.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015**
A	Penerimaan Pembiayaan	31.101,77	62.902,72	35.934,74	20.528,23	55.423,61
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	30.987,75	62.896,33	35.552,65	20.528,23	55.423,61
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	114,02	6,39	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	382,09	0,00	0,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	633,00	1.363,00	0,00	0,00	2.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	633,00	1.363,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	30.468,77	61.539,72	35.934,74	20.528,23	53.423,61

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015

Untuk memperoleh kinerja pembiayaan daerah diperlukan beberapa analisis yang berkaitan dengan pembiayaan daerah, hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa akan datang analisa tersebut terdiri dari:

A. Analisis sumber penutup defisit rill

Analisis ini bertujuan untuk melihat gambaran masa lalu tentang kebijakan untuk menutup defisit rill anggaran pemerintah daerah. Dilihat pada Tabel 3.9, bahwa realisasi anggaran Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2011-2015, defisit anggaran hanya terjadi pada tahun 2012 dan 2013 dengan defisit anggaran sebesar Rp. 27,350,06 juta dan Rp. 15,450,90 juta namun defisit ini bisa tertutupi oleh SILPA Anggaran tahun lalu dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 realisasi antara pendapatan dengan belanja daerah sudah surplus, hal ini disebabkan karena terdapatnya kegiatan yang tidak terealisasi secara keseluruhan atau karena penghematan belanja maupun kelebihan dari realisasi pendapatan daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan SILPA tahun anggaran berkenaan yang mengalami peningkatan dari Rp. 55.473,08 juta pada tahun 2014 menjadi Rp.89,475,44 juta.

Surplus anggaran ini akan menyebabkan SILPA anggaran tahun berkenaan dan bisa digunakan untuk penutup defisit penganggaran tahun berikutnya.

Tabel. 3.9.
Analisis Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Pendapatan Daerah	439.490,04	461.402,66	515.127,84	630.492,37	739.447,81
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	396.297,36	487.389,72	530.578,74	595.547,53	703.395,98
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	633,00	1.363,00	0,00	0,00	2.000,00
A	Defisit riil	42.559,68	(27.350,06)	(15.450,90)	34.944,84	34.051,82
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	30.987,75	62.896,33	35.552,65	20.528,23	55.423,61
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	114,01	6,39	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	382,09	0,00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	31.101,77	62.902,72	35.934,74	20.528,23	55.423,61
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	73.661,45	35.552,65	20.483,85	55.473,08	89.475,44

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 (data diolah)

Tabel 3.10 dapat dilihat komposisi penutup dari defisit riil anggaran periode tahun 2011-2015. Pada periode tersebut realisasi anggaran Kabupaten Solok Selatan defisit hanya terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah cukup baik terutama pada tahun 2011, tahun 2014 dan tahun 2015 dimana realisasi pendapatan sudah dapat menutupi realisasi belanja daerah.

Tabel. 3.10.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	72.81	229.97	230.10	58.74	162.76
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.27	0.02	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 (data diolah)

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberikan komposisi pembentuk sisa lebih perhitungan anggaran. Pada Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa komposisi utama pembentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan periode tahun 2011-2015 penyebab utamanya karena terdapatnya kegiatan yang tidak terealisasi secara keseluruhan atau karena penghematan belanja dan pembiayaan daerah serta kelebihan dari realisasi pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun berkenaan dengan besaran belanja daerah Kabupaten Solok Selatan, maka besaran SILPA tahun berkenaan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dapat dikatakan cukup besar yaitu sekitar 10,36%.

Tabel. 3.11.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

No.	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	73,661.45	100%	35,552.65	100%	20,483.85	100%	55,473.08	100%	89,475.44	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD	(1,107.72)	-1.5%	(701.01)	-2.0%	(6,215.84)	-30.3%	(9,649.58)	-17.4%	3,861.63	4.3%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	1,807.92	2.5%	8,971.44	25.2%	(2,070.52)	-10.1%	2,210.11	4.0%	(5,632.26)	-6.3%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(2,924.78)	-4.0%	(21,251.40)	-59.8%	(17,849.71)	-87.1%	(2,124.36)	-3.8%	3,426.98	3.8%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	80,870.65	109.8%	44,736.13	125.8%	46,172.60	225.4%	64,992.53	117.2%	86,903.81	97.1%
6	Total penghematan pembiayaan	(4,984.62)	-6.8%	3,797.50	10.7%	447.32	2.2%	44.39	0.1%	915.28	1.0%

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 (data diolah).

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Pengeluaran mengikat bermakna pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun

anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang harus disediakan atau dikeluarkan karena kewajiban, pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Dari Tabel 3.12, dapat dilihat dari perkembangan dari pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Solok Selatan dari periode tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari Rp. 246.879,51 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 387.610,06 juta pada tahun 2015, atau mengalami peningkatan 57,00%. Peningkatan ini lebih disebabkan karena peningkatan dari belanja tidak langsung sebagai akibat dari peningkatan belanja gaji dan tunjangan pegawai, penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/KWDH dan transfer daerah ke Pemerintah Desa dan Partai Politik. Sedangkan untuk belanja langsung lebih disebabkan karena adanya peningkatan belanja rutin administrasi perkantoran, Kapitasi BPJS dan Belanja BLUD Rumah Sakit.

Sampai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak mempunyai pinjaman jangka panjang dan belum mempunyai dana cadangan yang dikarenakan belum adanya rencana kerja yang membutuhkan dana besar sehingga perlu dicadangkan pada beberapa tahun sebelumnya.

Tabel. 3.12.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung	207.053,43	222.073,78	239.965,42	273.273,08	317.499,16
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.598,10	204.066,17	220.825,01	251.876,18	283.823,54
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.949,26	3.537,66	3.504,63	3.675,23	4.133,45
3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
4	Belanja Bagi Hasil Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	7.506,07	14.469,95	15.635,77	17.721,66	29.542,17
B	Belanja Langsung	39.193,08	43.235,13	51.974,29	61.795,23	68.110,90
1	Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.606,33	27.363,24	34.877,06	37.981,55	35.255,86
2	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.941,38	9.302,32	8.024,20	8.119,82	8.187,98
3	Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur	877,69	951,08	975,55	1.325,12	903,26
4	Kapitasi BPJS	0		995,57	5.568,06	6.438,47
5	Kapitasi BLUD	0	0	0	0	12.660,92

6	Belanja Penyelenggaraan Sekolah	2.433,87	2.800,93	3.913,07	2.817,10	1.554,26
7	Belanja Operasional Puskesmas	703,83	672,38	723,98	1.045,08	752,69
8	Belanja Jasa Dokter Umum, Spesialis non PNS, Reveral, Jaga dan perawat di Rumah Sakit Daerah	1.629,97	2.145,17	2.464,87	4.938,50	2.357,45
C	Pembiayaan Pengeluaran	633,00	1.363,00	0	0	2.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0
3	Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah	633,00	1.363,00	0	0	2.000,00
	TOTAL (A+B+C)	246.879,51	266.671,92	291.939,71	335.068,31	387.610,06

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011-2015 (data diolah)

3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016-2021

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi yang telah ditetapkan, maka untuk lima tahun ke depan diperlukan peningkatan pendapat daerah yang lebih besar. Peningkatan ini sangat dimungkin karena dilihat dari kinerja keuangan daerah selama periode 2011-2015 memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat dan terkendali. Oleh sebab itu berdasarkan potensi yang dimiliki dan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah, perlu dibuat proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta proyeksi belanja wajib mengikat serta belanja prioritas.

Berdasarkan trend dan analisa terhadap potensi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.13. Untuk total pendapatan daerah diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 775.840,91 Juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.201.162.84 juta, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,17%. Peningkatan tertinggi masih diharapkan berasal dari dana perimbangan yaitu dari Rp. 614.603,04 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 966.679.20 juta pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,53%, diikuti oleh peningkatan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,25%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah periode Tahun 2016-2021 relatif kecil hanya sebesar 3,56%.

Jika dilihat proyeksi pendapatan daerah, komposisi pembentuk pendapatan daerah utama pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan masih bersumber dari dana perimbangan dengan rata-rata yaitu sebesar 80.18%, dengan pos utama yaitu Dana Alokasi Umum Daerah dan Dana Alokasi Khusus Daerah.

Meskipun peran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan dalam pembentukan pendapatan daerah relative kecil yaitu rata-rata 4,92%. Namun Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus berusaha meningkatkan kemandirian dalam penyediaan sumber pendanaan pembangunan daerah melalui peningkatan penerimaan yang berasal dari PAD.

Peningkatan penerimaan tersebut dilakukan melalui peningkatan sumber-sumber penghasil PAD namun tetap mempertimbangkan kewenangan, landasan hukum dan aspek yang ditimbulkan terhadap perkembangan perekonomian terutama pada sektor rill.

Secara umum kebijakan peningkatan pendapatan daerah periode tahun 2016-2021 dilakukan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi data objek pajak dan wajib pajak.
2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional seperti penerimaan daerah bukan pajak.
4. Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola serta penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan.
5. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku.
6. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegiatan prioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah.
7. Peningkatan penerimaan pembiayaan daerah melalui penghematan anggaran tahun sebelumnya tanpa mengganggu pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dari Tabel 3.13 juga menggambarkan proyeksi belanja daerah periode tahun 2016-2021, dimana diperkirakan terdapat peningkatan belanja daerah yaitu dari Rp. 863.316,35 juta menjadi Rp. 1.245.102.46 juta dengan rata-rata pertumbuhan 7,60%. Peningkatan terjadi pada belanja tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan 10,69%. Peningkatan ini lebih disebabkan karena terjadinya peningkatan pada pos belanja pegawai dari Rp. 314.206,54 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 528.658,53 juta pada tahun 2021 dan peningkatan pos belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dari Rp. 76.107,40 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 122.571,74 juta pada tahun 2021. Peningkatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa lebih disebabkan karena komitmen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sedangkan untuk pos belanja langsung diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp. 461.296,62 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 577.371,00 juta pada tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan 4,60%. Pertumbuhan tertinggi diproyeksikan terjadi pada pos belanja barang dan jasa dengan rata-rata pertumbuhan 5,20%, pos belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan 5,16% dan belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan 4,21%. Jika dilihat pada tahun 2019-2021 diperkirakan terjadi pergeseran komposisi belanja daerah dimana komposisi belanja tidak langsung diperkirakan akan lebih besar dari pada belanja langsung. Hal ini disebabkan karena rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah lebih kecil dari pada rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung. Sehingga peningkatan pendapatan daerah tersebut akan tersedot penggunaannya untuk pemenuhan belanja tidak langsung. Secara umum kebijakan peningkatan belanja daerah periode tahun 2016-2021 diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja wajib mengikat terutama pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur serta operasional pelayanan dasar pemerintahan, pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan belanja hibah dan bantuan sosial yang ditujukan pada program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku
3. Pemenuhan kewajiban penganggaran keuangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa
4. Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat dan kebencanaan
5. Peningkatan belanja daerah dialokasikan untuk peningkatan pelayanan umum pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.
7. Penerapan Anggaran Berbasis Program dan Kegiatan (*money follow program*) prioritas yang terukur (*output, outcome dan benefit*) serta transparansi penggunaan anggaran (*e-governance*) dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel. 3.13.
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016-2021 (Rp. Juta)

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	44,626.32	45,849.91	47,560.50	49,344.88	51,206.81	53,150.28
1.1.1	Pajak Daerah	5,472.54	5,220.80	5,534.05	5,866.09	6,218.06	6,591.14
1.1.2	Retribusi Daerah	2,762.59	2,765.56	2,986.80	3,225.75	3,483.81	3,762.51
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan	1,914.00	2,009.70	2,110.19	2,215.69	2,326.48	2,442.80
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,477.18	35,853.85	36,929.46	38,037.35	39,178.47	40,353.82

1.2.	Dana Perimbangan	614,603.04	714,466.98	774,484.30	843,144.82	901,767.03	966,679.20
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21,934.63	24,128.09	25,334.49	26,601.22	27,931.28	29,327.84
1.2.2	Dana Alokasi Umum	453,580.38	544,296.45	598,726.10	658,598.71	707,993.61	763,217.11
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	139,088.04	146,042.44	150,423.71	157,944.90	165,842.14	174,134.25
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	116,611.56	131,742.95	142,593.88	154,413.73	167,293.59	181,333.36
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.77	3,190.70
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34,142.48	35,849.61	37,642.09	39,524.19	41,500.40	43,575.42
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74,856.96	85,275.62	93,803.18	103,183.49	113,501.84	124,852.03
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7,612.12	7,992.73	8,392.36	8,811.98	9,252.58	9,715.21
	TOTAL PENDAPATAN	775,840.91	892,059.83	964,638.68	1,046,903.43	1,120,267.43	1,201,162.84
2	BELANJA						
2.1	Belanja Tidak Langsung	402,019.73	459,031.21	504,028.23	553,505.13	607,908.95	667,731.45
2.1.1	Belanja Pegawai	314,206.54	361,080.89	397,188.98	436,907.88	480,598.67	528,658.53
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	7,460.51	7,833.53	8,225.21	8,636.47	9,068.29	9,521.71
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.00	600.00	672.00	752.64	842.96	944.11
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	848.51	798.64	852.09	909.18	970.19	1,035.37
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	76,107.40	83,718.14	92,089.96	101,298.95	111,428.85	122,571.74
2.1.8	Belanja Tidak terduga	3,366.77	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.2	Belanja Langsung	461,296.62	471,297.13	499,518.90	533,731.49	553,913.62	577,371.00
2.2.1	Belanja Pegawai	19,138.06	19,903.59	20,754.99	22,612.71	23,541.91	24,596.04
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164,641.89	169,581.15	181,451.83	195,967.98	205,766.38	211,939.37
2.2.3	Belanja Modal	277,516.66	281,812.40	297,312.08	315,150.81	324,605.33	340,835.60
	TOTAL BELANJA	863,316.35	930,328.34	1,003,547.14	1,087,236.62	1,161,822.57	1,245,102.46
	Surplus/Defisit	(87,475.44)	(38,268.50)	(38,908.46)	(40,333.18)	(41,555.14)	(43,939.61)
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	91,475.44	41,768.50	42,408.46	43,833.18	45,055.14	47,439.61
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	89,475.44	41,768.50	42,408.46	43,833.18	45,055.14	47,439.61
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2,000.00	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3.2.2	Pembayaran Pinjaman Daerah	2,000.00	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	87,475.44	38,268.50	38,908.46	40,333.18	41,555.14	43,939.61
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : BPPKD dan Bappeda Litbang Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 6 (enam) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan harus mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Kabupaten Solok Selatan dalam periode tahun 2016 – 2021 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya tentang pajak dan retribusi daerah dan perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang. Analisis ini dilakukan dengan mengurangi total rencana pendapatan daerah setiap tahunnya dengan belanja dan pengeluaran, pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama yang merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan dasar pemerintahan.

Sedangkan pada Tabel 3.14 yang merupakan analisis dari kemampuan riil keuangan daerah, dapat dilihat terjadi peningkatan Kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan diperkirakan mengalami peningkatan dari Rp. 374.673,28 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 454.532,91 juta tahun 2021 atau mengalami rata-rata pertumbuhan 3,96%. Meskipun cenderung mengalami peningkatan namun jika dilihat dari kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, kemampuan keuangan ini relatif rendah. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu daerah pemekaran dan daerah tertinggal, Kabupaten Solok Selatan sangat memerlukan dana yang sangat besar dalam mengejar ketertinggalannya.

Tabel. 3.14.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2016 – 2021 (Rp. Juta)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan	775,840.91	892,059.83	964,638.68	1,046,903.43	1,120,267.43	1,201,162.84
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	89,475.44	41,768.50	42,408.46	43,833.18	45,055.14	47,439.61
	Total penerimaan	865,316.35	933,828.34	1,007,047.14	1,090,736.62	1,165,322.57	1,248,602.46
	Dikurangi:						

4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	490,643.07	555,482.64	607,016.09	665,416.74	726,381.79	794,069.54
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	374,673.28	378,345.70	400,031.05	425,319.88	438,940.78	454,532.91

Sumber Data : BPPKD dan Bappeda Litbang Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

Dari Tabel 3.15 dapat dilihat proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam pendanaan program pembangunan daerah, dimana diperkirakan terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari Rencana Alokasi Pendanaan Prioritas I yang merupakan belanja wajib dan mengikat yaitu dari Rp. 490.643,07 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 794.069,54 juta pada tahun 2021 atau mengalami rata-rata pertumbuhan 10,12%. Sedangkan untuk Proyeksi Pendanaan Prioritas II yang merupakan Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah juga mengalami peningkatan dari Rp. 363.816,00 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 454,532.91 juta pada tahun 2021 atau mengalami rata-rata pertumbuhan 3.96%. Sedangkan untuk proyeksi pendanaan prioritas III juga mengalami rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 7,61%, terutama pada pos belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat.

Tabel. 3.15.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2016 – 2021 (Rp. Juta)

No	Uraian	Proyeksi					
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
I	Kapasitas keuangan Daerah	865,316.35	933,828.34	1,007,047.14	1,090,736.62	1,165,322.57	1,248,602.46
	Dikurangi:						
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (Belanja Wajib Mengikat)	490,643.07	555,482.64	607,016.09	665,416.74	726,381.79	794,069.54
1.a	Belanja Tidak Langsung	391,162.45	445,597.67	490,131.03	539,116.02	592,997.70	652,265.64
1.b	Belanja Langsung	97,480.62	106,384.97	113,385.06	122,800.72	129,884.09	138,303.91
1.c	Pengeluaran Pembiayaan	2000.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	374,673.28	378,345.70	400,031.05	425,319.88	438,940.78	454,532.91
	Dikurangi:						
III	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II (Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah)	363,816.00	364,912.17	386,133.84	410,930.77	424,029.53	439,067.09
3.a	Belanja Langsung	363,816.00	364,912.17	386,133.84	410,930.77	424,029.53	439,067.09
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I dan II (I-II-III)	10,857.28	13,433.53	13,897.21	14,389.11	14,911.25	15,465.82
	Dikurangi:						

IV	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	10,857.28	13,433.53	13,897.21	14,389.11	14,911.25	15,465.82
4.a	Belanja Hibah	7,460.51	7,833.53	8,225.21	8,636.47	9,068.29	9,521.71
4.b	Belanja Bantuan Sosial	30.00	600.00	672.00	752.64	842.96	944.11
4.c	Belanja Tidak Terduga	3,366.77	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Surplus Anggaran Rill Berimbang (I-II-II-IV)	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : BPPKD dan Bappeda Litbang Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

Selanjutnya Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa komposisi pendanaan pembangunan daerah masih didominasi oleh belanja wajib mengikat yang merupakan anggaran wajib yang harus disediakan dalam rangka menjalankan pemerintahan dan kewajiban pemerintah kepada nagari dan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan rata-rata 60,57% sedangkan pendanaan prioritas II hanya sebesar 38.11% dan prioritas III sebesar 1,31%. Masih relatif kecilnya pendanaan prioritas II disebabkan karena sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pusat yang penggunaannya sudah ada ketentuan prioritas penggunaannya.

Tabel. 3.16.
Komposisi Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
per Prioritas Daerah Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2016 – 2021 (Rp Juta)

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Prioritas I	490,643	57	555,483	59	607,016	60	665,417	61	726,382	62	794,070	64
Prioritas II	363,816	42	364,912	39	386,134	38	410,931	38	424,030	36	439,067	35
Prioritas III	10,857	1	13,434	1	13,897	1	14,389	1	14,911	1	15,466	1
Jumlah	865,316	100	933,828	100	1,007,047	100	1,090,737	100	1,165,323	100	1,248,602	100

Sumber Data : BPPKD dan Bappeda Litbang Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

BAB IV**PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan perumusan permasalahan dan menganalisa isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021. Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Hasil perumusan permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

4.2. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya (uraian gambaran umum kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaannya). Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan isu strategis diperoleh dengan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi pembangunan selama kurang lebih lima tahun yang lalu sehingga didapat permasalahan-permasalahan pembangunan tiap urusan pemerintah daerah serta analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya analisis lingkungan strategis secara detail dibahas pada Bab VI.

Salah satu kondisi strategis yang harus menjadi perhatian untuk perencanaan pembangunan lima tahun ke depan yaitu Kabupaten Solok Selatan masih berstatus sebagai Kabupaten tertinggal. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, dimana sebanyak 122 kabupaten di

Indonesia merupakan kabupaten tertinggal dan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten yang tertinggal di Provinsi Sumatera Barat bersama Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Definisi daerah tertinggal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional berdasarkan 6 (enam) kriteria yaitu; (1). Perekonomian masyarakat. (2). Sumber Daya Manusia. (3). Sarana dan prasarana. (4). Kemampuan keuangan daerah. (5). Aksesibilitas, dan (6). Karakteristik daerah.

Pembangunan kabupaten tertinggal merupakan amanat dari Nawa Cita ketiga Pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan dengan pola; desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, daerah tertinggal/kawasan timur Indonesia dan perbatasan, penataan Daerah Otonom Baru, dan Implementasi Undang-Undang Desa.

Pembangunan kabupaten tertinggal berbasis dengan potensi unggulan dan diselaraskan dengan karakteristik masing-masing daerah. Sedangkan pola penanganan daerah tertinggal pada tahun 2017 fokus terhadap 54 kabupaten untuk keluar dari status daerah tertinggal. Selanjutnya, pada tahun 2018, pemerintah fokus terhadap 80 kabupaten dan 74 kabupaten pada tahun 2019.

Penyebab utama ketertinggalan daerah adalah; rendahnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, minimnya pelayanan publik yang disebabkan karakteristik daerah, terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya pembangunan sumber daya manusia.

Saat ini Kabupaten Solok Selatan bertekad untuk keluar dari status daerah tertinggal pada tahun 2019. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4.3. Isu-Isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti.

Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) oleh Tim Penyusun RPJMD 2016-2021 dan perencana masing-masing SKPD, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Solok Selatan dijelaskan menurut urusan pemerintahan, yang selanjutnya dianalisa dan disinkronkan dengan masing-masing misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Hasil dari analisa tersebut disandingkan dengan isu-isu strategis nasional seperti tertuang dalam matriks berikut.

Tabel 4.1.
Permasalahan dan Isu Strategis Menurut Urusan Pemerintahan (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)

No	Aspek/Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih berstatus sebagai daerah tertinggal dengan urutan ke-35 pada tahun 2015 2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Solok Selatan yang ditandai oleh capaian IPM masih dibawah rata-rata Provinsi (IPM Solok Selatan 67,09, Provinsi Sumatera Barat 69,55/rangking 15) 3. Tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi, sulitnya mendapat pekerjaan, serta rendahnya kualitas dan terbatasnya keahlian tenaga kerja (Tingkat kemiskinan Solok Selatan 7,52% lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat 6,89). 4. Semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan penduduk (indek gini 0,384 tahun 2015) 5. Sektor perekonomian masih tergantung pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan (kontribusi pertanian 34,07% dan kontribusi pertambangan dan penggalian 10,13%) 6. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat terutama untuk pencapaian target Nasional melalui RPJMN, SDGs, seperti akses air minum dan sanitasi masyarakat, perumahan layak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana dasar serta pengembangan perekonomian yang berbasis pada keunggulan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah 2. Peningkatan kesejahteraan penduduk miskin melalui pengurangan biaya hidup penduduk, terutama bagi penduduk miskin.
II	Aspek Pelayanan Umum		

A	Fokus Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tuntasnya kebijakan pendidikan dasar 9 tahun yang dilihat dari rata-rata lama sekolah (7.98 Tahun pada tahun 2015) 2. Belum meratanya pendistribusian guru serta rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari <i>subject knowledge</i> dan <i>pedagogical knowledge</i> pada seluruh tingkatan pendidikan (dilihat dari persentase guru yang bersertifikasi pendidik dan nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik) 3. Rendahnya ketersediaan, mutu dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (dilihat dari ketersediaan mobiler, alat peraga pendidikan, labor, pustaka, dan pagar; untuk mutu dan kualitas adalah ruang kelas, sanitasi sekolah dll) yang disebabkan rendahnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi belajar (rasio bangunan sekolah kondisi baik SD/MI 75,52%, SMP/MTs 80,25%, SMA/SMK/MA 76,95) 4. Belum adanya sistem rayonisasi sekolah sebagai akibat tidak meratanya kualitas sekolah yang akhirnya menyebabkan pendistribusian murid tidak merata. 5. Masih relatif tingginya lulusan sekolah di berbagai tingkatan pendidikan yang tidak melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi (Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 96,03% dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 94,61%). 6. Masih rendahnya kualitas dan mutu lulusan di berbagai tingkatan pendidikan yang dilihat nilai rata-rata Ujian Nasional. 7. Rendahnya daya saing lulusan SMA/SMK/MA yang dilihat dari lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana, prasarana dan pendanaan pendidikan (khususnya mengurangi biaya penyelenggaraan pendidikan), serta peningkatan aksesibilitas ke sarana pendidikan. 2. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penerapan sistem rayonisasi penerimaan murid yang bertujuan agar terciptanya pemerataan murid dan kualitas sekolah 3. Pemenuhan pelayanan pendidikan inklusi pada berbagai tingkatan pendidikan

		<p>8. Terbatasnya kemampuan sekolah umum dalam menerapkan pendidikan inklusi pada berbagai tingkatan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas dan PMKS</p> <p>9. Relatif tingginya biaya pendidikan yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksesibilitas masyarakat kesarana pendidikan (akibat keterbatasan sarana perhubungan).</p> <p>10. Rendahnya prestasi siswa baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.</p> <p>11. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan di sekolah-sekolah madrasah swasta (MI, MTSn, MA).</p>	
2	Kesehatan	<p>1. Masih rendahnya angka harapan hidup penduduk (tahun 2015 yaitu 66,4 tahun berada dibawah rata-rata provinsi Sumatera Barat yaitu 68,66)</p> <p>2. Masih rendahnya rasio ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan (dokter dan tenaga keperawatan) terutama bagi fasilitas kesehatan tingkat I.</p> <p>3. Rendahnya mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (fasilitas kesehatan tingkat I belum terakreditasi).</p> <p>4. Belum Optimalnya pelayanan Rumah sakit Umum daerah sebagai rujukan awal terutama perihal ketersediaan dokter spesialis tetap serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan (RSU masih tipe C).</p> <p>5. Besarnya ketergantungan masyarakat terhadap jaminan kesehatan masyarakat yang berasal dari pemerintah yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat arti penting atau perlunya jaminan kesehatan (54,31% dari jumlah penduduk)</p> <p>6. Masih tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan dan Angka Kematian Bayi sebagai akibat masih tingginya kelahiran</p>	<p>1. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan berkualitas serta peningkatan akreditasi dan tipe sarana kesehatan.</p> <p>2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan melalui Peningkatan media promosi kesehatan terutama yang berkaitan dengan penanganan AKI, AKB, BBLR, Gizi Buruk, PHBS serta penanganan penyakit menular.</p>

		<p>yang ditolong oleh tenaga nonmedis dan rendahnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya (pada tahun 2015 AKB sebesar 5,2 per 1000 dan AKI sebesar 161,2 per 100.000 kelahiran hidup)</p> <p>7. Masih terdapatnya kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), gizi buruk sebagai akibat rendahnya pemahaman keluarga terutama ibu tentang gizi anak (tahun 2015 sebesar 0,04% dari balita)</p>	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1. Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak dan kurang baik (jalan kabupaten/Prov/Negara/non status (jalan kondisi baik 20,10%)</p> <p>2. Masih banyaknya jalan lingkungan yang ber kondisi rusak.</p> <p>3. Banyaknya saluran irigasi yang rusak.</p> <p>4. Masih banyaknya kawasan persawahan yang belum memiliki irigasi non teknis) saluran irigasi yang belum dibangun.</p> <p>5. Belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi</p> <p>6. Rendahnya akses air minum layak dan sanitasi layak (pada tahun 2015 akses sanitasi layak 27,45% akses air minum layak 54,73%).</p> <p>7. Belum adanya rencana pengembangan infrastruktur berbasis kawasan yang didasarkan pada pola ruang (termasuk kawasan ibukota kabupaten).</p> <p>8. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan ruang.</p> <p>9. Masih sering terjadi konflik pemanfaatan ruang (tumpang tindih izin antar perusahaan, antara perusahaan dan masyarakat, deforestasi).</p> <p>10. Lemahnya sinkronisasi penataan ruang terhadap pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>1. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar (Bangunan Perkantoran, Jalan, Irigasi dan sanitasi).</p> <p>2. Optimalisasi Perizinan serta pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada tata ruang.</p> <p>3. Peningkatan penegakan batas wilayah.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Penegasan tapal batas wilayah (Kabupaten, Kecamatan, Nagari). 12. Masih ada beberapa daerah atau nagari yang terisolir karena tidak adanya akses jalan dan jembatan (Sungai Sirih - Simancuang, Sapan Salak-Pakan Rabaa, Lubuk Ulang Aling). 13. Belum tuntasnya masalah penegasan batas antara kabupaten, kecamatan dan nagari. 	
4	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya rumah tidak layak huni (sebanyak 1.800 unit pada tahun 2015). 2. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan (seperti tempat sampah, drainase lingkungan, MCK, septik tank komunal, IPAL komunal, jalan lingkungan perumahan). 3. Rendahnya minat masyarakat untuk memiliki rumah sehat dan bersih yang dibangun pengembang. 4. Kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan bencana, kelaikan fungsi bangunan gedung). 5. Kurangnya penanganan kawasan kumuh. 6. Masih kurangnya RTH di kawasan perkotaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat sesuai dengan tata ruang. 2. Peningkatan penertiban dan pengawasan bangunan gedung dan penataan lingkungan permukiman dan perkotaan. 3. Peningkatan penanganan kawasan kumuh.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kasus kriminalitas. 2. Belum efektifnya penegakan hukum 3. Rendahnya koordinasi antar SKPD dan instansi yang terkait dengan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. 4. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ideologi negara, wawasan kebangsaan dan belanegara. 5. Belum terkelolanya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penanganan kasus kriminalitas dan efektifitas penegakan hukum. 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ideologi negara, wawasan kebangsaan. 3. Peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi. 4. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

		<p>tekait dengan mitigasi bencana.</p> <p>7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur tentang mitigasi bencana dan penanganan bencana (pembentukan dan optimalisasi fungsi Destana dan KSB).</p> <p>8. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam (banjir, longsor, gempa).</p> <p>9. Belum adanya Road Map tentang penanganan bencana alam.</p>	
6	Sosial	<p>1. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (pada tahun 2015 secara berurutan yaitu fakir miskin (19.095 orang), keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni (1.800 KK), wanita rawan sosial ekonomi (1.319 orang), korban akibat bencana alam dan musibah lainnya (356 orang), bekas narapidana (267 orang), penyandang cacat (211 orang), lanjut usia terlantar (100 orang) dan anak terlantar (44 orang). Disamping itu, data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang harus menjadi perhatian meskipun masih dalam angka relatif kecil yaitu masalah penderita HIV/AIDS, anak nakal korban narkoba dan anak yang menjadi korban kekerasan atau perlakuan salah).</p> <p>2. Meningkatnya jumlah PMKS yang diakibatkan karena peningkatan tingkat kemiskinan dan Bencana Alam.</p> <p>3. Belum Optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat</p> <p>4. Rendahnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesejahteraan sosial.</p>	Peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dengan menurunkan beban biaya hidup penduduk miskin dan PMKS melalui pengadaan perlindungan sosial terhadap penduduk miskin.
B	Fokus Pelayanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	<p>1. Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu 6,30% pada tahun 2015 yang disebabkan perluasan kesempatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.</p> <p>2. Belum optimalnya fungsi Bipartit ketenagakerjaan.</p> <p>3. Kurangnya pengawasan dan</p>	<p>1. Peningkatan pertumbuhan lapangan kerja untuk menampung peningkatan angkatan kerja.</p> <p>2. Belum sinerginya pengembangan pendidikan dengan kebutuhan keahlian tenaga kerja oleh dunia usaha serta belum tersedianya Balai</p>

		<p>perlindungan terhadap tenaga kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar. 5. Belum memadainya sistem informasi ketenagakerjaan. 	<p>Latihan Kerja (BLK) bagi pengembangan keahlian tenaga kerja.</p>
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2. Tingginya dikriminasi dan eksploitasi anak 3. Masih rendahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. 4. Belum optimalnya peran lembaga pengarusataan gender dan anak dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. 5. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan. 6. Kurangnya kebijakan daerah yang mengatur kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, sehingga implementasi kebijakan masih dilakukan secara parsial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan regulasi dan kebijakan untuk pengarusataan gender dan perlindungan anak. 2. Peningkatan sinergi dan integrasi program pengarusataan gender dan perlindungan anak. 3. Peningkatan peran perempuan dalam proses pembangunan.
3	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya tingkat kerawanan pangan (akibat produksi pangan, distribusi pangan) dan gizi yang disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, bencana, menurunnya produksi pertanian yang diakibatkan oleh kesuburan tanah, hama, irigasi, bekurangnya minat generasi muda terhadap pertanian dan spesifikasi wilayah seperti wilayah SBH dan SBJ yang cenderung untuk perkebunan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi (distribusi pangan antar wilayah). 2. Kurang meratanya konsumsi bahan pangan utama terutama bahan-bahan pangan yang ketersediaannya tergantung pada lokasi geografis. 3. Belum beragamnya pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 4. Belum terjaminnya tingkat keamanan pangan masyarakat (berkaitan dengan pengawet). 5. Kurangnya regulasi daerah tentang ketahanan pangan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penanggulangan kerawanan pangan, keamanan pangan dan gizi. 2. Peningkatan informasi tentang ketersediaan dan keaneka ragaman pangan. 3. Peningkatan regulasi ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan

		lahan pertanian berkelanjutan.	
4	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik (persentase tentang luas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik). 2. Sulitnya sertifikasi tanah ex Erpacht untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. 3. Penyelesaian konflik HGU dan tanah terlantar untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat (perubahan sertifikat HGU dan penerbitan sertifikat baru). 4. Ketidakjelasan regulasi tentang pengelolaan Tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan dan investasi. 5. Sulitnya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sertifikasi tanah untuk kepastian hukum dan peningkatan nilai ekonomi. 2. Peningkatan penyelesaian sengketa per tanahan dan lahan termasuk kepastian regulasi tanah ulayat. 3. Percepatan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan
5	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga. 2. Banyaknya kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan akibat maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI). 3. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah bencana. 4. Kurangnya ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup yang dapat diakses masyarakat. 5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup. 6. Belum lengkapnya regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 7. Banyaknya ex lokasi investasi pertambangan, kehutanan yang belum dipulihkan/reklamasi. 8. Belum optimalnya fasilitasi dan sinergi pemerintah daerah dengan komunitas penggiat lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan layanan dan pengelolaan persampahan. 2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. 3. Peningkatan pengawasan dan perlindungan kawasan lindung. 4. Peningkatan kegiatan reklamasi eks pertambangan dan kehutanan. 5. Peningkatan implementasi regulasi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. 6. Peningkatan sinergitas pemerintah daerah dengan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan terutama bagi daerah terpencil, perbatasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap

		<p>Kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. 3. Rendahnya Aksesibilitas Masyarakat dalam Kepengurusan Dokumen Kependudukan. 4. Belum terkoneksi jaringan antaran pelayanan administrasi kependudukan dengan pelayanan PATEN di kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kependudukan dengan dengan PATEN.
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan daerah. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan seiring menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat diperantauan dalam mendorong kemajuan daerah dan nagari. 4. Masih rendahnya kapasitas dan sumberdaya lembaga pemberdayaan masyarakat dan perangkat nagari dalam pembangunan Desa/Nagari. 5. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan Nagari kepada masyarakat. 6. Kurangnya kompetensi perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan serta keberlanjutan program pembangunan. 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB karena KB masih dianggap tabu serta jalur kekerabatan Minangkabau yang matrilineal sehingga keluarga belum berhenti menambah anak sebelum mendapatkan anak perempuan sebelum ada anak perempuan. 2. Tingginya angka kelahiran terutama pada rumah tangga miskin. 3. Meningkatnya Rumah Tangga Pra Sejahtera Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata. 4. Masih terbatasnya Kapasitas tenaga dan kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber KB. 2. Revitalisasi penyuluh KB dan peran kelembagaan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB. 4. Peningkatan jumlah keluarga sejahtera.

		<p>program KB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB. 6. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). 7. Rendahnya kepesertaan pasangan usia subur dalam ikut serta dalam program KB terutama partisipasi laki-laki. 	
9	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. 2. Berkurangnya kualitas prasarana perhubungan (rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman). 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang representative. 4. Moda transportasi AKDP ilegal (travel liar) lebih diminati oleh masyarakat daripada moda transportasi AKDP legal (bus). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur perhubungan. 2. Penyediaan moda transportasi umum yang layak dan legal.
10	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapatnya Blank Spot Area di kawasan pemukiman (berapa jorong yang belum tercover). 2. Belum terintegrasi sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Nagari (e-Government). 3. Masih minimnya infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, fax, free wi-fi area pada kawasan tertentu. 4. Kurangnya jumlah kelembagaan warung informasi dan telekomunikasi. 5. Minimnya pemanfaatan website solselkab.go.id dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi potensi daerah 6. Kurangnya edukasi penggunaan IT kepada masyarakat. 7. Belum adanya wadah pengaduan masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur IT (e-Gov). 2. Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan infrastruktur IT dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan (e-Government).

11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif (48,5% dari jumlah koperasi tahun 2015) karena lemahnya kelembagaan koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 2. Rendahnya semangat kewirausahaan yang ditandai dengan relatif kecilnya jumlah UMKM. 3. Belum optimalnya kemitraan antara UMKM, koperasi dengan lembaga lainnya. 4. Masih rendahnya SDM dalam inovasi, diversifikasi dan pengembangan produk sesuai permintaan pasar (jaminan mutu, standarisasi). 5. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi. 6. Belum tersedianya Master Plan kawasan industri (One Village One Product/OVOP). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran lembaga koperasi dan UMKM dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
12	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya aksesibilitas, infrastruktur jalan yang terbatas untuk menghubungkan kantong-kantong potensi dengan jalur utama (berkaitan dengan penanaman modal). 2. Terbatasnya ketersediaan sarana pendukung penanaman modal seperti hotel, restoran. 3. Regulasi daerah tentang penanaman modal serta pasca operasi (jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan) belum tersedia. 4. Belum <i>update</i>-nya SOP perizinan beberapa kewenangan sekaitan UU 23 Tahun 2014. 5. Masih lemahnya kepastian hukum berkaitan dengan status lahan (tanah ulayat). 6. Rendahnya kesadaran penanam modal memberikan laporan kegiatan penanaman modal, 8 dari 24 perusahaan, Tahun 2015. 7. Minimnya regulasi yang mengatur tentang Take over izin investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas kualitas dan kuantitas infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung jalan, telekomunikasi dan sarana hiburan sehingga menarik investor ke kabupaten Solok Selatan. 2. Peningkatan penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM di bidang penanaman modal dan perizinan. 3. Peningkatan iklim investasi melalui peningkatan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan (kemudahan birokrasi).

		8. Minimnya kepastian hukum dalam penanaman modal bagi investor.	
13	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses dan kesempatan bagi pemuda memperoleh pendidikan dan keterampilan. 2. Belum adanya bantuan modal dari Pemerintah untuk pengembangan kelompok usaha ekonomi pemuda produktif. 3. Rendahnya jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) generasi muda. 4. Meningkatnya angka pengangguran terutama pada usia produktif dan terdidik/ 5. Rendahnya partisipasi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam proses pembangunan. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga. 7. Belum optimalnya peran pemerintah dan organisasi olahraga dalam pembinaan serta pembibitan atlet yang berpotensi. 8. Rendahnya prestasi di bidang olahraga yang dilihat dari prestasi atlet dalam POPROV dan PON. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan kesempatan pemuda mendapat pendidikan dan latihan memasuki dunia kerja. 2. Peningkatan jiwa enterpreneurship generasi muda. 3. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan. 4. Peningkatan manajemen pengelolaan olahraga berprestasi.
14	Statistik	1. Lemahnya kemampuan aparatur di SKPD, Perangkat Nagari, dan Pengurus Lembaga/Organisasi dalam pengelolaan data base pada setiap SKPD, Pemerintahan Nagari dan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, dimana data dari entitas ini menjadi sumber data primer dalam penyusunan data base untuk evaluasi, pengendalian dan perencanaan pembangunan. Akibatnya pihak-pihak yang berwenang dan bertugas serta yang membutuhkan data mengalami kesulitan dalam mendapatkan data primer yang akurat. Sehingga sering muncul permasalahan dan perdebatan tentang ketidak tersediaan data dan tidak akuratnya data pada entitas yang menjadi sumber data primer.	Peningkatan ketersediaan data base yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

		2. Tidak tersedianya publikasi data untuk evaluasi, pengendalian dan perencanaan pembangunan pada waktu yang ditentukan (data tidak tersedia tepat waktu). 3. Belum semua publikasi data dilakukan secara on-line.	
15	Persandian	1. Belum dikelolanya pelayanan persandian 2. Tidak adanya penunjukan perangkat daerah yang mengelola urusan persandian.	Peningkatan pengelolaan layanan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengamanan data dan informasi pemerintahan.
16	Kebudayaan	1. Semakin melemahnya nilai solidaritas dan kekeluargaan, jiwa gotong royong serta nilai – nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat mudahnya akses informasi teknologi yang tidak sesuai dengan adat budaya dan agama. 2. Belum optimalnya pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan nilai dan situs cagar budaya local. 3. Rendahnya partisipasi generasi muda dalam pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya.	1. Penguatan dan pengamalan nilai agama, adat dan budaya melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, nilai adat dan budaya (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah). 2. Identifikasi situs cagar budaya dan optimalisasi pengelolaan kekayaan nilai dan keragaman budaya daerah.
17	Perpustakaan	1. Rendahnya minat baca 2. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan dan buku bahan bacaan di perpustakaan baik pustaka daerah maupun nagari. 3. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen koleksi perpustakaan. 4. Kurangnya jumlah perpustakaan sekolah yang representatif.	1. Peningkatan minat Baca Penduduk melalui peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi tenaga, dan kualitas layanan perpustakaan.
18	Kearsipan	1. Minimnya SKPD dan Nagari dalam pengelolaan arsip baku. 2. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan. 3. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah. 4. Rendahnya penataan arsip dan dokumen SKPD. 5. Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan kearsipan.	1. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga arsiparis. 3. Peningkatan pengelolaan arsip secara baku.
C	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	1. Belum optimalnya produksi hasil perikanan. 2. Rendahnya daya saing produk	Peningkatan produktifitas sektor perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana budidaya,

		<p>perikanan.</p> <p>3. Terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan.</p>	<p>pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>
2	Pariwisata	<p>1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang bersifat umum maupun berbasis keunikan dan kearifan local.</p> <p>2. Terbatasnya akses ke lokasi wisata</p> <p>3. Belum optimalnya promosi pariwisata.</p> <p>4. Kurangnya sinergi pemerintah daerah, pelaku dan masyarakat dalam pengembangan objek pariwisata.</p> <p>5. Belum maksimalnya pengelolaan Ikon wisata unggulan.</p> <p>6. Belum adanya event wisata unggulanyang masuk kalender tingkat regional maupun nasional.</p>	<p>1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis kekayaan, keunikan dan kearifan local (ecotourisme).</p> <p>2. Peningkatan promosi destinasi, ikon dan event pariwisata secara masif.</p> <p>3. Peningkatan sinergitas antar stakeholder dalam memajukan sektor pariwisata.</p>
3	Pertanian	<p>1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian</p> <p>2. Rendahnya kualitas SDM dan menurunnya minat anak muda dibidang pertanian dan perkebunan, karena penyelenggaran penyuluhan pertanian dan perkebunan belum optimal.</p> <p>3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana baik usaha pertanian dan maupun usaha perkebunan</p> <p>4. Lemahnya penguasaan inovasi teknologi pertanian dengan aspek-aspek sosial ekonominya, sehingga tingkat produktivitas pertanian dan perkebunan meningkat.</p> <p>5. Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan daerah.</p> <p>6. Belum adanya pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi.</p> <p>7. Belum adanya kepastian serapan pasar produk pertanian dengan tingkat harga menguntungkan petani.</p> <p>8. Belum optimalnya pengembangan kawasan peternakan.</p>	<p>1. Mempertahankan lahan pangan abadi untuk mengatisipasi alih fungsi dan berkurangnya lahan akibat bencana.</p> <p>2. Peningkatan Produksi, Produktivitas serta kualitas hasil pertanian, Perkebunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penyediaan sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi tepat guna.</p> <p>3. Peningkatan produksi, kualitas hasil perkebunan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi tepat guna.</p> <p>4. Peningkatan kualitas SDM petani dan penyuluh.</p>

		9. kurangnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembada daging dan telur, baik meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan. 10. Adanya berbagai kasus penyakit ternak dan ancaman penyakit ternak dari daerah lain. 11. Minimnya pengelolaan pasca panen hasil pertanian dan peternakan. 12. Berkurangnya areal pertanian akibat bencana alam. 13. Banyaknya jumlah kelompok tani yang tidak aktif. 14. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM Penyuluh Pertanian.	
4	Perdagangan	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar rakyat yang representatif. 2. Belum optimalnya pengawasan dan perlindungan konsumen. 3. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata. 4. Lambatnya pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan.	1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan. 2. Optimalisasi pengawasan dan perlindungan konsumen. 3. Terbangunnya sistem informasi perdagangan.
5	Perindustrian	1. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses industri, baik kecil maupun menengah karena belum ada standarisasi mutu hasil industri, sehingga daya saing masih rendah dibandingkan daerah lain. 2. Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri.	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan industri kecil dan menengah. 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas dari produk-produk hasil industri daerah
6	Transmigrasi	1. Kurang optimalnya perkembangan wilayah eks Unit Pemukiman Transmigrasi	1. Optimalisasi pengembangan kawasan eks UPT untuk percepatan pembangunan wilayah. 2. Perencanaan pengembangan kawasan kota baru di Eks UPT Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari.

Tabel 4.2.
Sandingan Isu Strategis RPJMN 2014-2019, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
dan RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2016-2021

No	ISU STRATEGIS		
	RPJMN (2014-2019)	RPJMD Provinsi Sumatera Barat (2016-2021)	RPJMD Kabupaten Solok Selatan (2016-2021)
1	Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara	Peningkatan pelaksanaan revolusi mental dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan (8)	Pelaksanaan revolusi mental dalam kehidupan bermasyarakat melalui penguatan dan pengamalan filosofi <i>adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.</i> (8)
2	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan implementasi kesalehan sosial dalam hidup bermasyarakat terutama dalam mengatasi dan menangani masalah sosial (9)	Peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat. (5)
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	Mengoptimalkan fungsi kelembagaan agama dan adat dalam penanganan masalah social dan kemasyarakatan (9)	Pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada pemenuhan kesetaraan gender, responsif difabel, serta perlindungan anak dan perempuan. (1)
4	Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah ditengah kehidupan bermasyarakat (8)	Tingkat kemiskinan Tinggi Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran (5) (6)
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN (4)	Meningkatnya angka pengangguran (5) (6)
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik (2)	Peningkatan partisipasi masyarakat (termasuk perantau) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan serta keberlanjutan program pembangunan. (2)
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic	Peningkatan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter dilandasi nilai-nilai agama dan adat budaya serta tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter (5)	Peningkatan kapasitas dan tata kelola Pemerintahan Nagari dan Lembaga Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. (3)
8	Revolusi karakter bangsa	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan (5)	Revitalisasi kelompok usaha ekonomi masyarakat (kelompok tani, UMKM, IKM, Lembaga Keuangan Mikro, koperasi, dll) dalam pembangunan (6) (7)
9	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Peningkatan pemanfaatan dan penerapan hasil iptek dalam penyelenggaraan pembangunan	Peningkatan peran organisasi/lembaga masyarakat dalam pembinaan potensi lokal di

		daerah (6)	bidang olahraga, seni dan budaya (6)
10		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (5)	Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sehat (9)
11		Optimalisasi penerapan kesetaraan gender dalam semua sektor pembangunan (1)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana (1)
12		Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan serta daya saing komoditi pertanian (7)	Peningkatan pengelolaan SDA secara profesional dan berwawasan lingkungan. (7)
13		Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan usaha masyarakat (7)	Peningkatan tata pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip <i>good and clean goverment</i> (2)
14		Mempercepat dan meningkatkan pengembangan usaha kepariwisataan (7)	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Dasar secara proporsional sesuai tata ruang (7)
15		Percepatan penanganan penduduk miskin, pengangguran dan daerah tertinggal (6)	Peningkatan Kualitas SDM (5)
16		Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik (3)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Sosial Lainnya (5) (7)
17		Peningkatan pemanfaatan potensi energy baru dan terbarukan serta cakupan pelayanan listrik kepada masyarakat (7)	
18		Pengurangan resiko dan penanggulangan bencana serta pemulihan daerah yang terkena bencana (1)	
19		Melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan (7)	

Ket: Tanda () yang sama dengan nomor isu strategis RPJMN 2014-2019 berarti memiliki keterkaitan isu

BAB V**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan visi misi Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021, yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan H. Muzni Zakaria-H.Abdul Rahman yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan untuk periode 2016-2021 pada tanggal 22 Maret 2016.

5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan visi dapat dilakukan melalui cara pengumpulan informasi mengenai keadaan daerah melalui informasi normatif, informasi visioner, dan informasi teknis. Berikut merupakan rumusan dan penjelasan visi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021:

‘TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS’.

Penjelasan Visi:

1. **Masyarakat Sejahtera** ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
2. Kemajuan-kemajuan yang ingin dicapai diatas, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Tetapi hal ini juga didukung dengan **Masyarakat yang Religius**, sehingga kemajuan- kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat;
3. Menurunkan angka kemiskinan;
4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD;
6. Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional;
8. Meningkatkan kualitas SDM;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.

Dari sembilan misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Intisari misi tersebut difokuskan kepada empat prioritas sebagai berikut:

1. **Religius** berkaitan dengan Misi Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat (Misi 1).
2. **Infrastruktur** berkaitan dengan Misi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional dan Misi Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya (Misi 7 dan Misi 9).
3. **Pelayanan Publik** berkaitan dengan Misi (Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat, Misi Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, Misi Penegakan supremasi hukum dan demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas SDM (Misi 2, Misi 3, Misi 6 dan Misi 8).
4. **Perekonomian yang didorong Sektor Pariwisata** berkaitan dengan Misi Memberdayakan dan Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup dan Misi Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD (Misi 4 dan Misi 5).

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan mengenai kinerja yang diinginkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan misi pembangunan. Sedangkan sasaran adalah target atau sesuatu yang diinginkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021 dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut. Sesuai dengan misi diatas, tujuan dan sasaran pembangunan serta keterkaitannya dapat dilihat dalam Matrik 5.1. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran menunjukkan sinkronisasi elemen-elemen perencanaan. Hal ini penting dilakukan untuk mengeliminir tumpang tindih antar elemen perencanaan sehingga dapat fokus dalam mewujudkan tujuan akhir RPJMD.

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat.	Mewujudkan masyarakat yang religius berdasarkan filosofi <i>adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.</i>	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat tentang Ajaran Agama.	Peringkat Kabupaten pada MTQ Nasional Tingkat Provinsi
				Persentase Penduduk Bekerja yang Membayar Zakat melalui BAZNAS
				Persentase guru TPA/MDA yang bersertifikasi (minimal 1 perjorong)
				Persentase TPA/MDA yang terakreditasi (lembaga)
				Persentase Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (Full Desain)
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat.	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan.	Meningkatnya kapasitas lembaga Agama dan Adat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
				Jumlah Situs Cagar Budaya yang ditetapkan
				Nilai Rata-Rata Ujian Kompetensi Guru - PAUD - SD/MIN/SDLB - SMP/MTs
				% guru yang bersertifikasi pendidik - PAUD - SD/MIN/SDLB - SMP/MTs
				APM (%) - SD/MI - SMP/MTs
				Persentase Sekolah yang terakreditasi - SD/MI

				- SMP/MTs
				Angka Melanjutkan (%)
				- SD/MI - SMP/MTs
				Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan Inklusif SD/MI SMP/MTs
		Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.	Meningkatnya pemerataan sumber daya dan manajemen kesehatan.	% Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan
				% Prevalensi Gizi Buruk
				Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
				Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 KH
				Visite Rate (rata-rata kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan)
				Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Menular per 100.000 penduduk: 1. DBD 2. TB 3. Diare 4. HIV 5. Acute Flacid Paralysis
			Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat.	Persentase rumah penduduk yang memiliki jamban sehat
				Persentase Penduduk yang mengakses air minum sehat
				Penghargaan Tatanan Kabupaten/Kota Sehat (Swastisaba)
				Persentase Jorong Open Defecation Free (ODF)
		Mewujudkan pembangunan yang berpihak pada pemenuhan kesetaraan gender, responsif difabel, serta perlindungan anak dan perempuan.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Responsif difabel dan perlindungan anak dan perempuan	Indeks pembangunan Gender (<i>Gender Development Index</i>)
				Persentase gedung pemerintahan yang responsif difabel
3.	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.	Menurunkan jumlah rumah tangga miskin dan angka pengangguran.	Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan program-program pengentasan kemiskinan (<i>Poverty Alleviation</i>)	Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM)
				Jumlah wirausahawan baru (Orang)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
				Tingkat Pengangguran (%)
4.	Memberdayakan dan	Meningkatkan partisipasi	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dalam	Persentase Rata -Rata Alokasi Dana Desa

	meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup.	masyarakat (termasuk perantau) dan lembaga masyarakat dalam pembangunan.	pembangunan.	Persentase Nagari Mandiri (Desa Swasembada)
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi.	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang ekonomi.	Perkembangan Badan Usaha Milik Nagari 1. Persentase Nagari yang Memiliki BUMNAG 2. Persentase Badan Usaha Milik Nagari Aktif (%)
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial dan budaya.	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang sosial budaya.	Peringkat Kabupaten pada PORPROV
				Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan ➤ % Kepemilikan KTP ➤ % Kepemilikan Akta Kelahiran ➤ % Kepemilikan Akte Perkawinan (Non Muslim)
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam program Keluarga Berencana 1. Jumlah PUS sebagai akseptor KB (orang) 2. % PUS sebagai Akseptor KB melalui program pemerintah 3. % PUS sebagai Akseptor KB melalui program mandiri
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.	Meningkatnya partisipasi di bidang Lingkungan Hidup.	% Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana.	Persentase nagari tangguh bencana (Nagari)
5.	Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD.	Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah.	Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian.	Produktivitas Komoditi Unggulan Pertanian (ton/Ha) ➤ Padi ➤ Jagung ➤ Kopi ➤ Karet ➤ Kelapa Sawit
				Nilai Tukar Petani (%)
				Jumlah Produksi Ikan budidaya (Ton)
			Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata.	Jumlah objek pariwisata unggulan (Objek).
				Jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata 1. Wisatawan Asing 2. Wisatawan luar daerah 3. Wisatawan dalam daerah

			Meningkatnya pengelolaan sektor jasa dan perdagangan.	Persentase UMKM yang memiliki HAKI (lembaga)
			Meningkatnya pengelolaan energi baru dan terbarukan.	Persentase Potensi Listrik yang dikelola (PLTM)
6.	Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi.	Meningkatkan pengelolaan produk hukum daerah, kesadaran hukum dan penegakkan hukum.	Meningkatnya penataan produk hukum daerah, kesadaran hukum, penegakkan serta kepastian hukum.	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
				% Penyelesaian batas kecamatan (Kecamatan)
				% Penyelesaian batas nagari (Nagari)
				Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang
		Meningkatkan tata kelola pemerintah berbasis e-government menuju good and clean governance.	Meningkatnya pemanfaat sistem informasi manajemen berbasis IT dalam penyelenggaraan pemerintahan	Sistem informasi layanan publik berbasis IT (<i>online</i>)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan pemanfaatan sistem informasi	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat waktu (%)
				Nilai SAKIP
			Meningkatnya fungsi pengawasan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
				Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)
				% Penetapan Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) Pelayanan OPD
				Indek Kepuasan Masyarakat Untuk Pelayanan Publik
7.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Penanggulangan Bencana untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten.	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (%)
				% Jembatan Kabupaten dengan kondisi baik
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur keciptakarya.	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
				% Drainase dalam Kondisi Baik
				Akses Air Minum Layak (%)
				Akses Sanitasi Layak (%)
				Jumlah Kawasan Permukiman kumuh
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan/sumber daya	Luas Daerah Irigasi Kondisi baik (ha)

			air.	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur perhubungan.	% tingkat keberfungsian Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL)
			Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika.	Rasio Ketersediaan Angkutan umum
			Meningkatnya ketahanan energi.	Jumlah Kawasan Pemukiman yang <i>Blank Spot</i> (Titik)
			Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	% Rumah Tangga yang dialiri listrik (Rasio Elektrifikasi)
8.	Meningkatkan kualitas SDM	Mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas SDM dan berdaya saing.	Meningkatnya kualitas SDM dan daya saing masyarakat.	% Ketersediaan mobil pemadam kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
				% Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah
9.	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.	Meningkatkan aparat sipil negara (ASN) yang memiliki SDM berkualitas dan profesional.	Meningkatnya kualitas SDM dan profesionalitas ASN.	Angka Melek Huruf
				Umur harapan hidup
				Persentase Aparatur yang berijazah pasca sarjana (%)
				- S1
				- S2
		Mewujudkan sarana dana prasarana pendidikan, kesehatan dan prasarana sosial lainnya yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.	- S3
				% Aparatur yang menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat Jabatan struktural:
				Eselon II
				Eselon III
				Eselon IV
				% Bangunan Sekolah berkategori baik
				• SD/MI
				• SMP/MTs
				% RKB berkategori baik
				• SD/MI
				• SMP/MTs
				% Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana perpustakaan
				• SD/MI
				• SMP/MTs
				% Sekolah memiliki tempat ibadah (tempat shalat, musholla, mesjid)
				• SD/MI
				• SMP/MTs
				% Nagari yang memiliki

				Pustaka Nagari
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan.	% Puskesmas rawatan
				Akreditasi RSUD (Versi JCI)
				Rasio Puskesmas Terakreditasi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial lainnya.		% Nagari yang memiliki gelanggang/ sarana olahraga(minimal 1 per nagari)
				% Nagari yang memiliki Balai-Balai Adat dan Medan Nan Bapaneh

Analisa, 2016

Tujuan dan sasaran diatas dianalisis dengan menganalisa isu strategis seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang mencakup isu: 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), 2) Lingkungan, 3) Infrastruktur, 4) Revitalisasi Sektor Ekonomi Kreatif, Pertanian dan Pariwisata, 5) Kemiskinan dan Pengangguran, 6) Pendidikan dan Kesehatan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merupakan uraian strategi dan arah kebijakan daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan misi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya. Untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah kabupaten dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan atau ancaman (*threat*) secara bersama-sama.

SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan dengan asumsi berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bias diadakan perubahan atau dikelola (*manageable, controllable*), yang termasuk di dalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan, yang meliputi peluang dan ancaman.

Sebagaimana terlihat dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada bab sebelumnya, tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Solok Selatan adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Solok Selatan, tidak hanya masyarakat sejahtera, melainkan juga masyarakat yang religius.

Namun demikian, strategi yang diharapkan dalam RPJMD ini adalah strategi yang digunakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Solok Selatan. **Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021** sebagaimana terlihat dalam matrik berikut.

MATRIK STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN 2016-2021

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat.	T1. Mewujudkan masyarakat yang religius berdasarkan filosofi <i>adat basandi syara', syara' basandi kitabullah</i>	S1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan masyarakat tentang ajaran agama.	Stra1. Penerapan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta kegiatan keagamaan.	AK1. Meningkatkan fungsi lembaga pendidikan dan keagamaan sebagai sentral pembangunan masyarakat yang agamais dan moralis.
		S2. Meningkatnya kapasitas lembaga agama dan adat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Stra2. Peningkatan kualitas dan pelestarian warisan budaya serta tradisi lokal.	AK2. Mengembangkan dan memanfaatkan budaya dan kearifan lokal untuk mendukung pembangunan masyarakat yang agamais dan moralis.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat.	T1. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas.	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Stra1. Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.	AK1. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mampu memanfaatkan teknologi.
				AK2. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang terjangkau dari akses dan biaya.
				AK3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
	T2. Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat	S1. Meningkatnya pemerataan sumber daya dan manajemen kesehatan	Stra1. Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.	AK1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan AK2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan standarisasi.

		S2. Meningkatnya kemandirian jaminan kesehatan dan kualitas layanan kesehatan		AK3. Meningkatkan upaya preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
		S3. Meningkatnya Derajat Kesehatan		AK.4. Meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan.
		S4. Meningkatnya Pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Stra2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.	AK5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat
		S5. Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS)		
	T3. Mewujudkan pembangunan yang berpihak pada pemenuhan kesetaraan gender, responsif difabel, serta perlindungan anak dan perempuan.	S1. Meningkatnya Kesetaraan gender	Stra1. Peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan difabel, serta perlindungan perempuan.	AK1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan yang responsive gender, anak dan difabel
		S2. Meningkatnya Responsif difabel		
		S3. Meningkatnya Perlindungan anak dan Perempuan.		
3. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.	T1. Menurunkan jumlah rumah tangga miskin.	S1. Menurunnya beban biaya hidup rumah tangga miskin	Stra1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan program pengentasan kemiskinan (<i>Poverty Alleviation</i>).	AK1. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu.
		S2. Meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin		AK2. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
	T2: Menurunkan angka pengangguran	S1: Meningkatnya perluasan lapangan kerja.		AK3. Mengoptimalkan pengembangan tenaga terlatih <i>entrepreneur</i> melalui pelatihan dan pendidikan vocational bidang pariwisata, teknologi informasi, bisnis, pertanian, perikanan, dan energi.

		S2: Meningkatnya daya saing pencari kerja		AK4. Meningkatkan perluasan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi.
4. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup.	T1: Meningkatkan partisipasi masyarakat (termasuk perantau) dan lembaga masyarakat dalam pembangunan.	S1: Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dalam pembangunan	Stra1: Peningkatan pemberdayaan, kemandirian dan sinergitas antar kelompok masyarakat dalam pembangunan.	AK1: Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun nagari melalui budaya gotong royong
		S2. Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan		
	T2: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi.	S1 : Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang ekonomi	Stra1: Revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat dalam peningkatan pendapatan dan daya beli.	AK1: Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
	T3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial dan budaya	S1 : Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang sosial budaya	Stra1: Revitalisasi lembaga sosial budaya masyarakat dalam pengembangan seni, budaya dan olah raga.	AK1: Meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga sosial budaya dan olahraga.
			Stra2: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.	AK1: Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan catatan sipil. AK1: Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan KB bagi peserta KB baru dan KB aktif.
	T4: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik.	S1: Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang Politik	Stra1: Peningkatan kesadaran dan kecerdasan dalam berdemokrasi.	AK1: Meningkatkan perwujudan karakter dan identitas bangsa yang luhur berdasarkan nilai-nilai demokrasi.
	T5: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	S1: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Stra1: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.	AK1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
		S2: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana		AK2: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana

5. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional untuk peningkatan PAD.	T1 : Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah	S1 : Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian	Stra1: Peningkatan produksi dan produktivitas serta daya saing daerah menuju kemandirian berbasis ekonomi kerakyatan	AK1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan/ Kelompok tani (pertanian dan perkebunan)
				AK2: Meningkatkan luasan lahan produktif dan produksi komoditi pertanian dan perkebunan.
				AK3: Meningkatkan produksi komoditi pertanian dan perkebunan.
				AK4: Meningkatkan Penerapan Teknologi dan Pemasaran Hasil Komoditi Pertanian/Perkebunan.
				AK5: Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
				AK6: Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit serta produksi hasil peternakan
				AK7: Meningkatkan pemasaran dan penerapan teknologi hasil produksi peternakan.
				AK8: Meningkatkan ketahanan pangan
				AK9: Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi perikanan.
		S2. Meningkatnya diversifikasi produk pertanian, peternakan, perikanan dan produk non pertanian.	Stra1: Mengembangkan produk-produk unggulan pertanian, perikanan dan non pertanian.	AK1: Menumbuh kembangkan industri olahan pertanian (agro industri)
				AK2: Menumbuh kembangkan industri olahan non pertanian.
				AK3: Meningkatkan kerjasama daerah dalam pengembangan komoditi unggulan pertanian dan non pertanian
		S3 : Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata	Stra1: Pengembangan destinasi wisata yang memiliki differensiasi sesuai potensi daerah.	AK1: Percepatan pembangunan destinasi pariwisata sesuai potensi daerah dan kearifan lokal
				AK2: Meningkatkan kapasitas kelompok dan pelaku pariwisata.
				AK3: Meningkatkan promosi dan pelaksanaan event pariwisata.

		S4: Meningkatnya pengelolaan potensi sektor jasa dan perdagangan	Stra 1: Peningkatan Pengelolaan potensi sektor jasa dan perdagangan	AK1: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
				AK2: Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang
				AK3: Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pasar serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan
		S5 : Meningkatnya pengelolaan energi baru dan terbarukan	Stra1: Peningkatan pengelolaan sumber daya energi terbarukan yang berwawasan lingkungan	AK1: Meningkatkan pengembangan pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan.
6. Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi.	T1. Meningkatkan pengelolaan produk hukum daerah, kesadaran hukum dan penegakkan hukum.	S1: Meningkatnya penataan produk hukum daerah, kesadaran hukum, penegakkan serta kepastian hukum.	Stra1: Penataan produk hukum daerah dan peningkatan pelaksanaan supremasi hukum.	AK1: Membangun materi hukum dalam pembentukan produk hukum daerah dan supremasi hukum.
				AK2: Meningkatkan kapasitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
				AK.3 : Meningkatkan pemeliharaan Kantibmas, pencegahan tindak kriminal, keamanan lingkungan dan pemberantasan penyakit masyarakat.
			Stra2: Peningkatan penyelesaian masalah pertanahan dan tapal batas wilayah untuk meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan konflik, meningkatkan iklim investasi dan percepatan pembangunan sesuai arahan tata ruang.	AK1: Meningkatkan penataan wilayah pemerintahan, penyelesaian sengketa/ permasalahan batas wilayah.
				AK2: Meningkatkan penyelesaian kasus-kasus pertanahan.
				AK3: Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.

	T2: Meningkatkan tata kelola pemerintah berbasis e-government menuju good and <i>clean governance</i> .	S1. Meningkatnya pemanfaat sistem informasi manajemen berbasis IT dalam penyelenggaraan pemerintahan	Stra 1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan.	AK1. Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan e-Government.
				AK2. Meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah.
				AK3. Meningkatkan kelengkapan data dan statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan dan publikasi daerah.
				AK4. Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku melalui peningkatan kompetensi pengelola arsip OPD dan Unit kerja lainnya.
		S2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan pemanfaatan sistem informasi	Stra 1: Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporannya berbasis data sistem informasi.	AK1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan serta kerjasama pembangunan.
				AK2. Meningkatkan kompetensi aparat perencana dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporan yang berkualitas dan tepat waktu.
				AK 3: Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi (<i>e-analisis, e-planning, e dan e-monev</i>).
			Stra 2: Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah termasuk pengendalian dan pelaporannya menggunakan sistem informasi (<i>e-budgeting</i>).	AK4. Meningkatkan koordinasi perencanaan lintas sektor serta pengendalaian pelaporan yang berkualitas dan tepat waktu.
AK1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui sistem informasi (<i>e-budgeting</i>).				

		S3: Meningkatnya fungsi pengawasan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	Stra1: Peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	AK1: Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. AK2: Meningkatkan mutu pelayanan publik dalam rangka terwujudnya pelayanan prima, akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional.	T1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Penanggulangan Bencana untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.	S1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten	Stra 1: Peningkatan kuantitas, kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses transportasi sesuai tata ruang.	AK1: Meningkatkan kuantitas, kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan.
		S2: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur Keciaptakaryaan	Stra1: Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keciptakaryaan, perumahan dan permukiman sesuai arahan tata ruang.	AK1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keciptakaryaan, perumahan dan permukiman.
		S3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur pengairan/Sumber Daya air	Stra1: Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jaringan irigasi dan sumber daya air responsif bencana sesuai arahan tata ruang.	AK1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan jaringan irigasi dan sumber daya air.
		S4: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur perhubungan	Stra1: Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan sebagai upaya peningkatan layanan publik.	AK1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan
		S5: Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika	Stra1: Percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi berbasis IT.	AK1: Meningkatkan penggunaan jaringan informasi dan komunikasi.
		S6: Meningkatnya ketahanan Energi	Stra1: Percepatan ketahanan energi melalui pencapaian rasio eletrifikasi.	AK1: Meningkatkan ketahanan energi

		S7: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Stra1: Percepatan pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana.	AK1: Meningkatkan kesiapsiagaan dan cakupan layanan penanggulangan bencana.
	T2: Meningkatkan peran serta swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur prasarana dasar.	S1: Meningkatnya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur prasarana dasar	Stra1: Peningkatan kerjasama dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur prasarana dasar	AK1: Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur prasarana dasar.
8. Meningkatkan Kualitas SDM.	T.1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas SDM dan berdaya saing.	S.1. Meningkatnya kualitas SDM dan daya saing masyarakat.	Stra1: Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan	AK1: Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan.
			Stra2: Peningkatan daya saing masyarakat melalui pelatihan, magang, sharing informasi dll.	AK1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal. AK2: Menyelenggarakan pelatihan, magang dan sharing informasi bagi masyarakat usia produktif.
	T.2 Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki SDM berkualitas dan profesional.	S.1. Meningkatnya kualitas SDM dan profesionalitas ASN.	Stra1: Peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas ASN.	AK1: Pengembangan sistem rekrutmen dan penempatan berdasarkan analisis kebutuhan dan kompetensi.
				AK2: Meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan formal dan non formal berdasarkan analisis kebutuhan dan kompetensi.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.	T1: Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang berkualitas.	S1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.	Stra1: Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.	AK1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan beserta sarana penunjangnya.
		S2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	Stra1: Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	AK1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan beserta sarana penunjangnya

		kesehatan.		
		S3: Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana sosial lainnya.	Stra1: Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana sosial lainnya.	AK1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial lainnya dan sarana penunjangnya

BAB VII**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021, maka strategi merupakan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksanaannya. Pada tahap ini dibutuhkan kebijakan umum sebagai rujukan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Perumusan kebijakan umum ditujukan untuk memperoleh gambaran keterkaitan antara bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015

Arah kebijakan umum merupakan instrumen untuk mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati melalui strategi yang telah disebut di dalam Bab VI. Kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021 merupakan periode kedua bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati saat ini dan merupakan periode ketiga dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025. Berikut Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2015 sebagaimana diuraikan pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2011-2015**

NO	MISI	KEBIJAKAN UMUM
1	Meningkatkan Pengetahuan dan Pengamalan Ajaran Agama Bagi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat, kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama serta peningkatan kepedulian sosial masyarakat 2. Meningkatkan upaya revitalisasi terhadap lembaga pendidikan terutama pesantren sebagai sentra pembangunan masyarakat agamis yang moralis. 3. Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di mesjid seperti remaja mesjid, kegiatan ekonomi dan kesenian. 4. Mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan infak, sedekah, zakat, wakaf dan sumbangan lainnya untuk meningkatkan kemakmuran sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan.
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan dan Martabat Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendidikan yang merata terjangkau dari akses dan biaya 2. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, bermutu dan memiliki daya saing 3. Meningkatkan pendidikan berwawasan global dan berbudaya lokal 4. Meningkatkan keterjaminan memperoleh pendidikan 5. Meningkatkan pendidikan kesetaraan dan pendidikan inklusi 6. Meningkatkan pendidikan yang berdasarkan iman dan taqwa, serta menguasai teknologi dan informasi 7. Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai serta mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran 8. Meningkatkan lembaga pendidikan yang mandiri dan transparan dalam pengelolaan 9. Peningkatan layanan dan aparatur kependidikan. 10. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin 11. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan paramedis, terutama pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal 12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 13. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan daerah terpencil
3	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi 2. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik 3. Perbaikan administrasi dan catatan sipil 4. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat 5. Meningkatkan ketersediaan dan updating database kemiskinan (by name by addres) secara berkala. 6. Meningkatkan efektifitas penggunaan data kemiskinan (Data BPS). 7. Meningkatkan integrasi dalam tahapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan program penanggulangan kemiskinan. 8. Meningkatkan efektifitas TKPK Daerah. 9. Meningkatkan integrasi dan keterpaduan lembaga-lembaga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Nagari
4	Menumbuhkembangkan Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan proses pembangunan daerah berdasarkan ajaran agama dan budaya 2. Mengembangkan kelembagaan seni dan budaya melalui restrukturisasi dan reformasi 3. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana yang dapat memotivasi pengembangan seni dan budaya

5	Memberdayakan dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatkan bantuan dana bergulir dari APBD/APBN, perusahaan BUMN, perusahaan swasta nasional/asing dan sumber dana lainnya 3. Menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi UKM 4. Menyediakan fasilitas produksi bersama (<i>common service facilities</i>) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat 5. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor melalui pengembangan teknologi dan efisiensi produksi 6. Mendorong pengembangan kegiatan perdagangan melalui perbaikan dan pengembangan fasilitas pasar 7. Menyediakan fasilitas produksi bersama (<i>common service facilities</i>) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat 8. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor melalui pengembangan teknologi dan efisiensi produksi 9. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan 10. Membangun sistem ketahanan pangan hewani domestik 11. Merevitalisasi sistem kelembagaan dan pendekatan penyuluhan peternakan dan pedampingan terhadap peternak 12. Mengembangkan kelembagaan agribisnis pedesaan yang mampu meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif 13. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM pelaku usaha pertanian 14. Memberdayakan petani untuk penerapan teknologi dan informasi pertanian, peternakan 15. Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi 16. Mengembangkan kemitraan investasi dan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaku ekonomi industri berbasis pertanian
6	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Profesional yang berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM bidang budaya, pariwisata, dan olahraga. 2. Mempromosikan objek wisata. 3. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. 4. Melestarikan benda-benda cagar alam dan wisata sejarah. 5. Meningkatkan kualitas objek wisata dari aspek. 6. Menggiatkan pelaksanaan event-event pariwisata. 7. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan 8. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 9. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 10. Menumbuhkembangkan tingkat pemahaman ilmu pengetahuan mengenai lingkungan hidup ke semua unsur masyarakat, pengusaha dan pemerintah 11. Mendorong terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya alam 12. Meningkatkan kemampuan aparat 13. Meningkatkan pendapatan petani pekebun 14. Meremajakan tanaman karet rakyat 15. Meningkatkan akses modal petani 16. Membangun kemitraan perkebunan rakyat dengan perkebunan besar 17. Mendorong terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 18. Mendorong penggalan sumber energi alternative 19. Meningkatkan ketersediaan data sumberdaya mineral 20. Mengkoordinasikan usaha pertambangan dengan usaha lainnya 21. Mendorong terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 22. Mendorong penggalan sumber energi alternative 23. Meningkatkan ketersediaan data sumberdaya mineral 24. Mengkoordinasikan usaha pertambangan dengan usaha lainnya
7	Meningkatkan Supremasi Hukum dan Kesadaran Politik Masyarakat Serta Tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun materi hukum yang diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya 2. Menegakkan hukum yang berkeadilan 3. Membangun budaya hukum masyarakat sesuai sasaran yang ingin dicapai 4. Membenahi dan membina aparatur pemerintahan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 5. Memberdayakan pemerintahan nagari dalam rangka terwujudnya Pemerintahan Nagari yang mandiri 6. Meningkatkan mutu pelayanan publik dalam rangka terwujudnya pelayanan prima, akuntabel dan transparan dari aparatur 7. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (<i>good governance</i>)
8	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa yang representatif 2. Meningkatkan jumlah pembangunan kantor pemerintah daerah 3. Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana 4. Meningkatkan pengelolaan sanitasi kota (persampahan, air limbah dan drainase) 5. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan permukiman 6. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih 7. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah cepat tumbuh 8. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan

		<p>terpencil</p> <p>9. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan</p> <p>10. Mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan</p> <p>11. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif</p> <p>12. Menerapkan pola pembangunan oleh pihak ketiga/swasta dengan skema Public Private Partnership (PPP);</p>
9	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dasar	<p>1. Penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional</p> <p>2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi,</p> <p>3. Mewujudkan partisipasi pemerintah, swasta, dan BUMN dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar modal dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas;</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan</p> <p>6. Menciptakan sistem penyediaan yang menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta mencerminkan keinginan masyarakat terhadap keterbukaan telekomunikasi dan informasi.</p> <p>7. Menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi.</p> <p>8. Melaksanakan pengendalian sistem telekomunikasi dan informasi terhadap masyarakat.</p> <p>9. Meminimalkan ketimpangan pembangunan infrastruktur antara daerah kota dan perdesaan.</p> <p>10. Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur.</p> <p>11. Menyediakan informasi kepada masyarakat berupa papan informasi rawan bencana</p> <p>12. Menjalin kerjasama penanggulangan bencana dengan daerah sekitarnya.</p> <p>13. Melaksanakan pemetaan jalur evakuasi apabila terjadi bencana</p> <p>14. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan terhadap bencana</p>

7.2. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021

Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 merupakan keberlanjutan dari kebijakan umum daerah periode sebelumnya tahun 2011-2015. Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 terdiri dari 19 Tujuan, 35 Sasaran, 42 Strategi, 68 Arah Kebijakan, 202 Indikator Kinerja Program (Outcome).

Matrik Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan 2016-2021

Misi 1 mempunyai 2 Sasaran, 2 Strategi, 2 Arah Kebijakan dan 13 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS								
Misi 1: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat								
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat tentang Ajaran Agama dan Adat	Penerapan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta kegiatan keagamaan.	Meningkatkan fungsi lembaga pendidikan dan keagamaan sebagai sentral pembangunan masyarakat agamais dan moralis	% Organisasi Remaja Masjid dibina	0	80	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga
				Rata-rata lomba keagamaan tingkat kabupaten (kali)	4	6	Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama	(Keagamaan) Fungsi Penunjang
				Jumlah dai/mubaligh dibina	25	220		
				Peringkat Kabupaten pada MTQ Nasional Tingkat Provinsi	18	10		
				Sebagai Tuan Rumah MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Belum	Sudah		
				Persentase Penduduk Bekerja yang Membayar Zakat melalui BAZNAS	6,03	11,00	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial
				Persentase guru TPA/MDA yang bersertifikasi (minimal 1 perjorong)	0	50	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan
				Persentase TPA/MDA yang terakreditasi (lembaga)	0	50		
				Persentase kasus penyakit masyarakat yang tertangani (%)	N/A	100	1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (Full Desain)	0	100	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Meningkatnya kapasitas lembaga	Meningkatkan kualitas dan pelestarian warisan	Pengembangan dan pemanfaatan budaya	Persentase Lembaga adat yang menjalankan peran dan fungsinya:			Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Kebudayaan

	Agama dan Adat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.	budaya serta tradisi lokal	dan kearifan lokal untuk meningkatkan dan mendukung pembangunan masyarakat yang agamais dan moralis	1. KAN	N/A	100	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan
				2. LKAAM	N/A	100		
				3. Bundo Kandung	N/A	100		
				Jumlah Situs Cagar Budaya yang ditetapkan	0	25		
				Rata-rata Lomba/Festival /Event Budaya (kali/tahun)	0	4		

Misi 2 mempunyai 4 Sasaran, 4 Strategi, 8 Arah Kebijakan dan 33 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS

Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan dan martabat masyarakat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja	Program Pembangunan Daerah		Bidang Urusan
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mampu memanfaatkan teknologi	% guru yang berpendidikan minimal S1			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
				- SD/MI	75,1	90,1		
				- SMP/MTs	94,7	99,0		
				Nilai Rata-Rata Ujian Kompetensi Guru				
				- TK	57,74	70		
				- SD/MIN/SDLB	53,11	70		
			- SMP/MTs	57,33	70			
			% guru yang bersertifikasi pendidik					
				- TK	19,68	33,06		
				- SD/MIN/SDLB	40,94	99,74		
				- SMP/MTs	48,21	99,99		
				APK PAUD (%)	64,26	80,00	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
Peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas terjangkau dari akses dan biaya						Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
APK (%)								
- SD/MI	112,54	113,14						
- SMP/MTs	108,94	109,72						
APM (%)								
- SD/MI	97,43	99,95						
- SMP/MTs	80,62	82,00						
Rasio Siswa per guru (per 1000)								
- SD/MI	61,00	50,00						
- SMP/MTs	58,40	55,00						

				Angka Kelulusan (%) - SD/MI - SMP/MTs	100 100	100 100			
				Persentase Sekolah yang terakreditasi - SD/MI - SMP/MTs	87,8 92,1	100 100			
				Angka Melanjutkan (%) - SD/MI - SMP/MTs	96,03 94,61	100 100			
				Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan Inklusi SD/MI SMP/MTs	2 3	7 7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
2	Meningkatnya pemerataan sumber daya dan manajemen kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan	% Posyandu Mandiri	60,07	90	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	
				% Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	64,21	100	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
				% Prevalensi Gizi Buruk	0.04	0,01	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
				Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	161,4	160,2	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Anak		
				Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	5,2	5,0			
				Visite Rate (rata-rata kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan)	2,1	2,0	Program Bina Upaya Kesehatan		
			Peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan standarisasi	Rasio jumlah tenaga medis dan paramedis per (100.000) penduduk (Puskesmas, Pustu, Poskesdes) - Dokter umum - Perawat - Bidan	10.2 47,5 43.8	10,2 47,5 43.8	Program Peningkatan SDM Kesehatan		
				% Pemenuhan Tenaga Kesehatan di RSUD (standar tipe B) - Dokter Spesialis - Dokter umum - Perawat - Bidan	48,0 47,6 62,0 10,0	100 100 100 100	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah sakit		
				Meningkatkan upaya preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular.	% Apotik, Toko Obat dan Kosmetik yang terstandar	85	100		Program Pengawasan Obat dan Makanan
					% Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan kesehatan	80	100		
			Rasio penemuan Kasus Penyakit Menular 1. DBD (per 100.000 penduduk)		38,8	32	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak Menular		

				2. TB (per 100.000 penduduk) 3. Diare (per 1000 penduduk) 4. Acude Flacid Paralysis (per 100.000 penduduk usia <15 Tahun)	171,5 22.64 1,9	120 20 1,9		
			Meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan	% Tingkat Ketersediaan Obat % Tingkat Keterdiaan Alat-Alat Kesehatan	98,0 N/A	100 100	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
3	Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Persentase penduduk akses yang memiliki jamban sehat %Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Penduduk yang mengakses air minum sehat Penghargaan Tatanan Kabupaten/Kota Sehat (Swastisaba) Persentase Jorong <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	62,67 62.1 81,53 Belum 12,7	100 100 100 Wistara 70	Program Penyehatan Lingkungan	
4.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Responsif difabel dan perlindungan anak dan perempuan	Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dan difabel, serta perlindungan perempuan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan yang responsive gender, anak dan difabel	Indeks pembangunan Gender (<i>Gender Development Index</i>) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persentase Tindak Kekerasan Anak dan Perempuan yang terselesaikan Persentase gedung / Fasum pemerintahan yang responsif difabel Cakupan Pelayanan PMKS (%)	71,53 43,1 40 0 25,00	73,03 44,6 80 50 50	1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 2. Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil danPMKS 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial

Misi 3 mempunyai 1 Sasaran, 4 Strategi, 4 Arah Kebijakan dan 13 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS								
Misi 3: Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran								
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan program-program pengentasan kemiskinan (<i>Poverty Alleviation</i>)	Menurunnya beban biaya hidup rumah tangga miskin	Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu.	Rata-rata siswa SD/SMP/SMA/SMK penerima beasiswa miskin dari pemerintah daerah (pertahun)	0	1.000	1. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah	Pendidikan
				% Penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan.	100	100	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan
				Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM)	132	200	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya 2. Program Pengembangan Perumahan	Sosial Perumahan rakyat dan Pemukiman
		Meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan kompetensi tenaga kerja serta mengoptimalkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja	Warga belajar miskin yang mendapat pelatihan <i>life skill</i> (Orang)	N/A	120	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan
				RTM yang mendapat pelatihan keterampilan tenaga kerja (Orang)	N/A	250	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
				RTM penerima bantuan usaha ekonomi	N/A N/A N/A N/A	500 100 100 100	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian
				1. Pertanian			2. Program Peningkatan Produksi Peternakan	
				2. Perikanan			3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan
				3. Koperasi dan UMKM			4. Program Pengembangan	Industri
				4. Perindustrian				
				5. Perdagangan				

							Industri Kecil dan Menengah	Koperasi dan UMKM
							5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	
							6. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	
		Meningkatnya daya saing pencari kerja	Mengoptimalkan pengembangan tenaga terlatih enterpreneur melalui pelatihan dan pendidikan vocational bidang pariwisata, teknologi informasi, bisnis dan pertanian.	Rata-rata pencari kerja yang dilatih dan bersertifikat (Orang)	100	150	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
				Jumlah wirausahawan baru (Orang)	0	210	Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga
				% lulusan pendidikan Vocasional yang diterima pada dunia usaha, industry dan mandiri (Akademi Komunitas)	N/A	80	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan
		Meningkatnya Perluasan lapangan kerja	Meningkatkan perluasan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,18	70	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja
				Tingkat Pengangguran (%)	6,3	5.1		
				Rata-rata kerjasama investasi yang ditindaklanjuti	N/A	2	1. Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal
				Rata-rata Peningkatan Realisasi Investasi (LKPM) per tahun (Milyar)	300	282	2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	

Misi 4 mempunyai 6 Sasaran, 7 Strategi, 8 Arah Kebijakan dan 22 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS								
Misi 4: Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, social budaya, politik dan lingkungan hidup								
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan, kemandirian dan sinergitas antar kelompok masyarakat dalam pembangunan.	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun nagari melalui budaya gotong royong	Persentase Rata -Rata Alokasi Dana Desa	10	10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Perbandingan Teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dihasilkan per tahun	N/A	20		
				Persentase Nagari Mandiri (Desa Swasembada)	2,59	17,94	1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Rata-rata pertemuan organisasi perantau dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas pembangunan daerah (kali/tahun) - Rapat - Silaturahmi - Seminar	1 3 0	2 4 1		
2.	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang ekonomi	Revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat dalam peningkatan pendapatan dan daya beli	Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat	Persentase Kelompok swadaya masyarakat aktif	48,46 91,60 70,00 50 62 N/A	70,00 100,00 92,00 95 80 25	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UMKM
				1. % Koperasi Aktif 2. % Kelompok SPP Aktif 3. % Kelompok KUBE Aktif 4. % Kelompok BP-SPAM Aktif 5. % Kelompok BP-PLTMH/S Komunitas Aktif 6. % Kelompok P3A Aktif			2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Sosial

							4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian
							5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Perkembangan Badan Usaha Milik Nagari	
							1. Persentase Nagari yang Memiliki BUMNAG	
3.	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan lembaga di bidang sosial budaya.	Revitalisasi lembaga sosial budaya masyarakat dalam pengembangan seni, budaya dan olah raga.	Meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga sosial budaya dan olah raga.	2. Persentase Nagari yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari Aktif (%)	10,26	100	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					2,5	100		
		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.	Jumlah Sanggar/Kelompok Seni/Budaya berprestasi				
				➤ tingkat provinsi (Kelompok)	5	30	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan
				➤ tingkat nasional (Kelompok)	1	12		
				Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	N/A	40	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan KB bagi peserta KB Baru dan KB Aktif	Peringkat Kabupaten pada PORPROV	18	8	1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga
							2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	
				Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
				➤ % Kepemilikan KK	80,00	100	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				➤ % Kepemilikan KTP	73,07	100		
				➤ % Kepemilikan Akta Kelahiran	44,01	100		
				➤ % Kepemilikan Akte Perkawinan (Non Muslim)	4,22	100		
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam program Keluarga Berencana				
				1. Jumlah PUS sebagai akseptor KB (orang)	30.094	31.044	1. Program Pengedalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan KB
				2. % PUS sebagai Akseptor KB melalui program pemerintah	80	40	2. Program Pelayanan Kontrasepsi	
				3. % PUS sebagai Akseptor KB melalui program mandiri	20	60	3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	

4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang Politik	Peningkatan kesadaran dan kecerdasan dalam berdemokrasi.	Meningkatkan pewujudan karakter dan identitas bangsa yang luhur berdasarkan nilai-nilai demokrasi.	Partisipasi Jumlah Pemilih pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 (%). (data awal tahun 2014)	83,00	85,60	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Partisipasi Jumlah Pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (%). (data awal tahun 2014)	64,00	85,60		
				Partisipasi Jumlah Pemilih pada PILKADA Tahun 2020 (%).(data awal tahun 2015)	69	87,85		
				% LSM / Ormas yang aktif	60	75	1.Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.Program Pendidikan Politik Masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				% Penanganan dan penyelesaian konflik sosial yang ditangani pemerintah daerah	100	100	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Meningkatnya partisipasi di bidang lingkungan hidup	Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup secara partisipatif	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Jumlah Bank Sampah aktif	2	35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
				% Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi	9	25		
				% Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
				Persentase nagari yang mengikuti program kampung iklim (PROKLIM)	5	9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup
				Persentase nagari yang memiliki Ruang Terbuka Hijau	17	100	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.	Persentase nagari tangguh bencana (Nagari)	17,94	100	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Misi 5 mempunyai 5 Sasaran, 5 Strategi, 18 Arah Kebijakan dan 24 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS

Misi 5: Meningkatkan pengelolaan SDA secara professional untuk peningkatan PAD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas serta daya saing daerah menuju kemandirian berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan/ Kelompok tani (pertanian dan perkebunan)	Persentase kelompok tani Kelas Madya	1	20	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian
			Meningkatkan luasan lahan produktif dan produksi komoditi pertanian dan perkebunan	Produksi Komoditi Unggulan Pertanian (ton)			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian
				➤ Padi ➤ Jagung ➤ Kopi ➤ Karet ➤ Kelapa Sawit	131.437 54.074 1.625 12.027 2.577	156.943 64.567 1.940 14.361 3.077		
				Jumlah Kawasan Komoditi Unggulan Pertanian (Ha)	3	7		
			Meningkatkan Penerapan Teknologi dan Pemasaran Hasil Komoditi Pertanian/ Perkebunan	Indek Nilai Tukar Petani	95	104	1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perbunan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian
			Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan	% Ketersediaan Penyuluh Pertanian ahli (UU No. 16 Tahun 2006)	37,83	75,67	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Pertanian
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak (ekor) 1. Ternak Besar 2. Ternak Kecil 3. Unggas	15.651 8.535 117.514	20.707 9.090 125.014	1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian
			Meningkatkan	Jumlah produksi hasil ternak			Program Peningkatan	Pertanian

			pemasaran dan penerapan teknologi hasil produksi peternakan.	1. daging (ton/tahun) 2. Telur (ton/tahun)	385,9 78,8	578,85 86,7	Pemasaran Produksi Hasil Peternakan.	Pertanian
			Meningkatkan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	51,6	85	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
			Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan budidaya (Ton)	900	1.990	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
2.	Meningkatnya diversifikasi produk pertanian, perikanan dan non pertanian.	Mengembang kan produk-produk unggulan pertanian, perikanan dan non pertanian.	Menumbuh kembangkan industri olahan pertanian (agro industri)	Jumlah IKM pengolahan produk agro.	148	185	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri
			Menumbuh kembangkan industri olahan non pertanian	Jumlah IKM pengolahan produk non agro	370	458	3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Kesehatan
			Meningkatkan kerjasama daerah dalam pengembangan komoditi unggulan pertanian dan non pertanian	Kerjasama dengan perguruan tinggi/Lembaga Riset dalam penelitian dan pengembangan produk pertanian dan non pertanian (Lembaga)	2	12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri
							1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2. Program Peingkatan Kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perbunan 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertanian
3	Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata	Pengembangan destinasi wisata yang memiliki differensiasi sesuai potensi daerah	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata sesuai potensi daerah dan kearifan lokal	Jumlah objek pariwisata unggulan (Objek).	2	5	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Pariwisata
				Jumlah objek wisata yang dikelola oleh nagari/Pokdarwis (Objek)	1	31		

			Meningkatkan kapasitas kelompok dan pelaku pariwisata.	Jumlah Kelompok Sadarwisata (Pokdarwis)	0	31	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
			Meningkatkan promosi dan pelaksanaan event pariwisata.	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan: - nasional	0	11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
				- internasional	0	10		
				Jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata 1. Wisatawan Domestik 2. Wisatawan Luar Negeri	2.750 N/A	10.000 2.000		
4.	Meningkatnya pengelolaan sektor jasa dan perdagangan	Peningkatan Pengelolaan potensi sektor jasa dan perdagangan	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang telah mengekspor produk keluar daerah	N/A	25	1. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Koperasi dan UMKM
				Jumlah UMKM yang memiliki HAKI (lembaga)	8	33		
				Jumlah UMKM Terfasilitasi Bermitra dengan Badan Usaha	N/A	45		
			Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang	% Pengaduan Konsumen yang tertangani	100	100	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pedagang	Perdagangan
			Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pasar	Jumlah pasar yang representatif (Pasar Kabupaten)	0	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
5.	Meningkatnya pengelolaan energi baru dan terbarukan	Pengelolaan sumber daya alam energi terbarukan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan pengembangan pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan	Persentase Potensi Listrik yang dikelola (PLTM)	4	90	1. Program Pembinaan dan Pengembangan ketenagalistrikan 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal
				Persentase PLTMH Komunitas yang berfungsi (unit)	62	80		

Misi 6 mempunyai 4 Sasaran, 6 Strategi, 13 Arah Kebijakan dan 30 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS

Misi 6: Penegakkan supremasi hukum dan demokratisasi

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya penataan produk hukum daerah, kesadaran hukum, penegak kan serta kepastian hukum.	Penataan produk hukum daerah dan peningkatan pelaksanaan supremasi hukum.	Membangun materi hukum dalam pembentukan produk hukum daerah dan supremasi hukum	Persentase Ranperda Usulan Pemda yang dibahas. (Dokumen)	47	100	1. Program Penataan Peraturan Per Undang-Undangan 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pemerintahan Umum (Fungsi Penunjang)	
				Rata-rata Ranperda Usulan Inisiatif DPRD.(Dokumen/tahun)	0	12			
			Meningkatkan pemeliharaan Kantibmas, pencegahan tindak kriminal, keamanan lingkungan dan pemberantasan penyakit masyarakat.	Cakupan Patroli Siaga Tibum dan Tranmas (kali/hari)	0,016	3.00	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
					% Jorong Memiliki Pos Siskamling	24	100		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
					% Jorong yang memiliki Personil Linmas	0	100		
					Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	80	100		
					% Kasus Penyakit Masyarakat yang tertangani	N/A	100		
					Persentase potensi konflik yang bisa diantisipasi	N/A	100		
		Peningkatan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Tapal Batas Wilayah untuk meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan konflik, meningkatkan iklim investasi dan percepatan pembangunan sesuai arahan tata ruang.	Meningkatkan penyelesaian sengketa/permasala han batas wilayah.	% Penyelesaian batas kecamatan (Kecamatan)	0	80	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemerintahan Umum (Fungsi Penunjang)	
				% Penyelesaian batas nagari (Nagari)	0	70			
			Meningkatkan penyelesaian kasus-kasus pertanahan.	Persentase Luas Lahan budidaya yang Bersertifikat	N/A	45	1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Pertanahan 2. Program Penataan Penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 3. Program Penyelesaian	Pertanahan	
					% penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan swasta/ investor	100			100

							Konflik-Konflik Pertanahan.	
			Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.	Ketersediaan PPNS Penataan Ruang (orang)	5	10	1. Program Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	N/A	70	2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
2.	Meningkatnya pemanfaatan system informasi manajemen berbasis IT dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan.	Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan e- Government.	Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem informasi layanan publik berbasis IT (<i>online</i>)	2	12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Komunikasi dan Informatika
			Meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah.	Diterapkannya pola hubungan persandian antar OPD (sudah/belum)	Belum	Sudah	Program Penyelenggaraan Persandian Daerah	Persandian
			Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku	Terbangunnya data base informasi kearsipan (e-arsip)	Belum	Sudah	Program Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan	Kearsipan
				Persentase OPD yang telah menerapkan manajemen kearsipan	3	83	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan pemanfaatan sistem informasi.	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporannya berbasis datasistem informasi.	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan serta kerjasama pembangunan.	Terbangunnya data base informasi data (e-Pusdalitbang)	Belum	Sudah	1. Program Pengembangan data/ Informasi/statistik daerah 2. Program Pengembangan Data dan Informasi	Perencanaan Pembangunan (Fungsi Penunjang)
				Tindaklanjut Kerjasama Pembangunan (MoU) antara pemerintah dengan <i>Stakeholder</i> (%)	62,5	100	Program Kerjasama Pembangunan	
			Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian dan pelaporan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Anggaran Tepat waktu (%)	14,28	100	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran (%)	N/A	100	2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
				Nilai SAKIP	C	A	3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang - RDTR/RRTR - RTBL	1 1	8 4	4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	
							Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang
		Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah termasuk pengendalian dan pelaporannya	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan nagari	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	WTP	1. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Pengawasan Internal dan	Keuangan (Fungsi Penunjang)

		menggunakan sistem informasi(e-budgeting).	melalui sistem informasi (e-budgeting)				Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	
				Persentase Pelaporan Keuangan Nagari yang sesuai dengan aturan	N/A	100	Program Pembinaan dan Fasilitasi dan Keuangan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Meningkatnya fungsi pengawasan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	Peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan.	30	80	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Pengawasan (Fungsi Penunjang)
				Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	II dengan catatan	III	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
				% Penetapan Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) Pelayanan OPD	26	100	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintahan Umum (Fungsi Penunjang)
				Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS pertahun	N/A	90	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian (Fungsi Penunjang)
			Meningkatkan mutu pelayanan publik dalam rangka terwujudnya pelayanan prima, akuntabel dan transparan.	Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk Pelayanan Publik	Cukup	Baik	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintahan Umum (Fungsi Penunjang)

Misi 7 mempunyai 8 Sasaran, 8 Strategi, 8 Arah Kebijakan dan 33 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS								
Misi 7: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar secara proporsional								
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	Peningkatan kuantitas, kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses transportasi sesuai tata ruang.	Meningkatkan kuantitas, kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan	Panjang Jalan Kabupaten (KM)	1.980,58	2.035,58	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Jumlah Jembatan (unit)	166	219		
				Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (%)	20,51	70,00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	
				% Jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	46,73	75,70		
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur Keciaptakaryaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keciptakaryaan, perumahan dan permukiman sesuai arahan tata ruang.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keciptakaryaan, perumahan dan permukiman.	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	51,52	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fungsi Penunjang
				Panjang Drainase terbangun (Km)	13	41	Program pembangunan saluran drainase/gorong - gorong	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				% Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	60		
				Akses Air Minum Layak (%)	54,73	90	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah	
				Akses Sanitasi Layak (%)	27,45	80		
				Cakupan Layanan Persampahan	18	80	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
				Penataan perumahan dan kawasan permukiman (lokasi)	0	10	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Pemukiman
				Pengembangan infratsruktur dan kawasan permukiman (lokasi)	N/A	7		
				Jumlah Kawasan Permukiman kumuh	2	0	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
				Peningkatan Pembangunan Pasar (unit)	2	2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan
Persentase Lampu PJU yang memiliki meteran	N/A	100	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perumahan dan Pemukiman				
3	Meningkatnya	Peningkatan kuantitas	Meningkatkan	Jumlah Embung terbangun (lokasi)	3	15	Program Pengembangan dan	Pekerjaan Umum

	Kualitas dan Kuantitas infrastruktur pengairan/Sumber Daya air	dan kualitas pembangunan jaringan irigasi dan sumber daya air responsif bencana sesuai arahan tata ruang.	kuantitas dan kualitas pembangunan jaringan irigasi dan sumber daya air.	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik	N/A	85	Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	dan Tata Ruang
				Pengendalian Sungai: - Perkuatan Tebing (titik) - Pengendalian Banjir (titik)	N/A N/A	65 65	Program Pengendalian Banjir	
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur perhubungan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan sebagai upaya peningkatan layanan publik.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan	Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	20	95	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasia Kendaraan BermotorRehabilitasi dan Pemiliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan
				Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan 1.Terminal Angkutan Orang (unit) 2.Terminal Angkutan Barang (unit) 3.Halte (unit) 4.Dermaga Sampan Bermotor (unit)	2 0 2 1	4 1 15 3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
				% tingkat keberfungsian Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL)	69,23	90	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
				Persentase Fasilitas Keselamatan pada kawasan prioritas (perkotaan dan desti nasi wisata)	N/A	100		
				Rasio Ketersediaan Angkutan umum (per 10.000)	0,68	2		
				5	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika	Percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi berbasis IT.	Meningkatkan penggunaan jaringan informasi dan komunikasi	
Jumlah Gedung Pemerintah terhubung dengan fiber optik (unit)	4	42						
6	Meningkatnya ketahanan Energi	Percepatan ketahanan energi melalui pencapaian rasio elektrifikasi.	Meningkatkan ketahanan energi	% Rumah Tangga yang dialiri listrik (Rasio Elektrifikasi)	93,57	98,00	1. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan 2. Program Pengembangan Perumahan	Energi dan Sumber Daya Mineral Perumahan dan Permukiman
7.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Percepatan pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan cakupan layanan penanggulangan bencana.	% Cakupan pelayanan Kebakaran	42,86	100	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Perumahan dan Permukiman
				Respon Time pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	40	15		
				Persentase Kecamatan memiliki Posko Damkar	42	100		
				Jumlah Hidran pada fasilitas Publik	3	50		
				% ketersediaan sarana proteksi kebakaran pada gedung/kantor pemerintah	0	50		
				% Ketersediaan sarana dan	62	100	Program Pencegahan Dini	Ketenteraman,

				prasarana penanggulangan bencana			dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8.	Meningkatnya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur prasarana dasar	Peningkatan kerjasama dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur prasarana dasar	Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur prasarana dasar.	Jumlah kerjasama pembangunan dengan swasta dalam penyediaan infrastruktur sarana dasar	N/A	10	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal
				Nilai realisasi investasi swasta dalam kerjasama penyediaan infrastruktur sarana dasar (Rp. Milyar)	N/A	50		

Misi 8 mempunyai 2 Sasaran, 3 Strategi, 4 Arah Kebijakan dan 14 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS								
Misi 8: Meningkatkan kualitas SDM								
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas SDM dan Daya Saing Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,09	69,56	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,98	9,00		
				Angka Harapan Lama Sekolah	12,15	13,00		
				Angka Melek Huruf	97,7	99,0	2. Program Pendidikan Non Formal	Perpustakaan
				Jumlah penambahan bahan perpustakaan (judul) (>5%) - Jumlah Buku - Judul Buku	8.764 2.922	16.264 5.422	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	
				Jumlah kunjungan perpustakaan (orang/tahun)	598	1.000		
				Umur harapan hidup	66,64	69,64	Program Upaya Kesehatan	
				Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	35,2	25		
		Peningkatan daya saing masyarakat melalui pelatihan, magang,	Menyelenggarakan pelatihan, magang	Rata-rata Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (KF, Paket, Pengelola PKBM) (kali)	11	17	Program Pendidikan Non Fromal	Pendidikan

		sharing informasi	dan sharing informasi bagi masyarakat usia produktif	Rata-rata peserta magang/sharing informasi (orang/pertahun).	16	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja
2	Meningkatkan Kualitas SDM dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.	Peningkatan Kualitas SDM dan Profesionalitas ASN	Pengembangan system rekrutmen dan penempatan berdasarkan analisis kebutuhan dan kompetensi	Tersedianya system analisis kebutuhan perekrutan dan penempatan ASN	Belum	Sudah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian (Fungsi Penunjang)
			Meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan formal dan non formal berdasarkan analisis kebutuhan dan kompetensi	Persentase Aparatur yang berijazah sarjana dan Pasca Sarjana (%) - S1 - S2 - S3	51,0 3,0 0,1	80,0 10,0 0,2	Program Pendidikan Kedinasan.	
				% Aparatur yang menduduki jabatan struktural telah mengikuti Jabatan struktural: Eselon II Eselon III Eselon IV	52,0 44,0 15,0	77 80 75		
				% Penempatan aparatur yang sesuai bidang keahlian berdasarkan Analisa jabatan	N/A	80		

Misi 9 mempunyai 3 Sasaran, 3 Strategi, 3 Arah Kebijakan dan 19 Indikator.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SOLOK SOLOK SELATAN YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS								
Misi 9: Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan social lainnya								
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan beserta sarana penunjangnya	Rasio ketersediaan Sekolah per jenjang pendidikan (per 1000 siswa)			Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan
				• SD/MI	7,2	7,2		
				• SMP/MTs	6,2	6,2		
				% Bangunan Sekolah Berkondisi Baik:				
				• SD/MI	75,52	85		
				• SMP/MTs	80,25	90		
				Rasio Ketersediaan Ruang Kelas				
				• SD/MI	1:18	1:18		
				• SMP/MTs	1:21	1:21		

				% Ruang Kelas Berkondisi Rusak Berat: • SD/MI • SMP/MTs	6,95 14,73	1 1		
				% Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana perpustakaan • SD/MI • SMP/MTs	63,01 84,21	99 100		
				% Sekolah memiliki sarana dan prasarana olahraga: • SD/MI • SMP/MTs	40 60	90 100		
				% Sekolah bersanitasi baik • SD/MI • SMP/MTs	30 50	99 99		
				% Nagari yang memiliki Pustaka Nagari	33,33	100		
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan beserta sarana penunjangnya.	% Puskesmas rawatan	88,88	100	1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 2. Program Bina Upaya Kesehatan	Kesehatan
				Rasio Ketersediaan Puskesmas (Per 30.000 Penduduk)	1,69	1,69		
				Rasio Ketersediaan Puskesmas Pembantu (Per 30.000 Penduduk)	1,37	1,37		
				Rasio Ketersediaan Poskesdes (Per.2.500 Penduduk)	2,3	2,3		
				Akreditasi RSUD (Versi JCI)	60	85		
				Rasio Puskesmas Terakreditasi (%)	0	100		
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana social lainnya	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan dan penunjang lainnya.	% Jorong yang memiliki Balai Pemuda	N/A	50	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
				% Nagari yang memiliki gelanggang/ sarana olahraga (minimal 1 per nagari)	80	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
				% KAN yang memiliki Balai-Balai Adat	N/A	100	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan
				% Nagari yang memiliki Medan Nan Bapaneh	N/A	100		
				Persentase Panti yang sesuai Standar	33.33	100	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sosial

BAB VIII**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN****8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021**

Berdasarkan arsitektur perencanaan yang secara tegas membatasi antara aspek strategis dan operasional dalam perencanaan, maka program prioritas dibatasi pula menjadi dua (2) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Perencanaan strategis dirumuskan tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan serta bagaimana strategi untuk mencapainya. Perencanaan ini sudah dilakukan pada bab sebelumnya dengan menghasilkan program-program (program prioritas untuk perencanaan strategis). Sedangkan suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah (berdasarkan permasalahan pembangunan daerah seperti pada Bab IV) pada dasarnya adalah program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu urusan pemerintah daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya dapat menjadi operasional di periode berikutnya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka indikasi rencana program prioritas Kabupaten Solok Selatan didapatkan dari kombinasi program prioritas yang berasal dari:

- 1) Perumusan strategis (program prioritas untuk perencanaan strategis yang tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan serta bagaimana strategi untuk mencapainya (Bab VII), dan
- 2) Perumusan permasalahan pembangunan daerah (program prioritas untuk perencanaan operasional yang diperoleh dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah di seluruh urusan (24 wajib, 8 pilihan dan 5 fungsi penunjang), serta
- 3) Dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan (faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan).

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Solok Selatan dijabarkan menjadi tiga (3) kategori program prioritas yaitu:

- 1) Prioritas I merupakan merupakan program daerah yang diprioritaskan untuk belanja wajib, mengikat serta prioritas utama, yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah.

- 2) Prioritas II direncanakan alokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Solok Selatan, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pembangunan infrastruktur, religius, pelayanan publik, pengembangan pariwisata, pencapaian kinerja urusan pemerintah dan pelayanan pemerintah.
- 3) Prioritas III dialokasikan untuk mendanai alokasi belanja tidak langsung untuk mendukung program prioritas di kabupaten yang bukan kewenangan kabupaten seperti untuk belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

Penyusunan prioritas tidak lepas dari tema-tema pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang tersurat dalam terjemahan visi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan. Tema-tema pembangunan ini di susun sebagai *milestones* atau tahapan antara dalam pencapaian visi. *Milestone* tersebut perlu disusun untuk memberikan arah dan warna pada setiap tujuan sebagai perincian atas *visi/ultimate goal* yang telah disusun dalam rangka mencapai visi RPJM Daerah yaitu **Mewujudkan Masyarakat Solok Selatan Yang Sejahtera dan Religius.**

Berdasarkan terjemahan visi tersebut maka dapat dibagi menjadi dua (2) tema-tema pembangunan yaitu:

1. **Tahun 2016-2018 fokusnya adalah penguatan fondasi pembangunan daerah yang bertumpu pada pembangunan sarana dan prasarana dasar, pembangunan SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, gender dan keberpihakan pada difabel, dan pembangunan supremasi hukum didukung birokrasi professional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan tema: “Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Baik (*Good and Clean Governance*)”.**

Tahapan ini sebagai pedoman arah untuk mendukung tercapainya tujuan yang meliputi;

1. Meningkatkan pelayanan publik dengan focus pembangunan sarana dan prasarana dasar sesuai misi 7 dan 9.
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, responsive gender dan responsive difabel (Misi 2 dan 8).
 3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah (sumberdaya aparat dan institusi) yang efektif, akuntabel dan inklusif diseluruh tingkatan dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima (Misi 2 dan 8).
 4. Membangun Supremasi Hukum (Misi 6) dan birokrasi yang professional.
2. **Pada tahun 2019-2021 berfokus pada percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemandirian serta daya saing, dengan tema:**

“Menuju Masyarakat Religius yang Mandiri dan Berdaya Saing yang Bertumpu pada Agribisnis, Agroforestry dan Ecotourism dengan peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berpihak pada lingkungan dan mitigasi bencana”.

Tahapan ini sebagai pedoman arah untuk mendukung tercapainya tujuan meliputi;

1. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan SDA dibidang agroforestry, agrobisnis dan ecotourism yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Misi 3 dan 5).
2. Meningkatkan partisipasi multistakeholder dalam perencanaan dan proses pembangunan (Misi 4).
3. Peningkatan religiusitas masyarakat (Misi 1).

Tujuan yang menjadi fokus utama dalam setiap tema tahapan merupakan tujuan yang menjadi prioritas utama (P1). Namun demikian, tujuan yang lain tetap harus dijalankan dengan porsi di bawah prioritas utama. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan prioritas pembangunan tiap tahun dalam RKPD harus menyesuaikan fokus utama tujuan pada tahapan pembangunan disetiap tahun yang bersangkutan.

8.2. Kebutuhan Pendanaan

Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan dibiayai dari sumber APBD Kabupaten, ditambah dengan APBD Provinsi serta APBN baik melalui jenis pendanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan serta pembiayaan lainnya dari pinjaman luar negeri maupun dana CSR perusahaan.

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan kewenangan yang tertuang dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan kewenangan urusan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan bidang pembangunan sebagai berikut:

- 1) Bidang Kesehatan dan Pendidikan; meliputi urusan Kesehatan, Kepegawaian, Pendidikan dan perpustakaan.
- 2) Bidang Kesejahteraan dan Ekonomi; meliputi urusan Perindustrian, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM dan Koperasi, Pemberdayaan Perempuan, Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Sosial, Pariwisata.
- 3) Bidang Agama, Demokratisasi dan Gender; meliputi urusan Kesatuan Lembaga dan Politik Dalam Negeri, Kebudayaan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Perhubungan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kearsipan.
- 4) Bidang Pelayanan Publik yang Transparansi dan Akuntabel; meliputi urusan Kepegawaian, Pemerintahan, Perhubungan, Pemerintahan.

- 5) Bidang Investasi; meliputi urusan Perindustrian, Penanaman Modal, Perhubungan, Tenaga Kerja, Perdagangan.
- 6) Bidang Pariwisata dan Budaya Daerah; meliputi urusan Budaya, Pariwisata dan Perhubungan.
- 7) Bidang Pemuda dan Olahraga; meliputi urusan Pemuda dan Olahraga, Pekerjaan Umum.
- 8) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum; meliputi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pekerjaan Umum, Kelautan dan Perikanan, Sumber Daya Energi, Penataan Ruang, Perhubungan.

Berdasarkan pengelompokan dan mencermati kebutuhan indikatif serta perkiraan keuangan daerah selama lima tahun ke depan, maka ditetapkan persentase berdasarkan kelompok urusan serta mengasumsikan beberapa kondisi selama lima tahun yang akan datang dan rencana kebutuhan indikatif pendanaan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Prioritas program pembangunan tahap I tahun 2016-2018 yang fokus pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dasar dengan proporsi anggaran 20 persen dari total APBD. Prioritas program pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan fokus pada Bidang Pendidikan minimal 20 persen dari total APBD dan Bidang Kesehatan dengan proporsi 10 persen dari alokasi APBD. Sedangkan untuk bidang religius dengan proporsi 15 persen dari total APBD. Dalam peningkatan pelayanan publik, supremasi hukum dan reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan proporsi anggaran sebesar 6 persen dari total APBD. Untuk peningkatan perkeonomian yang didorong sektor pariwisata dengan proporsi anggaran 8 persen dari total APBD.
2. Prioritas program pembangunan tahap II tahun 2019-2021 difokuskan pada pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Proporsi anggaran untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di bidang agroforestry 15 persen dari total APBD dan bidang agribisnis 15 persen dari total APBD dari total APBD. Sementara itu, proporsi anggaran untuk bidang lingkungan hidup 10 persen dan mitigasi bencana 10 persen. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan 10 persen dari total APBD untuk proram peningkatan partisipasi masyarakat.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai prioritas pendanaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 secara lengkap dapat dilihat pada matrik dibawah ini.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A		BELANJA OPERASIONAL KANTOR			69,847.5		77,428.1		83,031.0		90,971.2		96,495.7		103,267.7		521,041.3	
	01	Belanja pelayanan administrasi perkantoran	Tertaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100.00	100.00	42,619.4	100.00	46,881.4	100.00	49,429.1	100.00	54,049.1	100.00	56,751.5	100.00	59,589.1	100.00	309,319.5
	02	Program peningkatan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana dan prasaraa kantor (%)	100.00	100.00	25,066.9	100.00	27,573.6	100.00	30,331.0	100.00	33,364.1	100.00	35,870.3	100.00	39,457.3	100.00	191,663.2
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya kelengkapan PNS dalam menjalankan tupoksi	100.00	100.00	1,356.1	100.00	1,762.9	100.00	1,939.2	100.00	2,133.1	100.00	2,346.4	100.00	2,581.0	100.00	12,118.7
	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya sumber daya aparatur yang sesuai tupoksi (%)	100.00	100.00	405.1	100.00	810.3	100.00	931.8	100.00	1,025.0	100.00	1,127.5	100.00	1,240.2	100.00	5,539.8
	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Tersedianya dokumen pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	33 OPD	33 OPD	400.0	33 OPD	400.0	33 OPD	400.0	33 OPD	400.0	33 OPD	400.0	33 OPD	400.0	33 OPD	2,400.0
B		BELANJA URUSAN PEEMERINTAHAN			356,669.4		413,890.8		448,515.9		473,561.1		455,117.0		462,075.0		2,609,829.1	
1		URUSAN PENDIDIKAN			20,802.7		29,600.5		30,379.7		31,337.0		32,240.1		32,973.2		177,333.1	
	1	Program Peningkatan Pengamalan Nilai Agama	% guru TPA/MDA bersertifikasi	-	-	-	5.00	100.0	12.00	266.0	25.00	292.6	37.00	321.9	50.00	354.0	50.00	1,334.5
			% TPA/MDA terakreditasi	-	-	-	5.00		12.00		24.00		36.00		50.00		50.00	
	2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi PAUD (%)	64.26	66.88	3,023.6	69.50	4,118.0	72.12	4,602.3	74.74	4,942.5	77.36	4,916.8	80.00	5,278.5	80.00	26,881.7
			Jumlah guru TK bersertifikasi	19.86	22.06		24.26		26.46		28.66		30.86		33.06		33.06	
	3	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK			11,750.8		21,680.4		22,387.8		23,120.5		23,788.9		23,857.7		126,586.0
			- SD/MI	112.54	112.64		112.74		112.84		112.94		113.04		113.14		113.14	
			- SMP/MTs	108.94	109.07		109.20		109.33		109.46		109.59		109.72		109.72	
			APM															
			- SD/MI	97.43	97.85		98.27		98.69		99.11		99.53		99.95		99.95	
			- SMP/MTs	80.62	80.85		81.08		81.31		81.54		81.77		82.00		82.00	
			Rasio Siswa dan guru															
			- SD/MI	61.00	59.17		57.34		55.51		53.68		51.85		50.00		50.00	
			- SMP/MTs	58.40	57.83		57.26		56.69		56.12		55.55		55.00		55.00	
			Angka Kelulusan (%)															
			- SD/MI	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			- SMP/MTs	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			Peningkatan nilai rata-rata UN															
			- SD/MI	N/A	60.00		62.00		64.00		66.00		68.00		70.00		70.00	
			- SMP/MTs	50.90	53.00		55.00		57.00		59.00		61.00		63.00		63.00	
			Akreditasi Sekolah															
			- SD	87.84	87.84		91.89		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			- SMP	92.11	92.11		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			Angka Melanjutkan															
			- SD/MI	96.03	96.69		97.35		98.01		98.67		99.33		100.00		100.00	
			- SMP/MTs	94.61	95.51		96.41		97.31		98.21		99.11		100.00		100.00	
			Angka putus sekolah maksimal															
			- SD/MI	0.39	0.32		0.25		0.18		0.11		0.04		-		-	
			- SMP/MTs	0.18	0.15		0.12		0.09		0.06		0.03		-		-	
			Persentase kelulusan															
			- SD/MI	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			- SMP/MTs	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
			Peningkatan sarana prasarana pendidikan SD/MI															
			- % Bangunan SD/MI berkondisi baik	75.52	77.10		78.68		80.26		81.84		83.42		85.00		85.00	
			- Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI	1 : 18	1 : 18		1 : 18		1 : 18		1 : 18		1 : 18		1 : 18		1 : 18	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
				- % Ruang Kelas SD/MI berkondisi rusak berat	6.95	5.96		4.97		3.98		2.99		2.00		1.01		1.01	
				- % sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SD /MI	63.01	69.01		75.01		81.01		87.01		93.01		99.01		99.01	
				- % sekolah yang memiliki sarana olahraga SD/MI	40.00	48.33		56.66		64.99		73.32		81.65		90.00		90.00	
				- % sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SD/MI	30.00	41.50		53.00		64.50		76.00		87.50		99.00		99.00	
				Peningkatan sarana prasarana pendidikan SMP/MTs															
				- % Bangunan SMP/MTs berkondisi baik	80.25	81.88		83.51		85.14		86.77		88.40		90.00		90.00	
				- Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs	1 : 21	1 : 21		1 : 21		1 : 21		1 : 21		1 : 21		1 : 21		1 : 21	
				- % Ruang Kelas SMP/MTs berkondisi rusak berat	14.73	12.44		10.15		7.86		5.57		3.28		1.00		1.00	
				- % sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SMP/MTs	84.21	86.84		89.47		92.10		94.73		97.36		100.00		100.00	
				- % sekolah yang memiliki sarana olahraga SMP/MTs	60.00	66.67		73.34		80.01		86.68		93.35		100.00		100.00	
				- % sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SMP/MTs	50.00	58.17		66.34		74.51		82.68		90.85		99.00		99.00	
				- % sekolah yang memiliki tempat beribadah SMP/MTs	80.00	83.33		86.66		89.99		93.32		96.65		100.00		100.00	
				- % sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI	61.11	67.59		74.07		80.55		87.03		93.51		100.00		100.00	
				Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK						20.00		40.00		60.00		80.00		80.00	
		4	Program Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA	94.20	94.40	4,672.8	94.60	400.0	94.80	400.0	95.00	400.0	95.20	400.0	95.40	400.0	95.40	
				APM SMA/SMK/MA	70.42	72.42		72.62		72.82		73.02		73.22		73.42		73.42	
		5	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (%)	97.70	97.92	105.0	98.14	250.5	98.36	274.1	98.58	300.0	98.80	328.5	99.00	359.8	99.00	
				Jumlah penyelenggara pendidikan Non Formal (KF, dan Pengelola PKBM) (unit)	11.00	12.00		13.00		14.00		15.00		16.00		17.00		17.00	
		6	Program Pendidikan Luar Biasa	Jumlah SLB (Unit)	3.00	3.00	66.7											3.00	
		7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	% guru yang berpendidikan minimal S1			757.7		1,192.3		1,211.0		856.5		914.2		998.8		
				- SD/MI	75.09	77.59		80.09		82.59		85.09		87.59		90.09		90.09	
				- SMP/MTs	94.66	95.38		96.10		96.82		97.54		98.26		98.98		98.98	
				Nilai Rata-Rata Kompetensi Guru															
				- TK	57.74	59.78		61.82		63.86		65.90		67.94		69.98		69.98	
				- SD/MIN/SDLB	53.11	55.93		58.75		61.57		64.39		67.21		70.03		70.03	
				- SMP/MTs	57.33	59.44		61.55		63.66		65.77		67.88		69.99		69.99	
				% guru yang bersertifikasi pendidik															
				- TK	19.68	21.91		24.14		26.37		28.60		30.83		33.06		33.06	
				- SD/MIN/SDLB	40.94	50.74		60.54		70.34		80.14		89.94		99.74		99.74	
				- SMP/MTs	48.21	56.84		65.47		74.10		82.73		91.36		99.99		99.99	
				Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	-	-		1.00		2.00		2.00		2.00		2.00		9.00	
		8	Program Manjemen Pelayanan Pendidikan	Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal	100.00	100.00	426.0	100.00	1,859.3	100.00	1,238.6	100.00	1,424.9	100.00	1,569.9	100.00	1,724.4	100.00	
				Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
				% lulusan pendidikan vocational yang diterima pada dunia usaha, industry dan mandiri (Akademi Komunitas)	N/A	50.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00	
				Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	2.00	2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		7.00	
				Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	3.00	3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		7.00		7.00	
	2		URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA				4,087.6		4,118.9		7,425.9		5,071.1		7,844.1		5,424.5		33,972.0
		1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam PORPROV	18.00	14.00	3,495.3		3,194.6	10.00	4,660.4		2,271.1	8.00	5,000.0		2,526.6	8.00	21,147.9
				Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam POPDA	9.00	13.00		9.00		7.00		5.00		4.00		3.00		3.00	
				Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SD	15.00	15.00		14.00		11.00		9.00		7.00		5.00		5.00	
				Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SMP	7.00	7.00		6.00		6.00		5.00		5.00		4.00		4.00	
				Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SMA	11.00	9.00		8.00		7.00		6.00		5.00		4.00		4.00	
				Peringkat Kabupaten Solok Selatan Dalam O2SN SMK	4.00	17.00		15.00		13.00		10.00		8.00		6.00		6.00	
				Atlet Kabupaten Solok Selatan yang berprestasi Tingkat provinsi	N/A	30.00		5.00		50.00		10.00		70.00		15.00		180.00	
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Nagari yang memiliki gelanggang/sarana olahraga	80.00	82.00	154.0	86.00	189.3	89.00	2,000.0	92.00	2,000.0	96.00	2,000.0	100.00	2,000.0	100.00	8,343.2
		3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi	N/A	2.00	358.3	2.00	390.0	2.00	413.0	2.00	449.3	2.00	489.2	2.00	533.2		2,633.0
		4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah wirausahawan baru yang dipelopori oleh pemuda	N/A	10.00	80.0	10.00	80.0	10.00	80.0	10.00	80.0	10.00	80.0	10.00	80.0	60.00	480.0
		5	Program Pengembangan dan Kereserasan Kebijakan Pemuda	Persentase pengurus remaja masjid dibina	0	0	-	20.00	75.0	36.00	82.5	52.00	90.8	68.00	99.8	80.00	109.8	80.00	457.9
				Persentase organisasi kepemudaan aktif	N/A	5.00		10.00		15.00		20.00		30.00		40.00		40.00	
		6	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase kasus penyalahgunaan narkoba pada anak usia sekolah yang ditangani	N/A	N/A	-	100.00	190.0	100.00	190.0	100.00	180.0	100.00	175.0	100.00	175.0	100.00	910.0
	3		URUSAN KESEHATAN				37,022.0		38,665.0		43,305.0		46,955.0		51,145.0		52,775.0		269,867.0
		1	Program obat dan perbekalan	% Ketersediaan obat	98.00	100.00	3,200.0	100.00	3,750.0	100.00	4,350.0	100.00	4,900.0	100.00	5,450.0	100.00	5,450.0		27,100.0
		2	Program upaya kesehatan masyarakat	Kunjungan rata-rata masyarakat ke pelayanan kesehatan (visite rate)	2,1	2.00	15,700.0	2.00	17,910.0	2.00	20,950.0	2.00	23,580.0	2.00	27,020.0	2.00	28,130.0	2.00	133,290.0
				% Praktek tenaga kesehatan swasta yang memenuhi standar kesehatan	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				Meningkatnya umur harapan hidup	66,64	67,14		67,69		68,19		68,69		69,19		69,64		69,64	
		3	Program pengawasan obat dan makanan	% Toko obat, apotik dan toko kometistik yang memenuhi standar kesehatan	85.00	90.00	190.0	95.00	225.0	100.00	245.0	100.00	250.0	100.00	270.0	100.00	305.0	100.00	1,485.0
				% Industri rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan	80.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		4	Program pengembangan obat asli industri	Bahan baku yang dihasilkan dan dipergunakan untuk industri farmasi	N/A	N/A	400.0	1.00	500.0	1.00	800.0	1.00	800.0	1.00	800.0	1.00	800.0	5.00	4,100.0
		5	Program promosi kesehatan dan	% Kebijakan PHBS	10.00	10.00	710.0	20.00	720.0	30.00	750.0	40.00	760.0	50.00	790.0	60.00	810.0	60.00	4,540.0

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD				
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
			pemberdayaan masyarakat	% Desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM	N/A	2.00		10.00		20.00		40.00		50.00		50.00						
		6	Program perbaikan gizi masyarakat	% Gizi buruk	0,04	0,04	360.0	0,03	360.0	0,03	390.0	0,02	390.0	0,02	410.0	0,01	410.0	0,01	2,320.0			
				% Balita stunting	10,2	10.00		9,5		9.00		8,5		8.00		7,5		7,5				
				% Ibu hamil KEK	0,14	0,13		0,12		0,11		0,10		0,09		0,08		0,08				
				% Ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah	86,5	87.00		88.00		90.00		98.00		98.00		98.00		98.00				
				% Bayi usia kurang 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	86,4	87.00		88.00		89.00		90.00		91.00		92.00		92.00				
				% Remaja putri yang mendapat tablet tambah darah	N/A	15.00		25.00		25.00		30.00		35.00		40.00		40.00				
				% BBLR	0,68	0,68		0,68		0,68		0,6		0,6		0,6		0,6				
					7	Program pengembangan Lingkungan Sehat	% Pendudukakses jamban sehat	62,67	68.80	1,055.0	75.00	1,510.0	81,3	1,540.0	87,5	1,555.0	93,7	1,185.0	100.00	1,120.0	100.00	7,965.0
% Pendudukakses air minum sehat	81.53	84.00					87.00		90.00		93.00		96.00		100.00		100.00					
% tempat pengelolaan makanan yang memenuhi standar kesehatan	62.10	65.00					70.00		75.00		80.00		90.00		100.00		100.00					
Penghargaan tatanan Kabupaten/Kota sehat	Belum						padapa				wiwerda				wistara		wistara					
% jorong ODF	12.70	22,2					31,7		41,2		50,7		60,2		70.00		70.00					
% Puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui program MTBS	100.00	100.00	645.0				100.00	675.0	100.00	730.0	100.00	800.0	100.00	835.0	100.00	855.0	100.00	4,540.0				
% Keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	98,9	100.00					100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
% Anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	94,7	95.00					95,5		96.00		96,5		97.00		98.00		98.00					
		8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka Penemuan Acude Flacid Paralysis (per 100.000 penduduk usia < 15 Tahun)	1,9	1,9		1,9		1,9		1,9		1,9		1,9						
				Prevalensi Kasus HIV < 0,4 per 1.000 penduduk	0,13	0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13				
					9	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	% Puskesmas yang melaksanakan pengendalian penyakit Tidak Menular	N/A	10.00	275.0	20.00	275.0	30.00	275.0	50.00	275.0	100.00	275.0	100.00	275.0	100.00	1,650.0
							% Tempat belajar mengajar (sekolah) yang mempunyai peraturan dan bukti Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	N/A	10.00		20.00		40.00		50.00		70.00		100.00		100.00	
		10	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	% Puskesmas yang terakreditasi	0	30.00	200.0	100.00	400.0	100.00	400.0	100.00	250.0	100.00	200.0	100.00	200.0	100.00	1,650.0			
		11	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas. puskesmas pembantu dan jaringannya	% Puskesmas rawatan	88.88	100.00	5,017.0	100.00	3,000.0	100.00	3,500.0	100.00	4,000.0	100.00	4,500.0	100.00	5,000.0	100.00	25,017.0			
				Rasio Ketersediaan Puskesmas (Per 30.000 Penduduk)	1.69	1,69		1,69		1,69		1,69		1,69		1,69		1,69				
				Rasio Ketersediaan Puskesmas Pembantu (Per 5.000 Penduduk)	1.37	1,37		1,37		1,37		1,37		1,37		1,37		1,37				
				Rasio Ketersediaan Poskesdes (Per.2.500 Penduduk)	2.30	2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		2,3		2,3				
		12	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	64,21	70.00	8,000.0	80.00	8,000.0	90.00	8,000.0	100.00	8,000.0	100.00	8,000.0	100.00	8,000.0	100.00	48,000.0			
		13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	% jorong yang memiliki posyandu santun lansia	35,6	36.00	80.0	38.00	80.0	40.00	80.0	42.00	80.0	50.00	80.0	60.00	80.0	60.00	480.0			
		14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	5,2	5,2	360.0	5,1	380.0	5,1	395.0	5,1	405.0	5.00	410.0	5.00	410.0	5.00	2,360.0			
				Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100,000 Kelahiran Hidup	161,4	161,2		161.00		160,8		160,6		160,4		160,2		160,2				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
				% Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	N/A	70.00		75.00		80.00		100.00		100.00		100.00			
				% Ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	84,6	84,8		85.00		85,2		85,4		85,6		86.00		86.00	
				% Kunjungan neonatal lengkap	93,4	93,4		93,4		93,4		95.00		95.00		95.00		95.00	
		15	Program kesehatan kerja dan olahraga	% Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan olahraga	N/A	10.00	60.0	20.00	80.0	30.00	90.0	60.00	100.0	80.00	110.0	100.00	120.0	100.00	560.0
		16	Program peningkatan sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga medis dan tenaga paramedis per 100.000 penduduk (puskesmas, pustu, dan poskesdes)			770.0		800.0		810.0		810.0		810.0		810.0		4,810.0
				- Dokter	10,2	10,2		10,2		10,2		10,2		10,2		10,2		10,2	
				- Perawat	47,5	47,5		47,5		47,5		47,5		47,5		47,5		47,5	
				- Bidan	43,8	43,8		43,8		43,8		43,8		43,8		43,8		43,8	
				% Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (kesling, kefarmasian, gizi, kesehatan masyarakat, dan analisis kesehatan)	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	4		URUSAN KESEHATAN (RSUD)				28,384.6		40,358.9		37,725.2		39,774.2		43,248.2		45,826.2		235,317.3
		1	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase informasi kesehatan yang diselenggarakan	100.00	100.00	112.0	100.00	200.0	100.00	220.0	100.00	250.0	100.00	280.0	100.00	300.0	100.00	1,362.0
		2	Program pengadaan. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan standar rumah sakit tipe B	60.00	60.00	10,712.4	70.00	19,018.7	80.00	15,714.0	90.00	15,348.0	100.00	14,377.0	100.00	12,290.0	100.00	87,460.1
		3	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100.00	100.00	282.0	100.00	500.0	100.00	595.0	100.00	670.0	100.00	800.0	100.00	800.0	100.00	3,647.0
		4	Program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan di rumah sakit tipe B			2,153.2		2,461.2		2,551.2		2,641.2		2,731.2		2,371.2		14,909.2
				- Dokter spesialis (25 orng)	48.00	48.00		58.00		68.00		78.00		88.00		100.00		100.00	
				- Dokter umum (21 Orang)	47.62	47.62		60.00		70.00		80.00		90.00		100.00		100.00	
				- Perawat/Bidan (200 orang)	62.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				kesiapan Akreditasi JCI (%)	10.00	10.00		50.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		5	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase persediaan darah di rumah sakit	100.00	100.00	15,030.0	100.00	17,545.0	100.00	18,550.0	100.00	20,055.0	100.00	25,060.0	100.00	30,065.0	100.00	126,305.0
				Ketersediaan operasional BLUD untuk memaksimalkan pelayanan rumah sakit	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		6	Program koordinasi kesejahteraan sosial	Persentase Tersedianya tanah untuk pengembangan Rumah Sakit Umum	60.00	60.00	95.0	80.00	634.0	80.00	95.0	100.00	810.0		-		-	100.00	1,634.0
	5		URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				173,709.9		175,347.9		196,271.9		206,258.9		177,790.9		175,788.9		1,105,168.4
		1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	51,52	63.64	7,332.4	68.00	10,965.4	75.00	28,265.4	83.00	28,265.4	91.00	5,265.4	100.00	5,265.4	100.00	85,359.4
				Persentase Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (Full Desain)	-	10.00		30.00		50.00		70.00		85.00		100.00		100.00	
		2	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun (KM)	1,980.58	5.00	115,701.0	10.00	113,597.0	10.00	113,706.0	10.00	123,706.0	10.00	124,567.0	10.00	124,567.0	55.00	715,844.0
				Jumlah Jembatan yang dibangun (Unit)	166.00	18.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		53.00	
				Jalan Kabupaten Yang ditingkatkan Menjadi Jalan Aspal	191.87	13.63		16.27		18.92		21.86		24.80		27.74		123.22	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		3	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik	20.51	28.81	1,226.0	37.11	1,769.0	45.41	1,869.0	53.71	1,926.0	62.01	1,926.0	70.00	1,826.0	70.00	10,542.0
				Persentase Jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	46.73	50.93		55.61		60.28		65.42		70.56		75.70		75.70	
		4	Program Peningkatan Sarana Kebinamargaan	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana kebinamargaan	N/A	10.00	844.5	10.00	844.5	30.00	2,844.5	50.00	3,844.5	60.00	2,844.5	62.00	844.5	62.00	12,067.0
		5	Program : Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Penambahan jalan Non Status yang dibangun (Km)	N/A	57.00	17,992.0	57.00	17,992.0	57.00	17,992.0	57.00	17,992.0	57.00	17,992.0	57.00	17,992.0	342.00	107,952.0
		6	Program: Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Akses Sanitasi Layak	27.45	37.00	3,719.0	47.00	4,840.0	57.00	7,000.0	67.00	6,095.0	77.00	4,469.0	80.00	4,469.0	80.00	30,592.0
				Akses Air Minum Layak	54.73	64.73		69.73		74.73		79.73		84.73		90.00		90.00	
		7	Program : Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	Keluar dari status daerah tertinggal	Belum	Belum	200.0	Belum	1,000.0	Belum	1,000.0	Sudah	1,000.0	Sudah	1,000.0	Sudah	1,000.0	Sudah	5,200.0
		8	Program : Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	60.00	1,809.0	70.00	2,100.0	80.00	2,100.0	90.00	2,100.0	95.00	2,100.0	95.00	2,100.0	95.00	12,309.0
				Panjang Drainase dibangun (km)	13.00	3.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		28.00	
		9	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Daerah Irigasi Kondisi baik (%)	N/A	45.00	19,632.0	50.00	20,000.0	55.00	18,000.0	68.00	16,000.0	75.00	14,000.0	85.00	14,000.0	85.00	101,632.0
				Perkuatan Tebing (Titik)	N/A	25.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		65.00	
				Pengendalian Banjir (Titik)	N/A	25.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		65.00	
		10	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah Embung dirbangun (Lokasi)	3.00	2.00	3,000.0	2.00	1,000.0	2.00	1,000.0	2.00	2,000.0	2.00	2,000.0	2.00	2,000.0	12.00	11,000.0
		11	Program : Perencanaan Tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang RDTR/RRTR	1.00	2.00	2,254.0	1.00	1,160.0	1.00	2,225.0	1.00	3,100.0	1.00	1,372.0	1.00	1,445.0	8.00	11,556.0
				Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang RTBL	1.00	1.00		-		1.00		1.00		-		-		4.00	
		12	Program : Pemanfaatan Ruang	Persentase Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum	N/A		-		-	100.00	170.0	100.00	120.0	100.00	130.0	100.00	140.0	100.00	560.0
		13	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	N/A	N/A	-	60.00	80.0	65.00	100.0	70.00	110.0	70.00	125.0	70.00	140.0	70.00	555.0
				Ketersediaan PPNS Penataan Ruang	5.00	-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		10.00	
	6		URUSAN PERTANAHAN				4,828.5		6,005.0		5,950.0		6,030.0		5,895.0		6,050.0		34,758.5
		1	Program : Pembangunan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Persentase Peningkatan Masyarakat yang mengajukan pendaftaran tanah	N/A	N/A	-	10.00	110.0	20.00	120.0	30.00	125.0	40.00	135.0	45.00	140.0	45.00	630.0
		2	Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kesediaan lahan untuk pembangunan	100.00	100.00	4,800.0	100.00	5,810.0	100.00	5,790.0	100.00	5,800.0	100.00	5,710.0	100.00	5,790.0	100.00	33,700.0
		3	Program : Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	100.00	100.00	28.5	100.00	35.0	100.00	40.0	100.00	45.0	100.00	50.0	100.00	50.0	100.00	248.5
		4	Program : Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Pengadaan Tanah (asset Pemerintah daerah) untuk Kepentingan Umum	-	-	-	100.00	50.0		-	100.00	60.0		-	100.00	70.0	100.00	180.0

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
	7		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			13,276.2		21,280.0		21,751.0		22,822.0		23,143.0		29,014.0		131,286.2	
		1	Program Pengembangan Perumahan	Penataan perumahan dan kawasan permukiman (Kawasan)	N/A	N/A	3,682.2	2.00	5,855.0	2.00	6,326.0	2.00	7,047.0	2.00	7,368.0	2.00	7,889.0	#VALUE!	38,167.2
				Pengembangan infrastruktur dan kawasan permukiman (lokasi)	N/A	8.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		133.00	
				Jumlah Lampu PJU yang diberi meteran (Titik)	56.00	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		42.00	
				Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM)	N/A	95.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		1,595.00	
		2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Kawasan Permukiman kumuh (Kawasan)	2.00	2.00	4,543.0	2.00	4,700.0	2.00	4,750.0	1.00	4,800.0	1.00	4,850.0	-	4,900.0	-	28,543.0
				Akses Sanitasi Layak	27.45	36.21		44.97		53.73		62.49		71.25		80.00		80.00	
		3	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Rata-rata persentase Swadaya masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar	10.00	10.00	5,051.0	10.00	9,000.0	10.00	9,000.0	10.00	9,000.0	10.00	9,000.0	10.00	14,000.0	10.00	55,051.0
		4	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase rumah akibat bencana yang dibantu	N/A	-	-	100.00	500.0	100.00	500.0	100.00	500.0	100.00	500.0	100.00	500.0	100.00	2,500.0
		5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Hidran pada fasilitas Publik	3.00	0	-	7.00	1,025.0	10.00	925.0	10.00	1,175.0	10.00	1,125.0	10.00	1,225.0	50.00	5,475.0
				Persentase ketersediaan sarana proteksi kebakaran pada gedung/kantor pemerintah	0	0		5.00		10.00		20.00		30.00		50.00		50.00	
		6	Program pengelolaan areal pemakaman	Tertaksananya pengelolaan areal pemakamam umum (Lokasi)	0,0	0.01	-	1.00	200.0	1.00	250.0	2.00	300.0	2.00	300.0	3.00	500.0	3.00	1,550.0
	8		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			5,235.0		6,880.0		10,985.0		10,975.0		10,505.0		10,600.0		55,180.0	
		1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah timbulan sampah yang dikelola (M3)	20,100	24,000	1,005.0	26,000	3,215.0	28,000	5,465.0	30,000	4,715.0	32,000	5,715.0	35,000	6,715.0	35,000	26,830.0
				Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	18.00	25.00		30.00		45.00		60.00		65.00		80.00		80.00	
		2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penghargaan Adipura	-	-	1,575.0	-	1,600.0	-	1,800.0	1.00	2,000.0	1.00	2,000.0	1.00	2,000.0	3.00	10,975.0
				Persentase Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan	10.00	12.00		15.00		17.00		20.00		22.00		25.00		25.00	
				% Tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase nagari yang mengikuti program kampung iklim (PROKLIM)	5.00	5.00	350.0	7.00	435.0	7.00	455.0	9.00	485.0	9.00	410.0	9.00	435.0	9.00	2,570.0
				jumlah kawasan DAS yang ditangani	-	-		-		1.00		3.00		4.00		5.00		13.00	
				Jumlah objek penggunaan jasa lingkungan	-	-		-		1.00		2.00		3.00		4.00		10.00	
		4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah kawasan yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	1.00	300.0	1.00	150.0	1.00	150.0	1.00	150.0	4.00	750.0

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	% Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi	9.00	10.00	155.0	11.00	310.0	13.00	365.0	15.00	170.0	20.00	175.0	25.00	180.0	25.00	1,355.0
				Persentase Ketersediaan data pokok LH	50.00	50.00		55.00		60.00		65.00		70.00		75.00		75.00	
		6	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Ambang baku kualitas udara	50.00	55.00	150.0	60.00	155.0	65.00	160.0	70.00	1,160.0	75.00	1,165.0	80.00	165.0	80.00	2,955.0
		7	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi hutan	jumlah objek ekowisata dan jasa lingkungan	0.00	0.00	-	-	-	1.00	130.0	2.00	180.0	3.00	230.0	4.00	280.0	10.00	820.0
		8	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	jumlah kasus kebakaran hutan	0	0	-	0	60.0	0	605.0	0	410.0	0	55.0	0	70.0	0	1,200.0
				ketersediaan sarana dan prasarana dasar pemadam kebakaran hutan	-	-		-		1.00		1.00		-		-		2.00	
		9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	Jumlah lokasi RTH	4.00	4.00	2,000.0	1.00	1,105.0	1.00	1,705.0	1.00	1,705.0	-	605.0	-	605.0	7.00	7,725.0
	9		URUSAN KETENRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				29,171.8		17,594.0		15,676.3		15,421.5		14,163.4		13,213.7		105,240.7
		1	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio Ketersediaan PPNS (minimal 10 Orang)	10.00	20.00	760.6	40.00	1,658.5	60.00	1,660.5	80.00	1,662.5	100.00	1,664.5	100.00	1,666.5	100.00	9,073.2
				Rasio Ketersediaan Satpol PP (Standar Minimal 150-250)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				Cakupan Patroli Siaga Tibum dan Tranmas (kali/hari)	0,16	0,17		1.00		2.00		2.00		3.00		3.00		3.00	
		2	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	80.00	90.00	754.0		1,200.0		1,300.0		1,300.0		1,400.0		1,450.0	100.00	7,404.0
		3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Ketersediaan Satlinmas		-	-	100.00	800.0	100.00	360.0	100.00	410.0	100.00	463.0	100.00	499.0	100.00	2,532.0
				Persentase Satlinmas yang terlatih		-		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00	
		4	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase kasus Penyakit Masyarakat yang tertangani	N/A	30.00	10.0	100.00	300.0	100.00	310.0	100.00	320.0	100.00	330.0	100.00	350.0	100.00	1,620.0
		5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan Layanan	42.86	42.86	4,224.6	42.86	7,150.0	70.00	6,650.0	100.00	3,400.0	100.00	3,595.0	100.00	3,797.5	100.00	28,817.1
				Respon time (menit)	40.00	30.00		30.00		20.00		15.00		15.00		15.00		15.00	
		6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rata-rata Parsentase keikut sertaan Satpol PP dalam pelaksanaan kemah bakti sosial	18.00	18.00	66.2	18.00	90.0	18.00	90.0	18.00	100.0	18.00	110.0	18.00	110.0	18.00	566.2
		7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kriminalitas yang tertangani	29,2	44,7	282.8	50.00	281.9	53.00	313.4	65.00	353.1	80.00	387.5	90.00	414.0	90.00	2,032.8
		8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Hari Besar Nasional yang diperingati ditingkat Kab, Kecamatan dan Nagari	20.00	36.25	282.2	46.50	1,456.2	56.75	1,612.2	73.00	1,000.0	83.25	1,000.0	85.00	1,386.1	85.00	6,736.7
				Situs PDRI yang direvitalisi		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	
		9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penanganan dan penyelesaian konflik sosial	100.00	100.00	82.4	100.00	387.3	100.00	460.1	100.00	505.5	100.00	548.0	100.00	607.5	100.00	2,590.7

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
		10	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Jumlah Pemilih pada PILEG 2019	83	-	287.1	637.1		688.3	85,60	2,055.4		2,215.4		898.1	85,60	6,781.5	
				Persentase Partisipasi Jumlah Pemilih pada PILPRES 2019	64	-					85,60						85,60		
				Persentase Partisipasi Jumlah Pemilih pada PILKADA 2020	69	-	-	-			-		87,85				87,85		
				Persentase ORMAS yang aktif	60	64	68.00	73.33		82.86		90.00		93.02		93.02			
		11	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Nagari Tangguh Bencana	17,94	28,20	346.8	46,15	600.0	64,10	700.0	82,05	700.0	92,30	515.0	100.00	440.0	100.00	3,301.8
		12	Program peningkatan kesiapsiagaan bencana	persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan benacana	62.00	62.00	381.6	71.00	2,620.0	81.00	885.0	90.00	2,935.0	95.00	1,235.0	100.00	795.0	100.00	8,851.6
		13	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	% rata-rata rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum yang di perbaiki	60.00	65.00	21,693.5	65.00	412.9	65.00	646.8	65.00	680.0	65.00	700.0	65.00	800.0	65.00	24,933.2
	10		URUSAN SOSIAL				1,130.0		1,860.6		1,830.0		1,875.0		2,000.7		1,976.8		10,673.0
		1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) Lainnya	Ketersediaan tenaga Pendamping Sosial (standar 66 Orang)	84.85	84.85	756.0	100.00	718.6	100.00	755.0	100.00	780.0	100.00	895.0	100.00	845.3	100.00	4,749.8
				Rata-rata rumah tangga miskin yang mendapat bantuan bedah rumah (RTM) (APBD+APBN)	132.00	109.00		109.00		109.00		109.00		109.00		109.00		654.00	
		2	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial	25.00	26.00	295.0	30.00	842.1	35.00	800.0	40.00	820.0	45.00	830.7	50.00	846.5	50.00	4,434.2
				Persentase gedung/fasum yang resposif difabel	-	-		10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00	
		3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan Sosial masyarakat	3.00	3.00	79.0	3.00	300.0	3.00	275.0	3.00	275.0	3.00	275.0	3.00	285.0	3.00	1,489.0
				Persentase penduduk bekerja yang membayar zakat melalui Baznas	6,03	6,03		7.00		8.00		9.00		9.50		10.00		10.00	
	11		URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1,420.0		2,434.3		2,676.8		2,874.9		3,086.3		3,136.1		15,628.4
		1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	Persentase Rata -Rata Alokasi Dana Desa	10.00	10.00	527.1	10.00	607.2	10.00	673.7	10.00	734.3	10.00	795.6	10.00	697.9	10.00	4,035.8
				Perbandingan Teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dihasilkan (%)	-	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	
				% Kelompok BP-SPAM Aktif	50.00	60.00		70.00		80.00		85.00		90.00		95.00		95.00	
		2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Kelompok swadaya masyarakat aktif			123.7		128.7		133.8		139.2		144.7		150.5		820.6
				% KJKS Aktif	30.43	50.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				% Kelompok SPP Aktif	91.59	91.59		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				Persentase Nagari yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari	-	10.26		30.77		51.28		74.36		100.00		100.00		100.00	
		3	Program peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase minimal Dana Nagari yang digunakan dengan pola partisipatif	N/A	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00		60.00	
		4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur nagari yang memperoleh pelatihan sesuai tupoksi	100.00	100.00	132.1	100.00	312.7	100.00	366.2	100.00	388.5	100.00	411.5	100.00	445.0	100.00	2,056.0

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
				Jumlah Aparatur Nagari yang berprestasi tingkat Provinsi (orang)	-	-	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00		
		5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Nagari yang menyusun APB tepat waktu	-	40.00	89.9	100.00	279.8	100.00	300.0	100.00	320.0	100.00	340.0	100.00	350.0	100.00	1,679.7
				Persentase Nagari yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu	-	40.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		6	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Nagari	Persentase Terlaksananya Profil Nagari Berbasis IT	-		197.3	50.00	468.7	100.00	540.3	100.00	603.7	100.00	677.7	100.00	747.2	100.00	3,234.9
				Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi	-	-		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00	
	12		URUSAN TENAGA KERJA				419.6		1,458.0		1,516.0		1,740.0		1,900.0		2,120.0		9,153.6
		1	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja terampil yang dibina (orang)	100.00	160.00	235.2	240.00	655.0	240.00	706.0	256.00	880.0	288.00	1,000.0	320.00	1,200.0	1,504.00	4,676.2
				Rata-rata RTM yang mendapat pelatihan keterampilan kerja (RTM)	N/A	50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		300.00	
		2	Program peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	67,18	67,68	144.5	68,18	703.0	68,68	710.0	69,18	750.0	69,68	780.0	70.00	800.0	70.00	3,887.5
				Menurunkan tingkat pengangguran (%)	6.30	6.08		5.86		5.64		5.42		5.20		5.00		5.00	
		3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	% Kasus perselisihan tenaga kerja yang diselesaikan	100.00	100.00	40.0	100.00	100.0	100.00	100.0	100.00	110.0	100.00	120.0	100.00	120.0	100.00	590.0
				% Kasus peselisihan hubungan industrial	4.00	3,75		3,6		3,5		3,25		3.00		2,75		2,75	
	13		URUSAN TRANSMIGRASI				897.8		600.0		600.0		600.0		600.0		600.0		3,897.8
		1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase kesiapan pembangunan KPB	5.00	10.00	897.8	15.00	600.0	20.00	600.0	25.00	600.0	37.00	600.0	47.00	600.0	47.00	3,897.8
	14		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,068.3		3,167.4		3,270.9		3,373.0		3,488.7		3,588.3		18,956.7
		1	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	71.53	71.78	193.3	72.03	367.4	72.28	382.1	72.53	397.4	72.78	413.3	73.03	429.9	73.03	2,183.5
		2	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase ketersediaan Perda/Perbup/ SK KDH mengenai Pelaksanaan PUG dan Pemenuhan Hak Anak	30.00	30.00	-	40.00	165.0	45.00	171.6	50.00	178.5	55.00	185.6	60.00	193.0	60.00	893.7
		3	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43.14	43.39	900.0	43.64	955.0	43.89	970.0	44.14	980.0	44.39	1,000.0	44.64	1,000.0	44.64	5,805.0
		4	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	40.00	80.00	-	80.00	365.0	80.00	379.6	80.00	394.8	80.00	410.6	80.00	427.0	80.00	1,977.0
		5	Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Keluarga Sejahtera (%)	90.19	91.19	975.0	92.19	1,315.0	93.19	1,367.6	94.19	1,422.3	95.19	1,479.2	96.19	1,538.4	96.19	8,097.5
	15		URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2,338.0		2,424.7		2,610.5		2,713.0		2,813.8		2,971.2		15,871.3
		1	Program penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana	% ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB	100.00	100.00	1,566.7	100.00	1,631.6	100.00	1,760.2	100.00	1,813.7	100.00	1,874.2	100.00	1,979.7	100.00	10,626.1
		2	Program pengendalian penduduk	Jumlah Pasangan Usia subur yang mengikuti program KB (ribu jiwa)	30.09	30,095	65.0	30,284	65.8	30,474	66.0	30,664.00	73.0	30,854	75.0	31,044	79.0	31,044	423.8

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
		3	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	persentase remaja 10 s/d pra nikah dan keluarga remaja yang mendapat pelayanan informasi dan konseling	65.00	50.00	113.0	45.00	122.0	40.00	135.1	35.00	143.5	30.00	153.0	20.00	164.2	20.00	830.8
		4	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase pemasangan usia subur sebagai akseptor KB melalui program pemerintahan	80.00	75.00	98.5	65.00	90.8	55.00	93.1	50.00	97.6	45.00	105.1	40.00	107.7	40.00	592.8
		5	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase PUS sebagai Akseptor KB melalui program mandiri	20.00	25.00	445.8	35.00	465.6	45.00	485.1	50.00	510.2	55.00	530.5	60.00	563.6	60.00	3,000.8
		6	Program Pengembangan Model Operasional BKB=Posyandu-PADU	Terbentuknya dan terbinanya Kelompok BKB Posyandu PADU di setiap Nagari (Kelompok)	60.00	60.00	49.0	70.00	49.0	80.00	71.0	90.00	75.0	100.00	76.0	110.00	77.0	110.00	397.0
16			URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				1,254.4		2,389.2		2,428.5		2,477.1		2,567.7		2,611.7		13,728.5
		1	Program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan kartu keluarga	80.00	100.00	1,254.4	100.00	2,389.2	100.00	2,428.5	100.00	2,477.1	100.00	2,567.7	100.00	2,611.7	100.00	13,728.5
				Cakupan penerbitan KTP elektronik	73.00	77.00		79.00		82.00		85.00		90.00		100.00		100.00	
				Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	44.00	77.00		50.00		75.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan	4.20	25.00		50.00		75.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
17			URUSAN PANGAN				313.3		815.3		896.8		986.5		1,006.2		1,026.4		5,044.5
		1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (%)	51.60	57.16	313.3	62.72	815.3	68.28	896.8	73.84	986.5	79.40	1,006.2	85.00	1,026.4	85.00	5,044.5
				Penguatan Cadangan Pangan (ton)	182.00	182.00		184.00		185.00		186.00		188.00		190.00		190.00	
18			URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,001.5		2,929.2		3,222.1		3,544.3		3,615.2		3,687.5		19,999.8
		1	Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi budidaya sebesar 20%/ tahun (ton)	900.00	900.00	2,810.0	1,130.00	2,621.7	1,340.00	2,822.1	1,645.00	3,037.3	1,810.00	3,126.2	1,990.00	3,337.5	1,990.00	17,754.8
				Rata-rata RTM penerima bantuan usaha ekonomi di bidang perikanan	N/A	N/A		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	
		2	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah kelembagaan dan kelompok Perikanan :			59.4		80.0		170.0		112.0		192.0		130.0		743.4
				Pokmaswas	10.00	10.00		10.00		12.00		14.00		16.00		16.00		16.00	
				Pokdakan	25.00	25.00		25.00		25.00		30.00		35.00		35.00		35.00	
				Orang pelaku usaha	N/A	N/A		60.00		110.00		125.00		175.00		235.00		235.00	
		3	Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan dan jaminan keamanan pangan produk perikanan (kg/kapita)	20.30	20.30	132.1	20.80	227.5	21.50	230.0	22.00	395.0	23.00	297.0	24.00	220.0	24.00	1,501.6
19			URUSAN PERHUBUNGAN				937.6		5,448.0		3,744.0		7,875.0		5,460.0		5,865.0		29,329.6
		1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	% Terminal yang beroperasi	0	0	62.3	25.00	725.0	50.00	185.0	75.00	880.0	75.00	580.0	100.00	1,335.0	100.00	3,767.3
		2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	% Prasarana dan Fasilitas Transportasi dan LLAJ dalam kondisi baik	20.00	30.00	45.0	40.00	590.0	55.00	655.0	70.00	190.0	84.00	245.0	95.00	280.0	95.00	2,005.0
		3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio Ketersediaan Angkutan umum (per 10.000)	0.68	0.90	182.8	1.12	444.0	1.34	469.0	1.56	805.0	1.78	1,430.0	2.00	1,490.0	2.00	4,820.8
		4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	% Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					2,100.0		150.0		3,175.0		1,775.0		1,620.0		8,820.0

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
				Terminal Angkutan Orang (4 Terminal)	50.00	50.00		50.00		50.00		50.00		75.00		100.00		100.00	
				Terminal Angkutan Barang (1 Terminal)	-	-		-		-		-		-		100.00		100.00	
				Halte (15 Halte)	13.30	13.00		26.60		39.90		60.00		80.00		100.00		100.00	
				Dermaga Sampan Bermotor (3 Dermaga)	33.33	33.33		33.33		33.33		33.33		100.00		100.00		100.00	
	5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Solok Selatan	N/A	20.00	477.5	40.00	800.0	60.00	800.0	70.00	800.0	80.00	800.0	90.00	800.0	90.00	4,477.5	
	6	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor	20.00	20.00	170.0	40.00	695.0	60.00	245.0	80.00	225.0	90.00	300.0	95.00	260.0	95.00	1,895.0	
	7	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	% ketersediaan tanah untuk terminal dan demaga	40.00	40.00	-	40.00	94.0	60.00	1,240.0	100.00	1,800.0	100.00	330.0	100.00	80.0	100.00	3,544.0	
	20	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1,625.0		3,075.0		3,760.0		4,770.0		4,780.0		4,790.0	22,800.0	
	1	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan publik berbasis IT	2.00	2.00	150.0	4.00	1,225.0	6.00	2,235.0	8.00	3,245.0	10.00	3,255.0	12.00	3,265.0	12.00	13,375.0	
			Jumlah blank spot di area pemukiman	19.00	19.00		15.00		10.00		6.00		3.00		3.00		0		
	2	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan media masa	Cakupan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	100.00	100.00	100.0	100.00	125.0	100.00	100.0	100.00	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	625.0	
	3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Persentasi pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat	N/A	N/A	1,300.0	100.00	1,300.0	100.00	1,350.0	100.00	1,350.0	100.00	1,350.0	100.00	1,350.0	100.00	8,000.0	
	4	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan infomrtika	Tersedianya dokumen pembangunan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (Dokumen)				1.00	350.0								1.00	350.0		
	5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika	Prersentase Aplikasi Informasi data yang diimplentasikan	100.00	100.00	75.0	100.00	75.0	100.00	75.0	100.00	75.0	100.00	75.0	100.00	75.0	100.00	450.0	
	21	URUSAN STATISTIK					35.0		173.0		400.0		500.0		600.0		500.0	2,208.0	
	1	Program Pengembangan data dan informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral yang dipublikasikan	100.00	100.00	35.0	100.00	173.0	100.00	400.0	100.00	500.0	100.00	600.0	100.00	500.0	100.00	2,208.0	
	22	URUSAN PERSANDIAN					-		265.0		170.0		90.0		200.0		230.0	955.0	
	1	Program Pengelolaan Persandian Daerah	Persentase OPD yang menyusun SOP Persandian	N/A	N/A		50.00	265.0	75.00	170.0	100.00	90.0	100.00	200.0	100.00	230.0	100.00	955.0	
	23	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					518.0		1,875.0		1,850.0		1,960.0		2,000.0		2,120.0	10,323.0	
	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	persentase koperasi aktif	48.00	52.00	205.0	56.00	615.0	60.00	620.0	64.00	690.0	68.00	690.0	70.00	770.0	67.00	3,590.0	
	2	Program penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif	Jumlah UMKM yang dibina	100.00	120.00	120.0	70.00	400.0	80.00	230.0	80.00	240.0	80.00	250.0	80.00	260.0	510.00	1,500.0	
	3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM	Jumlah pengelola UMKM yang mengikuti pelatihan diklat dan bimtek (orang)	250.00	34.00	70.0	142.00	360.0	146.00	500.0	147.00	530.0	148.00	560.0	159.00	590.0	776.00	2,610.0	
	4	Program Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan	40.00	50.00	123.0	50.00	500.0	50.00	500.0	40.00	500.0	40.00	500.0	45.00	500.0	275.00	2,623.0	
	24	URUSAN PERDAGANGAN					3,405.0		4,245.0		6,930.0		8,845.0		6,920.0		7,870.0	38,215.0	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		3	Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah sanggar berprestasi tingkat provinsi	5.00	5.00	450.0	5.00	930.0	5.00	910.0	5.00	1,060.0	5.00	1,030.0	5.00	1,190.0	30.00	5,570.0
				jumlah sanggar berprestasi tingkat nasional	1.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		12.00	
	29		URUSAN PARIWISATA				3,150.0		7,810.0		9,385.0		9,460.0		12,185.0		10,650.0		52,640.0
		1	Pengembangan Destinasi Pariwisata	objek wisata unggulan	2.00	2.00	2,750.0	3.00	5,750.0	3.00	6,400.0	4.00	7,250.0	4.00	7,500.0	5.00	8,450.0	5.00	38,100.0
				objek wisata yang dikelola oleh Nagari/Pokdarwis	1.00	5.00		11.00		16.00		21.00		26.00		31.00		31.00	
		2	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	event nasional	-	1.00	400.0	2.00	1,780.0	2.00	1,835.0	2.00	1,890.0	2.00	1,945.0	2.00	2,000.0	11.00	9,850.0
				event internasional	-	-		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		10.00	
				kunjungan wisatawan domestik (orang)	2,750	2,750		3,000		4,000		5,000		7,000		10,000		31,750	
				kunjungan wisatawan Internasional (orang)	N/A	N/A		500		600		1,000		1,500		2,000		5,600	
		3	Pengembangan Kemitraan	Jumlah pokdarwis	-	6.00	-	11.00	130.0	16.00	150.0	21.00	220.0	26.00	240.0	31.00	200.0	31.00	940.0
		4	Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Tanah objek wisata yang bersertifikat	5.60	5.60		5.60	150.0	7.60	1,000.0	7.60	100.0	12.60	2,500.0			12.60	3,750.0
	30		URUSAN PERPUSTAKAAN				64.4		585.0		710.0		760.0		810.0		810.0		3,739.4
		1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase Perpustakaan Nagari yang dibina	21.00	21.00	64.4	40.00	500.0	60.00	550.0	70.00	600.0	90.00	650.0	100.00	650.0	100.00	3,014.4
				Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	598.00	600.00		650.00		700.00		800.00		900.00		1,000.00		1,000.00	
				Penambahan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah															
				* Jumlah Judul Buku	2.922	2922		3,422.00		3,922.00		4,422.00		4,922.00		5,422.00		5,422.00	
				* Jumlah Buku	8.764	8764		10,264.00		11,764.00		13,264.00		14,764.00		16,264.00		16,264.00	
		2	Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya Baca	Meningkatnya angka melek huruf	98.87	99.06		99.16	85.0	99.26	160.0	99.36	160.0	99.46	160.0	99.56	160.0	99.56	725.0
	31		URUSAN ARSIP				60.9		842.0		923.5		1,021.0		1,041.5		1,062.5		4,951.4
		1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah	Jumlah Arsip daerah yang diselamatkan dan didokumentasikan	-	25	60.9	25	658.0	25	738.0	25	941.0	25	856.0	25.00	912.0	150.00	4,165.9
				Persentase OPD yang telah menerapkan Arsip Secara baku	3.00	13.00		17.00		30.00		40.00		57.00		83.00		83.00	
				Persentase Nagari yang telah merapkan Arsip Secara baku	21.00	26.00		41.00		54.00		69.00		84.00		100.00		100.00	
		2	Program Perbaikan Sistem Adminitrasi Kearsipan	Implementasi data base informasi kearsipan (e-arsip)	-	-		belum	184.0	Sudah	185.5	Sudah	80.0	Sudah	185.5	Sudah	150.5	Sudah	785.5
	32		URUSAN PERTANIAN				14,490.7		25,648.0		25,907.1		26,590.6		27,146.8		27,419.2		147,202.4
		1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan unggulan		10,009.3		13,860.0		13,840.0		14,150.0		14,580.0		14,690.0		81,129.3	
				Produksi Padi	131,437	135,380		139,442		143,625		147,934		152,372		156,943		156,943	
				Produksi Jagung	54,074	55,696		57,367		59,088		60,861		62,687		64,567		64,567	
				Produksi Kopi	1,625	1,673		1,724		1,775		1,829		1,883		1,940		1,940	
				Produksi Tanaman Karet	12,027	12,388		12,760		13,142		13,537		13,943		14,361		14,361	
				Produksi Tanaman Sawit	2,577	2,654		2,734		2,816		2,900		2,987		3,077		3,077	
		2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	95.00	98.00	490.6	99.00	995.0	100.00	1,010.0	102.00	922.0	103.00	1,004.9	104.00	1,028.7	104.00	5,451.2

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
		3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Terjaminnya kecukupan pangan (swasembada pangan) (ton)	78,861	79,650	1,722.3	80,446	3,100.0	81,251	3,171.3	82,063	3,357.4	82,884	3,470.1	83,713	3,444.9	83,713	18,265.9
		4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya indeks harga yang diterima petani	N/A	110.00	51.8	111.10	150.0	112.21	150.0	113.33	165.0	114.47	171.6	115.61	175.0	115.61	863.4
		5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perkebunan unggulan			215.0		1,200.0		1,298.1		1,303.9		1,078.5		1,142.6		6,238.1
				Padi (ton/ha)	4.93	4.96		4.99		5.02		5.05		5.08		5.11		5.11	
				Jagung (ton/ha)	3.59	3.63		3.67		3.71		3.75		3.79		3.83		3.83	
				Kopi (ton/ha)	0.50	0.57		0.64		0.71		0.78		0.85		0.92		0.92	
				Tanaman Karet (ton/ha)	0.74	0.76		0.78		0.80		0.82		0.84		0.86		0.86	
				Tanaman Sawit (ton/ha)	1.24	1.29		1.34		1.39		1.44		1.49		1.54		1.54	
		6	Program Pemberdayaan Penyuluhan/ Perkebunan Lapangan	% Ketersediaan Peyuluh pertanian	37,83	44,14	529.0	50,45	643.0	56,76	717.7	63,07	811.4	69,38	895.8	75,67	961.8	75,67	4,558.7
		7	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Produksi Daging (ton/tahun)	385.90	418.05	-	449.21	160.0	480.37	165.0	511.53	178.0	542.69	215.0	578.85	220.0	578.85	938.0
				Telur (ton/tahun)	78.80	80.12		81.44		82.76		84.08		85.40		86.70		86.70	
		8	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah ternak besar (ekor)	15,651.00	16,494	1,124.2	17,336	5,000.0	18,179	5,000.0	19,022	5,000.0	19,864	5,000.0	20,707	5,000.0	20,707	26,124.2
				jumlah ternak kecil (ekor)	8,535.00	8,628		8,720		8,813		8,905		8,998		9,090		9,090	
				jumlah Unggas (ekor)	117,514.00	118,764		120,014		121,264		122,514		123,764		125,014		125,014	
		9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya indeks harga yang diterima petani	N/A	105.00	75.7	106.05	90.0	107.11	100.0	108.18	110.0	109.26	114.4	110.36	115.0	110.36	605.1
		10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan di masyarakat dan menurunnya penyakit ternak menular	100.00	100.00	272.7	100.00	450.0	100.00	455.0	100.00	592.9	100.00	616.6	100.00	641.2	100.00	3,028.4
C			BELANJA FUNGSI PENUNJANG	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			31,970.2		51,080.0		53,497.7		65,427.1		55,268.1		57,613.0		314,856.1
	1		FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				2,370.4		4,459.7		4,184.9		3,922.9		3,566.9		4,063.9		22,568.9
		1	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Kelengkapan Data dan Informasi untuk Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	80.00	85.00	298.0	100.00	445.0	100.00	485.0	100.00	525.0	100.00	560.0	100.00	600.0	100.00	2,913.0
		2	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar lembaga dan swasta yang disepakati	2.00	2.00	-	2.00	80.0	2.00	90.0	2.00	100.0	2.00	100.0	2.00	100.0	12.00	470.0
		3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Keluar dari status daerah tertinggal (belum/sudah)	belum	belum	284.9	belum	519.9	belum	659.9	sudah	671.9	sudah	461.9	sudah	461.9	sudah	3,060.6
				Persentase Nagari Tertinggal Daerah Tertinggal (Tahun 2019)	61.54	48.72		38.46		28.21		17.95		12.82		5.13		5.13	
				Tercapainya Universal Access Tahun 2019 (100-0-100)															
				- Akses Air minum layak (%)	54.73	60.20		66.10		72.00		77.90		83.80		90.00		90.00	
				- Pemukiman Kumuh (lokasi)	2.00	2.00		2.00		2.00		1.00		-		-		-	
				- Akses Sanitasi Layak (%)	27.45	36.15		44.85		53.55		62.25		70.95		80.00		80.00	
		4	Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah Perencanaan Prasarana Wilayah Perkotaan (dokumen)			2.00	300.0	1.00	100.0	1.00	100.0	1.00	100.0	1.00	100.0	6.00	700.0	
		5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan rutin SKPD yang tepat waktu	75.00	80.00	130.0	100.00	390.0	100.00	425.0	100.00	460.0	100.00	495.0	100.00	530.0	100.00	2,430.0
		6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	25.00	100.00	1,179.5	100.00	1,000.0	100.00	1,200.0	100.00	1,300.0	100.00	1,400.0	100.00	1,500.0	100.00	7,579.5
				Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
				Persentase pencapaian kinerja perencanaan daerah	N/A	N/A		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00	
		7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Penganggaran	N/A	100.00	350.0	100.00	375.0	100.00	525.0	100.00	425.0	100.00	175.0	100.00	425.0	100.00	2,275.0
				Menurunkan Angka Kemiskinan	7.52	7.32		7.12		6.92		6.72		6.52		6.32		6.32	
				Menurunkan Angka Pengangguran	6.30	6.10		5.90		5.70		5.50		5.30		5.10		5.10	
		8	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan Penganggaran	N/A	100.00	128.0	100.00	880.0	100.00	200.0	100.00	266.0	100.00	200.0	100.00	272.0	100.00	1,946.0
				Persentase pencapaian target RAD SDGs						90.00		90.00		95.00		95.00		95.00	
				Tingkat Penghargaan Kabupaten Sehat	-	-		padapa				wiwerda				wistara		wistara	
		9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Terciptanya Sistem Perencanaan yang Terintegrasi antar Fungsi Pemerintah (dokumen)			-	5.00	224.8	2.00	450.0	1.00	50.0	1.00	50.0	1.00	50.0	10.00	824.8
		10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Konsistensi antara Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan			-	100.00	245.0	100.00	50.0	100.00	25.0	100.00	25.0	100.00	25.0	100.00	370.0
	2		FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					200.0		950.0		1,075.0		1,425.0		750.0		525.0	4,925.0
		1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah		100.00	200.0	100.00	950.0	100.00	1,075.0	100.00	1,425.0	100.00	750.0	100.00	525.0	100.00	4,925.0
	3		FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN					6,349.5		8,414.6		8,688.5		7,991.1		7,857.8		8,277.3	47,578.8
		1	Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WDP	WDP	6,349.5	WTP	8,414.6	WTP	8,688.5	WTP	7,991.1	WTP	7,857.8	WTP	8,277.3	WTP	47,578.8
				Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				Persentase pelaporan keuangan nagari dan PPKD yang sesuai aturan	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
				Persentase pencapaian target PAD	0.98	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	4		FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN					4,801.0		7,880.0		9,054.0		9,334.3		9,334.6		9,555.2	49,959.1
		1	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase eselonering yang telah mengikuti Diklat Struktural			1,250.0		4,500.0		5,000.0		5,000.0		5,000.0		5,000.0		25,750.0
				-Eselon II	52.00	56.00		53.00		57.00		63.00		70.00		77.00		77.00	
				-Eselon III	44.00	45.00		50.00		60.00		68.00		74.00		80.00		80.00	
				-Eselon IV	15.00	25.00		35.00		45.00		55.00		65.00		75.00		75.00	
		2	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana			1,207.5		730.0		1,033.0		1,097.3		1,151.6		1,226.2		6,445.6
				- S1	51.00	51.00		56.00		59.00		66.00		73.00		80.00		80.00	
				- S2	3.00	3.00		4.32		5.74		7.16		8.58		10.00		10.00	
				- S3	0.10	0.10		0.12		0.14		0.16		0.18		0.20		0.20	
		3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai bidang keahlian berdasarkan analisa jabatan	N/A	N/A	2,258.5	45.00	2,500.0	60.00	2,866.0	75.00	3,077.0	80.00	3,018.0	80.00	3,159.0	80.00	16,878.5
				Perentse penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin	N/A	50.00		70.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00	
		4	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas ASN	persentase aparatur purna tugas yang diberikan pembekalan	N/A	N/A	85.0	50.00	150.0	50.00	155.0	50.00	160.0	50.00	165.0	50.00	170.0	50.00	885.0
				Jumlah penyelesaian SK pensiun dan taspen	341.00	69.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
5		FUNGSI PENUNJANG PELAYANAN PEMERINTAHAN			18,249.3		29,375.8		30,495.3		42,753.7		33,758.7		35,191.5		189,824.3	
5.1		SEKRETARIAT DAERAH			5,120.6		14,178.5		14,423.5		25,468.5		15,698.5		16,233.5		91,123.1	
	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peringkat Camat Berprestasi tingkat provinsi	N/A	6.00	145.0	4.00	200.0	3.00	130.0	2.00	225.0	1.00	150.0	1.00	250.0	1.00	1,100.0
	2	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase layanan kedinasan KDH yang terfasilitasi	100.00	100.00	575.0	100.00	1,140.0	100.00	1,305.0	100.00	1,365.0	100.00	1,625.0	100.00	1,635.0	100.00	7,645.0
	3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LAKIP / SAKIP	C	C	465.4	CC	950.0	B	995.0	BB	1,050.0	BB	1,245.0	A	1,130.0	A	5,835.4
	4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah penghargaan untuk mencapai ISO (17 Penghargaan)	4.00	-	-	13.00	575.0	17.00	375.0	17.00	380.0	17.00	380.0	17.00	380.0	17.00	2,090.0
			Jumlah ISO 9002	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
	5	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang tertangani	N/A	N/A	-	100.00	60.0	100.00	20.0	100.00	25.0	100.00	30.0	100.00	35.0	100.00	170.0
	6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Perangkat Daerah tepat Struktur dan tepat Fungsi	N/A	100.00	445.0	100.00	320.0	100.00	445.0	100.00	485.0	100.00	385.0	100.00	410.0	100.00	2,490.0
			Jumlah segmen batas kecamatan dan Dokumen batas	NA	7.00	-	7.00	-	7.00	-	7.00	-	7.00	-	7.00	-	42.00	
	7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jabatan Tepat Jumlah dan Tepat Kompetensi	N/A	N/A	-	80.00	250.0	90.00	125.0	100.00	125.0	100.00	125.0	100.00	-	100.00	625.0
	8	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rata-rata Persentase Pencapaian SPM per urusan	70.00	70.00	59.1	75.00	60.0	80.00	60.0	85.00	60.0	90.00	60.0	95.00	60.0	95.00	359.1
			Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Cukup	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	
			Persentase Penetapan SOP pelayanan OPD	26.00	50.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
	9	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Persentase pencapaian kinerja SKPD	N/A	N/A	50.0	95.00	2,515.0	95.00	2,540.0	95.00	2,565.0	100.00	2,590.0	95.00	2,610.0	95.00	12,870.0
	10	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya penyusunan Produk hukum daerah	100.00	100.00	519.3	100.00	1,135.5	100.00	1,345.5	100.00	1,025.5	100.00	1,260.5	100.00	1,065.5	100.00	6,351.8
			Prestasi Kelompok Sadar Hukum tingkat provinsi	N/A	N/A	-	10.00	-	5.00	-	3.00	-	2.00	-	1.00	-	1.00	
	11	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa **)	Persentase stake holder barang dan jasa yag dibina	98.00	100.00	112.0	100.00	315.0	100.00	325.0	100.00	330.0	100.00	335.0	100.00	340.0	100.00	1,757.0
	12	Program Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa **)	Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa			350.0		705.0		710.0		715.0		720.0		725.0		3,925.0
			Lelang	99.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
			Pengadaan Langsung	N/A	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
			Penunjukan langsung	N/A	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
			Swakelola	N/A	N/A	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
			E-Catalog	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
	13	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	persentase media lokal yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	100.00	100.00	930.0	100.00	1,395.0	100.00	1,550.0	100.00	1,810.0	100.00	1,710.0	100.00	1,890.0	100.00	9,285.0
	14	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasi	90.00	95.00	75.0	100.00	160.0	100.00	170.0	100.00	300.0	100.00	260.0	100.00	200.0	100.00	1,165.0
	15	Program Pelayanan Protokol (Pemerintah daerah*)	Terfasilitasinya acara keprotokoleran	75.00	80.00	75.0	100.00	205.0	100.00	235.0	100.00	175.0	100.00	235.0	100.00	175.0	100.00	1,100.0

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
		16	Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama	Peringkat pada MTQ Nasional Tingkat Provinsi	18.00		1,142.4	16.00	4,073.0		3,968.0	12.00	14,703.0		4,453.0	10.00	5,188.0	10.00	33,527.4
				Tuan rumah MTQ Nasional tingkat provinsi	belum	belum		belum		belum		sudah		sudah		sudah		sudah	
				Jumlah kegiatan lomba-lomba keagamaan	4.00	4.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	
				Jumlah masyarakat yang berprestasi dibidang keagamaan tingkat provinsi	N/A	-		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		10.00	
		17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	persentase kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	30.00	40.00	90.0	50.00	120.0	60.00	125.0	70.00	130.0	80.00	135.0	85.00	140.0	85.00	740.0
		18	Program Peningkatan Penataan, Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Lahan	Persentase kasus-kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100.00	100.00	87.4											87.4	
	5.2		SEKRETARIAT DPRD				10,548.1		10,948.9		11,605.9		12,534.4		13,035.7		13,557.2		72,230.2
		01	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Presentase Jumlah Ranperda usulan Pemda yang dibahas DPRD yang menjadi Perda	47.00	100.00	10,548.1	100.00	10,948.9	100.00	11,605.9	100.00	12,534.4	100.00	13,035.7	100.00	13,557.2	100.00	72,230.2
				Presentase Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang menjadi Perda (target 2 pertahun)	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	5.3		INSPEKTORAT				791.3		896.0		949.5		1,032.8		1,116.9		1,278.1		6,064.6
		1	Program peningkatan sumber daya aparatur	Persentase ketersediaan auditor dan P2UPD sebagai Auditor	14,28	28,57	45.0	42,85	45.0	57,17	45.0	71,42	55.0	85,71	55.0	100.00	55.0	100.00	300.0
		2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah	WDP	WDP	81.6	WTP	110.0	WTP	130.0	WTP	155.0	WTP	170.0	WTP	180.0	WTP	826.6
				Nilai LAKIP/SAKIP	C	C		CC		B		BB		BB		A		A	
				Persentase pelaporan keuangan nagari yang sesuai dengan aturan	N/A	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
		3	Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan.	30.00	40.00	584.7	50.00	550.0	60.00	585.0	70.00	614.5	75.00	655.0	80.00	800.0	80.00	3,789.2
		4	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	-	-		20.00	111.0	100.00	77.0	100.00	85.8	100.00	91.9	100.00	97.0	100.00	462.7
		5	Program peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	II dengan catatan	II dengan catatan	80.0	II	80.0	III dengan catatan	112.5	III	122.5	III	145.0	III	146.1	III	686.1
	5.6		KECAMATAN SANGIR				262.6		563.1		617.2		655.2		699.3		735.1		3,532.5
		1	Program Pelayanan Pemerintahan Sosial. Budaya dan Keagamaan	Tertaksananya pelayanan pemerintahan sosial, budaya dan keagamaan	100.00	100.00	158.6										100.00	158.6	
		2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	persentase penyaluran beras raskin	100.00	100.00	104.0										100.00	104.0	
		3	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan				100.00	55.0	100.00	67.0	100.00	75.4	100.00	90.5	100.00	102.6	100.00	390.6
		4	Fasilitasi dan Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban				100.00	12.0	100.00	12.6	100.00	13.2	100.00	13.9	100.00	14.6	100.00	66.3

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
		5	Fasilitas dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan			100.00	18.0	100.00	18.9	100.00	19.8	100.00	20.8	100.00	21.9	100.00	99.5	
		6	Fasilitas dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan			100.00	50.0	100.00	62.6	100.00	69.7	100.00	77.0	100.00	82.0	100.00	341.4	
		7	Fasilitas dan Koordinasi Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan			100.00	383.0	100.00	407.0	100.00	425.0	100.00	443.0	100.00	458.0	100.00	2,116.1	
				persentase penyaluran beras raskin			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		8	Rogram Pelayanan administrasi Terpadu	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan			100.00	45.0	1.00	49.0	1.00	52.0	1.00	54.0	1.00	56.0	100.00	256.0	
	5.7		KECAMATAN SUNGAI PAGU				301.6	588.4		594.4		625.9		651.8		673.9		3,435.9	
		1	Program Pelayanan Pemerintahan Sosial. Budaya dan Keagamaan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan sosial, budaya dan keagamaan	100.00	100.00	229.7										100.00	229.7	
		2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	persentase penyaluran beras raskin	100.00	100.00	71.88										100.00	71.9	
		3	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan			100.00	147.5	100.00	154.5	100.00	162.5	100.00	167.5	100.00	167.5	100.00	799.5	
		4	Fasilitas dan Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban			100.00	12.0	100.00	12.6	100.00	13.2	100.00	13.9	100.00	14.6	100.00	66.3	
		5	Fasilitas dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan			100.00	60.5	100.00	40.5	100.00	44.0	100.00	44.0	100.00	44.0	100.00	233.0	
		6	Fasilitas dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan			100.00	67.5	100.00	70.9	100.00	74.4	100.00	78.1	100.00	82.0	100.00	373.0	
		7	Fasilitas dan Koordinasi Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan			100.00	250.9	100.00	263.4	100.00	276.6	100.00	290.4	100.00	304.9	100.00	1,386.3	
				persentase penyaluran beras raskin			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		8	Rogram Pelayanan administrasi Terpadu	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan			100.00	50.0	100.00	52.5	100.00	55.1	100.00	57.9	100.00	60.8	100.00	276.3	
	5.8		KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH				283.7	464.3		487.5		511.8		537.4		564.3		2,848.9	
		1	Program Pelayanan Pemerintahan Sosial. Budaya dan Keagamaan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan sosial, budaya dan keagamaan	100.00	100.00	196.4										100.00	196.4	
		2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	persentase penyaluran beras raskin	100.00	100.00	87.25										100.00	87.3	
		3	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan			100.00	80.0	100.00	84.0	100.00	88.2	100.00	92.6	100.00	97.2	100.00	442.1	
		4	Fasilitas dan Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban			100.00	12.0	100.00	12.6	100.00	13.2	100.00	13.9	100.00	14.6	100.00	66.3	
		5	Fasilitas dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan			100.00	18.0	100.00	18.9	100.00	19.8	100.00	20.8	100.00	21.9	100.00	99.5	
		6	Fasilitas dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan			100.00	50.0	100.00	52.5	100.00	55.1	100.00	57.9	100.00	60.8	100.00	276.3	
		7	Fasilitas dan Koordinasi Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan			100.00	264.3	100.00	277.5	100.00	291.3	100.00	305.9	100.00	321.2	100.00	1,460.1	
				persentase penyaluran beras raskin			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
		8	Rogram Pelayanan administrasi Terpadu	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan			100.00	40.0	100.00	42.0	100.00	44.1	100.00	46.3	100.00	48.6	100.00	221.0	
	5.9		KECAMATAN SANGIR JUJUAN			206.8	448.5	464.8	505.0	528.0	583.9	2,736.9							
		1	Program Pelayanan Pemerintahan Sosial. Budaya dan Keagamaan	Tertaksananya pelayanan pemerintahan sosial, budaya dan keagamaan	100.00	100.00	183.3									100.00	183.3		
		2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	persentase penyaluran beras raskin	100.00	100.00	23.51									100.00	23.5		
		3	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan				122.0	122.0	145.0	150.0	187.0	100.00	726.0					
		4	Fasilitasi dan Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban			100.00	12.0	100.00	12.6	100.00	13.2	100.00	13.9	100.00	14.6	100.00	66.3	
		5	Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan			100.00	20.5	100.00	21.5	100.00	22.6	100.00	23.7	100.00	24.9	100.00	113.3	
		6	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan			100.00	52.5	100.00	55.1	100.00	57.9	100.00	60.8	100.00	63.8	100.00	290.1	
		7	Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan			100.00	201.5	100.00	211.6	100.00	222.1	100.00	233.2	100.00	244.9	100.00	1,113.4	
				persentase penyaluran beras raskin			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		8	Rogram Pelayanan administrasi Terpadu	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan			100.00	40.0	100.00	42.0	100.00	44.1	100.00	46.3	100.00	48.6	100.00	221.0	
	5.10		KECAMATAN SANGIR BATANG HARI			221.5	438.2	460.1	483.1	507.2	532.6	2,642.7							
		1	Program Pelayanan Pemerintahan Sosial. Budaya dan Keagamaan	Tertaksananya pelayanan pemerintahan sosial, budaya dan keagamaan	100.00	100.00	181.3									100.00	181.3		
		2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	persentase penyaluran beras raskin	100.00	100.00	40.17									100.00	40.2		
		3	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan			100.00	88.0	100.00	92.4	100.00	97.0	100.00	101.9	100.00	107.0	100.00	486.3	
		4	Fasilitasi dan Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban			100.00	12.0	100.00	12.6	100.00	13.2	100.00	13.9	100.00	14.6	100.00	66.3	
		5	Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan			100.00	25.5	100.00	26.8	100.00	28.1	100.00	29.5	100.00	31.0	100.00	140.9	
		6	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan			100.00	57.5	100.00	60.4	100.00	63.4	100.00	66.6	100.00	69.9	100.00	317.7	
		7	Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan			100.00	215.2	100.00	225.9	100.00	237.2	100.00	249.1	100.00	261.5	100.00	1,189.0	
				persentase penyaluran beras raskin			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		8	Rogram Pelayanan administrasi Terpadu	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan			100.00	40.0	100.00	42.0	100.00	44.1	100.00	46.3	100.00	48.6	100.00	221.0	
	5.11		KECAMATAN PAUH DUO			246.1	446.3	468.6	492.0	516.6	542.5	2,712.1							
		1	Program Pelayanan Pemerintahan Sosial. Budaya dan Keagamaan	Tertaksananya pelayanan pemerintahan sosial, budaya dan keagamaan	100.00	100.00	173.6									100.00	173.6		
		2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	persentase penyaluran beras raskin	100.00	100.00	72.50									100.00	72.5		
		3	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan			100.00	80.0	100.00	84.0	100.00	88.2	100.00	92.6	100.00	97.2	100.00	442.1	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. Juta)												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
		4	Fasilitasi dan Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban			100.00	12.0	100.00	12.6	100.00	13.2	100.00	13.9	100.00	14.6	100.00	66.3		
		5	Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan			100.00	18.0	100.00	18.9	100.00	19.8	100.00	20.8	100.00	21.9	100.00	99.5		
		6	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan			100.00	50.0	100.00	52.5	100.00	55.1	100.00	57.9	100.00	60.8	100.00	276.3		
		7	Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan			100.00	246.3	100.00	258.6	100.00	271.5	100.00	285.1	100.00	299.4	100.00	1,360.9		
				persentase penyaluran beras raskin			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
		8	Rogram Pelayanan administrasi Terpadu	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan			100.00	40.0	100.00	42.0	100.00	44.1	100.00	46.3	100.00	48.6	100.00	221.0		
	5.12		KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO				267.0	403.7	423.8		445.0		467.3		490.7		2,497.5			
		1	Program Pelayanan Pemerintahan Sosial. Budaya dan Keagamaan	Tertaksananya pelayanan pemerintahan sosial, budaya dan keagamaan	100.00	100.00	238.3									100.00	238.3			
		2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	persentase penyaluran beras raskin	100.00	100.00	28.66									100.00	28.7			
		1	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan			100.00	80.0	100.00	84.0	100.00	88.2	100.00	92.6	100.00	97.2	100.00	442.1		
		2	Fasilitasi dan Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban			100.00	12.0	100.00	12.6	100.00	13.2	100.00	13.9	100.00	14.6	100.00	66.3		
		3	Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan			100.00	18.0	100.00	18.9	100.00	19.8	100.00	20.8	100.00	21.9	100.00	99.5		
		4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan			100.00	50.0	100.00	52.5	100.00	55.1	100.00	57.9	100.00	60.8	100.00	276.3		
		5	Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan			100.00	203.7	100.00	213.8	100.00	224.5	100.00	235.8	100.00	247.6	100.00	1,125.4		
				persentase penyaluran beras raskin			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
		6	Rogram Pelayanan administrasi Terpadu	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan			100.00	40.0	100.00	42.0	100.00	44.1	100.00	46.3	100.00	48.6	100.00	221.0		
TOTAL							458,487.08	542,399.01	585,044.58	629,959.34	606,880.78	622,955.60	3,445,726.39							

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir periode masa jabatan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

9.1. Penentuan Indikator Kinerja.

Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah tidak lain merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan yang harus dikejar dan didukung SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator:

- a. *Exact*: ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
- b. *Proxy*: indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
- c. *Activity*: indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Sebagian besar indikator kinerja daerah untuk RPJMD merupakan indikator *exact* dan *proxy*. Sementara indikator *activity* lebih banyak dipakai untuk mengukur kinerja SKPD. Namun pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan indikator RPJMD.

Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisa SWOT.

Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang diinginkan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena apa yang diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dengan kondisi yang ada kepemimpinan saat ini tertantang untuk berbuat lebih baik, meskipun pasangan Bupati dan Wakil Bupati memantapkan dan melanjutkan program sebelumnya. Karenanya kepemimpinan saat ini membutuhkan semangat dan loyalitas aparatnya. Semangat dan loyalitas ini salah satunya tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja ini membutuhkan dukungan pula dari masyarakat serta DPRD secara objektif dan rasional.

Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik dan aspek formal yang diisyaratkan. Aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik internal SKPD, Instansi Vertikal, lembaga dan organisasi sosial masyarakat, Perguruan Tinggi dan perantau. Sebelum Musrenbang RPJMD terlebih dahulu ditampung saran dan masukan dari DPRD secara kelembagaan melalui Panitia Khusus. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada.

Aspek formal tersebut diantaranya menyangkut perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
- b. *Well Defined*, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah

untuk dimengerti dan digunakan.

- c. *Measurable*, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
- d. *Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
- e. *Reliable*, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
- f. *Verifiable*, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
- g. *Cost-effective*, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Kriteria di atas sebagian dipakai untuk menentukan indikator RPJMD, namun sebagian yang lain dipakai dalam menentukan indikator kinerja SKPD.

9.2. Indikator dan Target Kinerja.

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2016 sampai 2021. Sebagai referensi maka digunakan data time series lima tahun sebelumnya sebagai pembandingan yaitu tahun 2011-2015.

Target kinerja menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C). Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Terukur (*Measurable*) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (*achievable*) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. Relevan (*relevant*) karena telah disesuaikan dengan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (*time bond*) karena memiliki batasan periode tahun 2016-2021 serta target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (*continuously improve*) yaitu telah melakukan peningkatan secara terus menerus dan atau bertahap setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 9.1.

Tabel 9.1.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	67,09	67,20	67,67	68,14	68,61	69,09	69,56
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,35	5,40	5,60	5,80	6,00	6,20	6,40
1.3	PDRB Harga Berlaku	Rp. Juta	4.224.476,58	4.646.924,24	5.111.616,66	5.622.778,33	6.185.056,16	6.803.561,78	7.483.917,95
1.4	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Jt	26,44	27,93	29,85	31,76	33,68	35,60	37,52
1.5	Pengeluaran Perkapita	Rp/Bulan	915.226	921.022	926.818	932.614	938.410	944.206	950.000
1.6	Indek Gini Ratio	Indek	0,384	0,369	0,354	0,339	0,325	0,3100	0,295
1.7	Investasi (ADHK)	Rp. Milyar	1100,99	1.178,06	1.260,52	1.348,76	1.443,17	1.544,20	1.652,29
1.8	Tingkat Pengangguran	%	6,30	6,10	5,90	5,70	5,50	5,30	5,10
1.9	Tingkat Kemiskinan	%	7,52	7,32	7,12	6,92	6,72	6,52	6,32
1.10	Jumlah Daerah Tertinggal	Nagari	19	15	10	5	2	1	1
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
I	Pelayanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan								
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,98	8,15	8,32	8,49	8,66	8,83	9,00
1.2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,15	12,29	12,43	12,57	12,71	12,85	13,00
1.3	Angka Putus Sekolah								
	a.SD/MI	%	0,39	0,32	0,25	0,18	0,11	0,04	0,00
	b.SMP/MTs	%	0,18	0,15	0,12	0,09	0,06	0,03	0,00
	c.SMA/SMK/MA	%	0,87	0,72	0,57	0,42	0,28	0,14	0,00
1.4	Angka Melek Huruf	%	97,70	97,92	98,14	98,36	98,58	98,80	99,00
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	112,54	112,64	112,74	112,84	112,94	113,04	113,14
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	108,94	109,07	109,20	109,33	109,46	109,59	109,72
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	94,20	94,40	94,60	94,80	95,00	95,20	95,40
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	97,43	97,85	98,27	98,69	99,11	99,53	99,95
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	80,62	80,85	81,08	81,31	81,54	81,77	82,00
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	70,42	72,42	72,62	72,82	73,02	73,22	73,42
1.7	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah (per 1000)								
	a.SD/MI	%	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	b.SMP/MTs	%	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
2.	Kesehatan								
2.1	Meningkatnya Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	66,64	67,14	67,69	68,19	68,69	69,19	69,64
2.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	161,4	161,2	161	160,8	160,6	160,4	160,2
2.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0
2.4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
2.5	Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit (Versi JCI)	Nilai	60	64,17	68,33	72,50	76,66	80,83	85
2.6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Type	C	C	C	C	C	B	B

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.7	Rasio Puskesmas	Per 30.000 Penduduk	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	20,51	28,81	37,11	45,41	53,71	62,01	70,00
3.2	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	%	46,73	50,93	55,61	60,28	65,42	70,56	75,70
3.3	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	N/A	45	50	55	68	75	85
3.4	Akses Air Minum Layak	%	54,73	60,20	66,10	72,00	77,90	83,80	90,00
3.5	Akses Sanitasi Layak	%	27,45	36,15	44,85	53,55	62,25	70,95	80,00
3.6	Persentase Pembangunan sesuai dokumen perencanaan tata ruang	%	N/A	N/A	60	65	70	70	70
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	RT	93,57	94,31	95,04	95,78	96,52	97,26	98,00
	Jumlah Kawasan Kumuh	Kawasan	2	2	2	1	1	0	0
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Cakupan Siaga Tribun dan Tramas	Kali/Hari	0,16	0,17	1	2	2	3	3
5.2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	0	0	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan Layanan WMK	%	42,86	42,86	42,86	70	100	100	100
5.4	Respon time	menit	40	30	30	20	15	15	15
5.5	Persentase Nagari Tangguh Bencana	%	17,94	28,20	46,15	64,10	82,05	92,30	100
5.6	Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	%	70	71	72	73	74	75	76
5.7	Persentase partisipasi pemilih dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada	%	69	-	-	-	85,60	87,85	-
6.	Urusan Sosial								
6.1	Persentase Cakupan Pelayanan PMKS	%	25	26	30	35	40	45	50
6.2	Ketersediaan Tenaga Pedamping Sosial (Minimal 66 Orang)	%	84,85	84,85	100	100	100	100	100
6.3	Persentase Penduduk Bekerja yang membayar zakat melalui Baznas	%	6,03	6,03	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
7.	Urusan Ketenagakerjaan								
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,18	67,68	68,18	68,68	69,18	69,68	70
7.2	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat								
8.1	Indek Pembangunan Gender	%	71,53	71,78	72,03	72,28	72,53	72,78	73,03
8.2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	40	80	80	80	80	80	80
8.3	Persentase Keluarga Sejahtera	%	90,19	91,19	92,19	93,19	94,19	95,19	96,19
9.	Urusan Pangan								
9.1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	182	182	184	185	186	188	190
9.2	Skor Pola Pangan Harapan	%	51,6	57,16	62,72	68,28	73,84	79,40	85
10.	Lingkungan Hidup								
10.1	Cakupan Layanan Persampahan	%	18,00	25,00	30,00	45,00	60,00	65,00	80,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.2	Persentase nagari yang memiliki Ruang Terbuka Hijau	%	17,95	30,77	43,59	56,41	69,23	82,05	100
10.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	50	55	60	65	70	75	80
10.4	Penghargaan Adipura	Buah	0	0	0	1	1	1	1
10.5	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
11.1	Persentase Pasangan Usia Subur yang mengikuti Program KB	%	51,3	52,5	53,9	55,4	57,0	58,6	60,2
11.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,85	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11.3	Persentase PUS sebagai Akseptor KB melalui Program Mandiri	%	20	25	35	45	50	55	60
12	Urusan Perhubungan								
12.1	Rasio Ketersediaan Angkutan Umum	Per 10.000 penduduk	0,68	0,90	1,12	1,34	1,56	1,78	2,00
12.2	Ketersediaan Prasarana Fasilitas Perhubungan								
	- Terminal Angkutan Orang (4 Unit)	%	50	50	50	50	50	75	100
	- Terminal Angkutan Barang (1 unit)	%	0	0	0	0	0	0	100
	- Dermaga (3 unit)	%	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	100	100
12.3	Persentase Angkutan Umum Laik Operasi	%	20	20	40	60	80	90	95
13	Urusan Komunikasi dan Informasi								
13.1	OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik	OPD	2	2	4	6	8	10	12
13.2	Cakupan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
14.1	Persentase Koperasi Aktif	%	48	52	56	60	64	68	70
14.2	Pertumbuhan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	%	1,3	1,3	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
14.3	Jumlah UMKM yang difasilitasi Permodalan	Unit	40	50	50	40	40	40	45
15	Urusan Penanaman Modal								
15.1	Jumlah Nilai Investasi (PMA)	US \$	15.384	15.384	38.461	76.922	153.844	307.688	615.376
15.2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN)	Rp. Juta	82.000	82.000	120.000	180.000	200.000	250.000	250.000
15.3	Perizinan Tepat Waktu	(%)	90	90	95	95	100	100	100
16	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
16.1	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk Provinsi	Orang	N/A	2	2	2	2	2	2
16.2	Jumlah Wirausahawan Baru yang dipelopori Oleh Pemuda	Orang	10	10	10	10	10	10	10
16.3	Nagari yang memiliki gelanggang/ sarana olahraga (minimal 1 per nagari)	%	80	82	86	89	92	96	100
16.4	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	%	N/A	5	10	15	20	30	40
16.5	Peringkat PORPROV	Peringkat	18	14	-	10	-	8	-
16.6	Athlet yang berprestasi tingkat provinsi	orang	N/A	30	5	50	10	70	15
17	Urusan Statistik								
17.1	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Urusan Persandian								
18.1	Persentase OPD yang menerapkan SOP Persandian	%	N/A	N/A	50	75	90	100	100
19	Urusan Kebudayaan								
19.1	Jumlah Cagar Budaya yang Direvitalisasi	CB	0	0	5	5	5	5	5
19.2	Persentase Nagari yang memiliki Medan nan Bapaneh	%	N/A	N/A	5	20	40	80	100
19.3	Jumlah Sanggar Budaya Berprestasi	Sanggar	5	5	5	5	5	5	5
20	Urusan Perpustakaan								
20.1	Jumlah Koleksi Buku								
	- Jumlah Judul Buku	Judul	2.922	2.922	3.422	3.922	4.422	4.922	5.422
	- Jumlah Buku	Buah	8.764	8.764	10.264	11.764	13.264	14.764	16.264
20.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	598	600	650	700	800	900	1.000
21	Urusan Kearsipan								
21.1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	3	13	17	30	40	57	83
21.2	Implementasi Data Base Informasi Kearsipan	(e-Arsip)	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
II	Urusan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	900	900	1.130	1.340	1.645	1.810	1.990
1.2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita	20,30	20,30	20,80	21,50	22,00	23,00	24,00
2	Urusan Pariwisata								
2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	2.750	2.750	3.000	4.000	5.000	7.000	10.000
2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	N/A	N/A	500	600	1.000	1.500	2.000
2.3	Jumlah Objek Wisata Unggulan	Objek	2	2	3	4	4	5	5
2.4	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pokdarwis	Objek	1	5	11	16	21	26	31
3	Urusan Pertanian								
3.1	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan								
	- Padi	Ton	131.437	135.380	139.442	143.625	147.934	152.372	156.943
	- Jagung	Ton	54.074	55.696	57.367	59.088	60.861	62.687	64.567
	- Kopi	Ton	1.625	1.673	1.724	1.775	1.829	1.883	1.940
	- Kelapa sawit	Ton	2.577	2.654	2.734	2.816	2.900	2.987	3.077
	- Karet	Ton	12.027	12.388	12.760	13.142	13.537	13.943	14.361
	- Ternak Besar (Sapi dan Kerbau)	Ekor	15.651	16.494	17.336	18.179	19.022	19.864	20.707
	- Ternak Kecil (Kambing)	Ekor	8.535	8.628	8.720	8.813	8.905	8.998	9.090
	- Unggas	Ekor	117.514	118.764	120.014	121.264	122.514	123.764	125.014
3.2	Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	37,83	44,14	50,45	56,76	63,07	69,38	75,67
3.3	Berkembangnya KSP Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan	3	3	6	7	7	7	7
3.4	Berkembangnya KSP Perkebunan	Kawasan	3	4	4	5	6	7	7
3.5	Berkembangnya KSP Peternakan	Kawasan	1	1	2	3	3	3	3
3.6	Berkembangnya Sentra Agrobisnis.	Kawasan	2	2	3	4	4	4	4
4	Urusan Energi Sumber Daya Mineral								
4.1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	68,57	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00
4.2	Persentase kelompok pemanfaat energi terbarukan aktif	%	62	62	67	71	75	79	80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Perdagangan								
5.1	Pengaduan Konsumen yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Pasar Kabupaten yang representatif	unit	0	0	2	2	2	2	2
6	Perindustrian								
6.1	Jumlah IKM yang Mengekspor Produk ke luar Daerah	IKM	1	2	4	6	8	10	12
6.2	Jumlah IKM yang menerapkan Good Hygiene	IKM	N/A	N/A	1	2	3	4	5
6.3	IKM yang memiliki HAKI	IKM	8	10	15	20	25	28	33
6.4	IKM memiliki Sertifikat Halal	IKM	13	19	24	29	34	39	44
III	Fungsi Penunjang								
1	Perencanaan								
1.1	Sinkronisasi Perencanaan dengan Penganggaran	%	N/A	100	100	100	100	100	100
1.2	Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu	%	25	50	100	100	100	100	100
1.3	Persentase Pencapaian Kinerja	%	N/A	N/A	90	90	90	90	90
1.4	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga dan Swasta yang disepakati	MoU	2	2	2	2	2	2	2
2	Penelitian dan Pengembangan								
2.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Keuangan								
3.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Persentase Pencapaian Target PAD	%	100	100	100	100	100	100	100
3.3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	5,86	6,36	6,87	7,38	7,89	8,40	8,90
4	Kepegawaian								
4.1	Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat Struktural								
	- Eselon II	%	52	56	53	57	63	70	77
	- Eselon III	%	44	45	50	60	68	74	80
	- Eselon IV	%	15	25	35	45	55	65	75
4.2	Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:	%							
	- S1	%	51	51	56	59	66	73	80
	- S2	%	3,00	3,00	4,32	5,74	7,16	8,58	10
	- S3	%	0,10	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
4.3	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan Analisa Jabatan	%	N/A	N/A	45	60	75	80	80
5	Pelayanan Pemerintahan lainnya								
5.1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	C	C	CC	B	BB	BB	A
5.2	Nilai LKPJ	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5.3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	70	70	75	80	85	90	95
5.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indek	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	47	100	100	100	100	100	100
5.6	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	0	2	2	2	2	2	2
5.7	Persentase TLHP yang diselesaikan	%	30	40	50	60	70	75	80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.8	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	%	0	0	20	100	100	100	100
5.9	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	II dengan catatan	II dengan catatan	II	III dengan catatan	III	III	III
5.10	Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Peringkat	18	-	16	-	12	-	10
5.11	Tuan Rumah MTQ Nasional Tingkat Provinsi	Belum/ Sudah	Belum	-	Belum	-	Sudah	-	-
5.12	Jumlah Masyarakat Berprestasi Bidang Keagamaan (Minimal Tingkat Provinsi)	Orang	N/A	-	2	2	2	2	2
C	ASPEK DAYA SAING								
1	Nilai Tukar Petani	Rasio	95	98	99	100	101	102	104
2	Produktifitas Total daerah	Rp. Juta	61,73	66,58	71,80	77,43	83,50	90,05	97,12

Sumber : BPS, SKPD terkait dan Data diolah

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Solok Selatan lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2016-2021 memiliki titik sambung dengan program-program pembangunan pemerintahan sebelumnya. RPJMD Tahun 2016-2021 yang saat ini sedang disusun, akan memiliki kesinambungan dengan RPJMD periode selanjutnya. Oleh karena itu, diakhir periode RPJMD membuka ruang adanya periode transisi untuk berjalannya program-program pembangunan pemerintahan selanjutnya.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 ayat (2) huruf j, menyatakan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Berdasarkan peraturan tersebut maka RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD, akan dipergunakan untuk 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan pada tahun 2021. Dengan demikian program dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 adalah program sampai dengan tahun 2022 (ruang transisi) yang akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode selanjutnya.

Ruang transisi dimaksudkan agar tidak terdapat ruang kosong dan diskontinuitas bagi proses pembangunan di Kabupaten Solok Selatan. RPJMD transisi berfungsi sebagai dokumen

perencanaan pembangunan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. RPJMD transisi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan pada tahun transisi, juga sebagai acuan bagi seluruh pemangku pembangunan daerah (stakeholders) untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu, RPJMD transisi juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam tahun transisi.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Solok Selatan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang OPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;
- b. Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
- c. RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2016-2021;
- d. Penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
- e. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021;
- f. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- g. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 ini;
- h. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;


- i. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
- j. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”;
- k. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Daerah lainnya, serta Dunia Usaha untuk mendukung pelaksanaan RPJMD. Program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sementara pendapatan asli daerah sangat terbatas. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu diperhatikan. Selain itu koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Dunia Usaha juga menjadi hal strategis dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.
- l. Hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf j sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- m. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;

10.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui

pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Solok Selatan, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

- 1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Di dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bahwa Pemerintah berperan memberikan Fasilitas untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan untuk menuju Solok Selatan Sejahtera dan Religius serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan perusahaan.
- 3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

BUPATI SOLOK SELATAN,

H. MUZNI ZAKARIA



**KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2016**

www.solselkab.go.id